

LAPORAN KINERJA KPKNL BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024



KPKNL Bandar Lampung
SIAP MENUJU ZI-WBBM



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014), Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Nomor KEP-11/KNL.0502/2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja KPKNL Bandar Lampung Nomor KEP-11/KNL.0502/2024 tanggal 11 Januari 2024, Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-4705/KN.1/2024 tanggal 15 Desember 2024 dan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu Nomor 1172/WKN.05/2024 tanggal 17 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung telah menyusun Laporan Kinerja sebagai rangkuman dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis tahun 2024.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Tahun 2024, sebagai tahun anggaran dan tahun terakhir pencapaian rencana strategis lima tahunan, telah berakhir dan dapat kita lampaui ekspektasi

kinerja kita bersama dengan baik. Hal tersebut terlihat dari selalu naiknya Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bandar Lampung di lima tahun terakhir.

Adanya pergantian pimpinan tidak menurunkan semangat maupun upaya seluruh insan KPKNL Bandar Lampung dalam mewujudkan pencapaian kinerja organisasi. Usaha tidak mengkhianati hasil, pengukuran kinerja tahun 2024 KPKNL Bandar Lampung berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung dengan sangat baik sebesar **115,94%**.

Tidak kalah penting dan yang paling utama, kami ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran KPKNL Bandar Lampung, atas kinerja, kerja sama yang baik, terjaganya integritas dan kualitas layanan selama tahun 2024 ini. Semoga lima tahun ke depan, tantangan menjaga Nilai Kinerja Organisasi tetap tinggi dengan menyandang Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dapat kita wujudkan bersama.

Selamat melanjutkan perjuangan kepada seluruh jajaran KPKNL Bandar Lampung, tetap bersinergi, terus semangat dan semoga sukses menjalani tantangan-tantangan berikutnya.

Bandar Lampung, 24 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung



Ditandatangani secara elektronik
Titik Wijayanti



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR DIAGRAM	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
B. MANDAT, PERAN DAN ISU STRATEGIS	3
C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ADAPTIF	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. REALISASI ANGGARAN	127
C. KINERJA LAINNYA	130
D. PENGHARGAAN	137
E. GENDER EQUALITY, DISABILITY AND SOCIAL INCLUSION (GEDSI)	140
BAB IV PENUTUP	141
LAMPIRAN	

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Struktur Organisasi KPKNL Bandar Lampung Akhir Tahun 2024	3
Diagram 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2024.....	3
Diagram 3 Peta Strategis KPKNL Bandar Lampung Tahun 2024	11
Diagram 4 Capaian Kinerja Keseluruhan sasaran kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2024.....	19
Diagram 5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja KPKNL Bandar Lampung Berdasarkan Perspektif Tahun 2024	19
Diagram 6 Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2024	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja KPKNL Bandar Lampung 2020 s.d. 2024	12
Tabel 2 Perjanjian Kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2024	14
Tabel 3 Rincian Pagu Kegiatan KPKNL Bandar Lampung.....	16
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan.....	20
Tabel 5 Capaian Trajectory Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.....	21
Tabel 6 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	24
Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2020 s.d. 2024	25
Tabel 8 Capaian Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2018 s.d. 2024	25
Tabel 9 Alignment Perjanjian Kerja, Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 1a-CP	26
Tabel 10 Capaian Trajectory Indikator Kinerja Indeks Integritas	31
Tabel 11 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Integritas	33
Tabel 12 Alignment, Perjanjian Kerja, Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 1b-CP.....	34
Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	36
Tabel 14 Capaian Trajectory Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2024.....	38
Tabel 15 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.....	40
Tabel 16 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2a-CP	41
Tabel 17 Kriteria Persetujuan yang telah dilakukan tindak lanjut.....	43
Tabel 18 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara Tahun 2024	44
Tabel 19 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan BMN	46
Tabel 20 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2b-CP	46
Tabel 21 Capaian Indikator Kinerja pada Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	48
Tabel 22 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024.....	48
Tabel 23 Rincian Target dan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024	49

Tabel 24 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang	50
Tabel 25 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3a-CP	51
Tabel 26 Capaian Trajectory Indikator Kinerja Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	53
Tabel 27 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	54
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2021 s.d. 2024.....	55
Tabel 29 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3b-CP	55
Tabel 30 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.....	58
Tabel 31 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Rata-rata Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	60
Tabel 32 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	62
Tabel 33 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 4a-CP	62
Tabel 34 Capaian Indikator Kinerja pada Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif.....	64
Tabel 35 Pembagian Kendali Program Sertifikasi BMN	66
Tabel 36 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan Tahun 2024	67
Tabel 37 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan.....	68
Tabel 38 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5a-CP	69
Tabel 39 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).....	72
Tabel 40 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset).....	74
Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) Tahun 2020 s.d. 2024.....	74
Tabel 42 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5b-CP	75
Tabel 43 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle.....	76
Tabel 44 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle.....	77
Tabel 45 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5c-N	78
Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif.....	80

Tabel 47 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Saldo BKPN Tahun 2024	81
Tabel 48 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle.....	84
Tabel 49 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Saldo BKPN tahun 2020 s.d. 2024.....	84
Tabel 50 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6a-CP.....	85
Tabel 51 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Saldo BKPN Tahun 2024	88
Tabel 52 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Produktivitas Lelang	89
Tabel 53 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6b-CP.....	90
Tabel 54 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2024	94
Tabel 55 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	95
Tabel 56 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 7a-CP	96
Tabel 57 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	98
Tabel 58 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	99
Tabel 59 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 8a-N	100
Tabel 60 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	102
Tabel 61 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai.....	104
Tabel 62 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 8a-N	105
Tabel 63 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis : Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	107
Tabel 64 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kinerja Anggaran.....	108
Tabel 65 Target dan Realisasi indeks Kinerja Anggaran Tahun 2016 s.d. 2024.....	109
Tabel 66 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 9a-CP	109
Tabel 67 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN Tahun 2024.....	111
Tabel 68 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 9b-CP.....	112
Tabel 69 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Komunikasi Publik yang Efektif.....	113
Tabel 70 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik Tahun 2024	114

Tabel 71 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik	115
Tabel 72 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 10a-N.....	116
Tabel 73 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	117
Tabel 74 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal.....	119
Tabel 75 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal.....	121
Tabel 76 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 11a-N.....	121
Tabel 77 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK Tahun 2024.....	124
Tabel 78 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 11b-N	126
Tabel 79 Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	128
Tabel 80 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 s.d. 2024.....	128
Tabel 81 Rincian Pagu dan Realisasi per Kegiatan di KPKNL Bandar Lampung.....	129
.....	131

DAFTAR FOTO

Foto 1 Sosialisasi Pengelolaan BMN, Penilaian dan Lelang, 9 September 2024	23
Foto 2 Bimbingan Teknis SIMAN V2, Sosialisasi Tugas dan Fungsi KPKNL di UIN, 24 Juni 2024	23
Foto 3 Sharing Session Lelang Versi 2 dengan KPKNL Serang, 9 Desember 2024	28
Foto 4 Jalan Sehat dan Sosialisasi Antigratifikasi	32
Foto 5 Sosialisasi Antigratifikasi kepada Satuan Kerja d lingkungan KPKNL Bandar Lampung	32
Foto 6 Integrity Sharing oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung	33
Foto 7 Bimbingan Teknis Pengukuran Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK Satker POLRI, 21 Maret 2024	39
Foto 8 Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi SBSK Polres Tanggamus, 30 Juli 2024	40
Foto 9 Sosialisasi Lelang Bersama PNM, 4 Maret 2024	50
Foto 10 Rekonsiliasi Piutang Negara dengan KSOP Panjang, 25 April 2024	56
Foto 11 Proses Penilaian Sewa ATM Liwa, 5 November 2024	61
Foto 12 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi, 19 Desember 2024	68
Foto 13 Asistensi Evaluasi Kinerja BMN pada Kejari Kab. Lampung Selatan, 16 Juli 2024	73
Foto 14 Asistensi Evaluasi Kinerja BMN pada BPKP Provinsi Lampung, 7 September 2024	73
Foto 15 Monitoring dan Evaluasi BMN Idle Kota Bandar Lampung	79
Foto 16 Monitoring dan Evaluasi BMN Idle Kabupaten Lampung Selatan	79
Foto 17 Koordinasi PUPN Cabang Bandar Lampung, 24 Juli 2024	83
Foto 18 Bimbingan Teknis Lelang Versi 2, 26 September 2024	89
Foto 19 Sosialisasi SIMAN Versi 2 bertempat di KPPN Liwa, 21 Oktober 2024	95
Foto 20 Gambar Sosialisasi Manajemen Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko tahun 2024	103
Foto 21 Gambar Sosialisasi Manajemen Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko tahun 2024	104
Foto 22 Sosialisasi Anti Gratifikasi kepada BPKAD Pesawaran, 18 November 2024	123
Foto 23 Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK setiap Bulan	125
Foto 24 In House Training dan Jalan Sehat, 5 Januari 2024	131
Foto 25 Bantal Edisi Ramadhan, 21 Maret 2024	131
Foto 26 Kegiatan Olahraga Rutin – Futsal yang merupakan Inisiasi dari Agen Perubahan	132
Foto 27 Gebyar Lelang 116, 3 Mei 2024	132
Foto 28 Pemasangan Plang BLBI, 25 Juni 2024	133
Foto 29 Forum Konsultasi Publik, 28 Agustus 2024	133
Foto 30 Collocation di KPPN Liwa – Mendekatkan Layanan ke Pengguna (Inovasi), 21 Oktober 2024	134
Foto 31 Nota Kesepahaman dengan Kabupaten Tanggamus, 4 November 2024	134
Foto 32 Goes to Campus, 7 November 2024	135

Foto 33 Edukasi Publik di ITERA, 8 November 2024	135
Foto 34 Focus Group Discussion TIK oleh KPTIK Medan, 13 November 2024.....	136
Foto 35 Tali Kasih Hari Kekayaan Negara, 4 Desember 2024.....	136
Foto 36 Perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia, 10 Desember 2024.....	137
Foto 37 Penghargaan kepada Seksi Piutang Negara (1).....	137
Foto 38 Penghargaan kepada Seksi Piutang Negara (2).....	138
Foto 39 Penghargaan kepada Seksi Kepatuhan Internal (1)	138
Foto 40 Penghargaan kepada Seksi PKN, PN dan Lelang.....	139
Foto 41 Penghargaan kepada Pejabat Fungsional Pelelang.....	139
Foto 42 Penghargaan kepada Seksi Kepatuhan Internal (2).....	140

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPKNL Bandar Lampung adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, KPKNL Bandar Lampung memiliki visi sesuai dengan Kantor Pusat DJKN yaitu: “Menjadi pengelola kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sementara Misi KPKNL Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, efisiensi pengeluaran, optimalisasi penerimaan, dan pembiayaan dengan risiko minimum.
2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah yang dapat mewujudkan keseimbangan makro dalam pembangunan nasional melalui kebijakan investasi yang tepat, sehingga terjadi sinergi pemerintah, BUMN dan sektor swasta.
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengelolaan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
6. Mengelola sumber daya untuk pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah secara efisien.
7. Mengembangkan proses bisnis berbasis digital yang responsif dengan perkembangan teknologi.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bandar Lampung mengemban tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

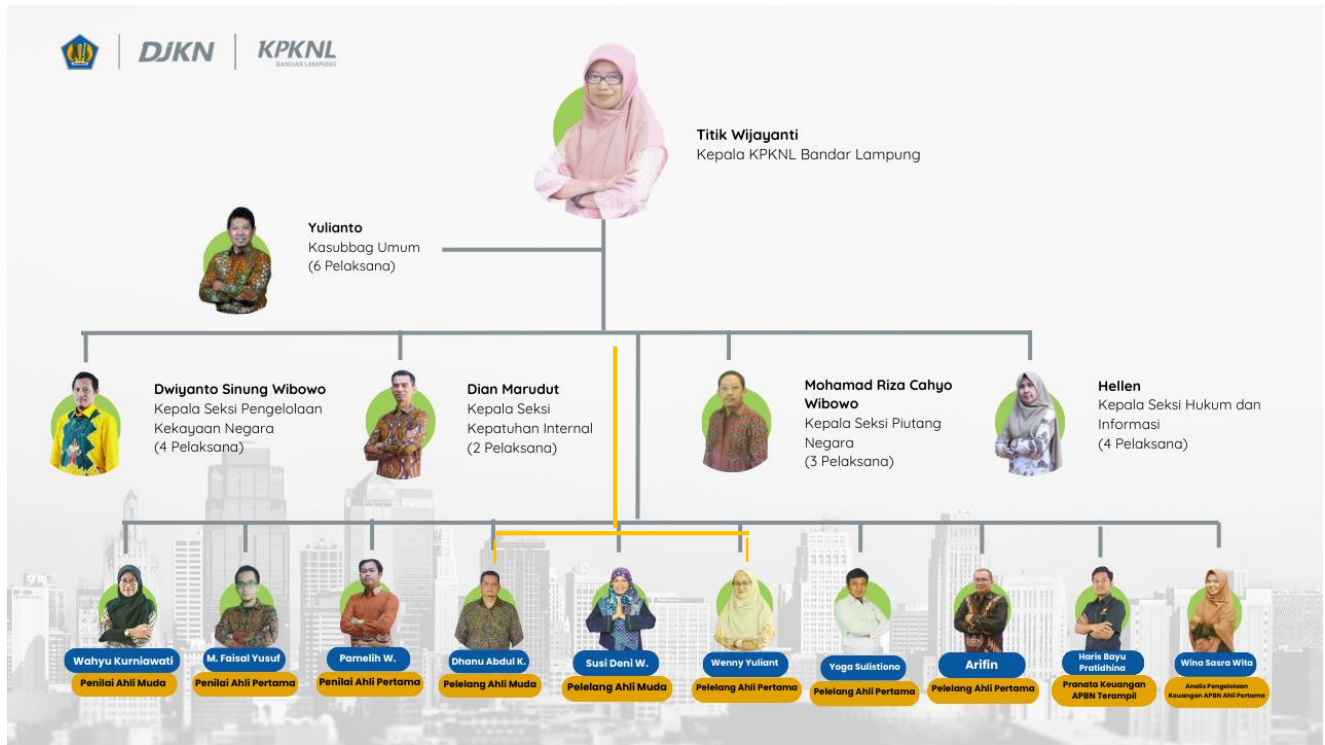
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud KPKNL Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung dibatasi dengan wilayah kerja yang menjadi wewenangnya. Adapun wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung tersebar dalam 1 (satu) kota dan 6 (enam) kabupaten di Provinsi Lampung yang meliputi: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pringsewu.

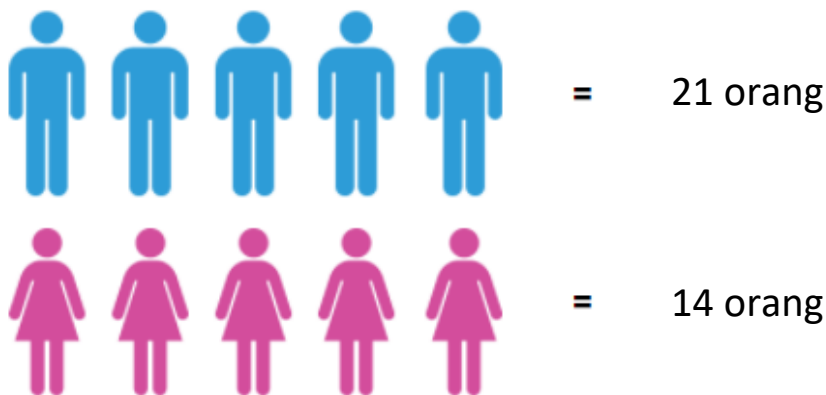
Untuk menjalankan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala Kantor yang didukung oleh empat Kepala Seksi, satu Kepala Subbagian Umum, serta tiga rumpun Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi KPKNL Bandar Lampung tergambar pada Struktur Organisasi di bawah ini:

Diagram 1 **Struktur Organisasi KPKNL Bandar Lampung Akhir Tahun 2024**



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya s.d. 31 Desember 2024, KPKNL Bandar Lampung didukung oleh 35 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Diagram 2 **Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2024**



B. MANDAT, PERAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi KPKNL Bandar Lampung dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan KPKNL Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara antara lain:

- a. Pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, dengan ketentuan seluruh BMN telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya;
- b. Pengawasan dan pengendalian (wasdal) yang efektif;
- c. Penatausahaan dan pengamanan kekayaan Negara yang akuntabel;
- d. Kesadaran akan kepatuhan pengguna layanan (*stakeholder*) yang tinggi.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara adalah:

- a. Pengembangan dan implementasi *capacity building* secara periodik dan masif terkait teknis, manfaat sektoral dan nasional pengelolaan aset pada seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai upaya pemanfaatan aset melalui mekanisme kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat umum;
- c. Pengembangan dan penerapan layanan virtual secara bertahap untuk seluruh jenis layanan kepada pengguna jasa.

2. Peningkatan pelayanan penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan penilaian antara lain:

- a. Mengikuti kegiatan *Knowledge Sharing*, sosialisasi, Focus Group Discussion, webinar, diskusi berkala lainnya, di bidang penilaian dalam rangka peningkatan kompetensi penilai.
- b. Mengoptimalkan kegiatan kendali mutu baik melalui kegiatan pemaparan (*peer review*) maupun melalui pengecekan dalam bentuk lembar pemeriksaan (*routing slip*) laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.

- c. Melakukan survei data properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung dalam rangka penyusunan basis data penilaian untuk mendukung tugas pokok penilaian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian.
- d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.

3. Optimalisasi pengelolaan dan pengurusan piutang negara dan/atau daerah

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Pengurusan piutang negara yang optimal.
- b. PNBPN dari pengurusan piutang negara yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Koordinasi dan sosialisasi pengurusan piutang negara ke instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penggalan potensi piutang K/L dan piutang pemerintah daerah.
- b. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui tahapan pemeriksaan.

4. Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Pelayanan lelang yang optimal.
- b. PNBPN dari pelayanan lelang yang optimal.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain:

- a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun Non Eksekusi.
- b. Improvisasi dan inovasi layanan lelang guna peningkatan pelayanan lelang melalui pojok *e-auction*.

- c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang yang dilakukan melalui pelaksanaan *Forum Grup Discussion (FGD)* yang dilaksanakan rutin untuk memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi pada pelaksanaan lelang dan juga sebagai sarana *knowledge sharing* bagi Pejabat Lelang;
- d. Sosialisasi aplikasi dan penggunaan lelang versi 2.

5. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan, *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
- b. SDM yang kompetitif.
- c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
- d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.
- e. Monitoring dan evaluasi yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- b. Pengelolaan kinerja yang efektif dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.
- c. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
- d. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan kepada para stakeholder.
- e. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai dengan mengikuti seminar, diklat, dan *knowledge sharing*.
- f. Peningkatan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih responsif.

6. Zona Integritas WBK/WBBM

Kondisi yang ingin dicapai adalah diraihnya Predikat ZI-WBK/WBBM oleh KPKNL Bandar Lampung. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah :

- a. Membuat perencanaan dan target prioritas;
- b. Membangun komitmen dan mindset yang solid;
- c. Memunculkan inovasi-inovasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- e. Melakukan *benchmarking*, *island of integrity* dan koordinasi yang berkesinambungan.

7. Pengelolaan Aset Eks BPPN

Kondisi yang ingin dicapai adalah terjaga dan terpeliharanya fisik aset yang merupakan kekayaan negara. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Melakukan inventarisasi aset Eks BPPN;
- b. Melakukan peninjauan fisik secara berkala;
- c. Melakukan pemasangan plang;
- d. Bekerjasama dengan aparat setempat dan aparat penegak hukum;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;

C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ADAPTIF

Dalam pencapaian kinerja tahun 2024, KPKNL Bandar Lampung menghadapi berbagai kendala diantaranya:

1. Pergantian pimpinan di pertengahan tahun;
2. Respon satuan kerja terhadap pelaksanaan sertifikasi, sbsk, portofolio aset yang kurang optimal;
3. Transisi aplikasi lelang versi 2;
4. Rendahnya tingkat kesadaran para penanggung hutang untuk menyelesaikan kewajibannya;
5. Rendahnya kemampuan pemohon penilaian dalam menaksir harga.

Langkah-langkah adaptif ke depan yang akan dilakukan oleh KPKNL Bandar Lampung untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Melakukan kegiatan-kegiatan *bonding* baik secara formal dan informal;

2. Membangun budaya *asset awareness* (tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik) yang efektif, efisien dan optimal di level satuan kerja;
3. Meningkatkan pengelolaan asset sebagai instrument APBN melalui penerimaan PNBP dan pembiayaan belanja modal dan infrasutruktur;
4. Membangun budaya virtual yang efektif dalam proses layanan aset;
5. Melaksanakan kegiatan edukasi baik berupa bimbingan teknis, sosialisasi, pendampingan maupun surat himbauan kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Bandar Lampung.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

KPKNL Bandar Lampung sebagai organisasi vertikal DJKN secara penuh memberikan dukungan atas pencapaian visi dan misi DJKN tersebut. KPKNL Bandar Lampung menyusun Rencana Strategis yang bersesuaian dengan Rencana Strategis DJKN melalui Keputusan Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor KEP-131/WKN.05/KNL.03/2020 tentang Rencana Srategis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung Tahun 2020-2024 yang didalamnya memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis.

KPKNL Bandar Lampung memiliki visi sesuai dengan Kantor Pusat DJKN yaitu: **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di lingkungan wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung”**. Sementara Enam Misi KPKNL Bandar Lampung di dalam Renstra-nya, sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

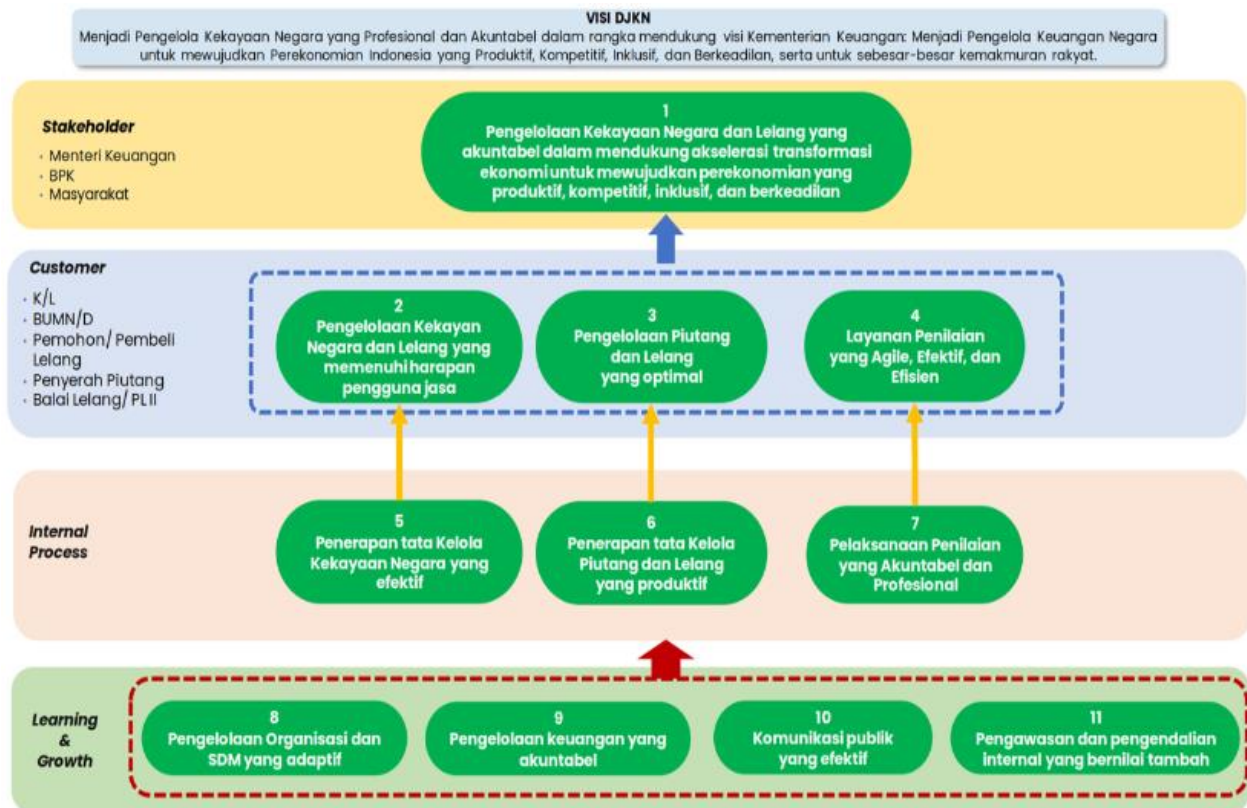
Misi tersebut diterjemahkan dalam beberapa tujuan yang mengacu pada organisasi yang menaunginya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Peningkatan pelayanan penilaian;
3. Optimalisasi pengurusan piutang negara;
4. Peningkatan pelayanan lelang;
5. Perbaikan pelayanan, SDM yang kompetitif, dan proses bisnis organisasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai fokus pada lima core yaitu peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, peningkatan pelayanan penilaian. Optimalisasi pengurusan Piutang Negara, Peningkatan Pelayanan Lelang dan Kesiambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Governance dan Penguatan Organisasi. Dalam kurun lima tahun dari 2020 s.d. 2024, penamaan dan tata letak sasaran strategis dalam peta strategis kerap disesuaikan.

Sebagaimana Peta Strategi pada KPKNL Bandar Lampung Tahun 2024 memuat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang tergambar dalam diagram sebagai berikut.

Diagram 3 **Peta Strategis KPKNL Bandar Lampung Tahun 2024**



Uraian 11 (Sebelas) (11) Sasaran Strategis yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
3. Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal;
4. Layanan Penilaian yang *Agile*, Efektif dan Efisien;
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif;
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel;
10. Komunikasi publik yg efektif;
11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah.

Walaupun ada beberapa penyesuaian nama Indikator Kinerja, berikut adalah Indikator kinerja menengah yang menjadi acuan KPKNL Bandar Lampung berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020 s.d. 2024:

Tabel 1 **Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja KPKNL Bandar Lampung 2020 s.d. 2024**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Integritas	90	90,5	91	91,5	92
		Target lebih rendah dari target renstra DJKN					
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	55%	57%	60%	65%	70%
		Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	70%	75%	75%	80%	80%
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 M	105 M	110 M	115 M	120 M
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	Tidak ada target nasional dalam Renstra					
		Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	Target dalam Renstra DJKN				
			100%	100%	100%	100%	100%
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	Tidak ada target nasional dalam Renstra				
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Produktivitas Lelang	32%	34%	34%	34%	34%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	30%	29%	28%	27%	26%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Tidak ada target nasional dalam Renstra				
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	Tidak ada target nasional dalam Renstra				
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	Tidak ada target nasional dalam Renstra				
10.	Komunikasi Publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Tidak ada target nasional dalam Renstra				
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	Indeks Efektivitas UKI	Tidak ada target nasional dalam Renstra				
		Tingkat capaian unit kerja dan keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	Tidak ada target nasional dalam Renstra				

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam mewujudkan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 sebesar 115,94%, KPKNL Bandar Lampung memiliki rencana kerja dan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja

Perencanaan Kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2024 tertuang pada perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung di hadapan Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berikut adalah Perjanjian Kerja Kepala KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024:

Tabel 2 *Perjanjian Kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2024*

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp17,702 M)
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100 (Rp170,702M)
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100 (Rp 1 M)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100 (581)
		5b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100 (34 NUP & 9 Paket)
		5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	100
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	89 (286)
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10
10.	Komunikasi Publik yang efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	82
		11b-N	Tingkat capaian unit kerja dan keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

2. Alokasi Anggaran

Untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana dijelaskan pada poin 1, KPKNL Bandar Lampung mendapatkan alokasi sejumlah Rp2.441.409.000,-, sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko, yang terdiri dari dua kegiatan:
 - 1) Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi; Rp 9.336.000
 - 2) Pengelolaan Aset Rp 465.776.000

- b. Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari empat kegiatan: Rp 1.966.297.000
- 1) Legislasi dan Litigasi; Rp 26.281.000
 - 2) Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Rp 1.888.524.000
 - 3) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp 43.500.000
 - 4) Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Rp 7.992.000

Dapat disampaikan bahwa pada Triwulan 4 Tahun 2024 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *self-blocking* belanja perjalanan dinas dimana untuk KPKNL Bandar Lampung sejumlah Rp 10.031.000,00.

Dengan rincian pagu untuk pelaksanaan kinerja, sebagai berikut.

Tabel 3 Rincian Pagu Kegiatan KPKNL Bandar Lampung

CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	
		567.061.000
<u>CD.4796</u>	<u>Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi</u>	9.336.000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	9.336.000
AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	3.680.000
AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1.760.000
AEF.002	Sosialisasi/ Edukasi di Bidang Lelang	3.896.000
<u>CD.4798</u>	<u>Pengelolaan Aset</u>	<u>557.725.000</u>
AAH	Peraturan Lainnya	117.831.000
AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	80.760.000
AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	37.071.000
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	54.315.000
ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	21.915.000
ABA.003	Rekomendasi Hasil Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	32.400.000
BAE	Pelayanan Publik kepada UMKM	65.119.000
BAE.301	Risalah Lelang Sukarela UMKM	65.119.000
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	20.496.000
BAH.001	Risalah Lelang	20.496.000
FAE	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	134.038.000

FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	6.768.000
FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	10.800.000
FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	88.750.000
FAE.301	Rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan	27.720.000
FAK	Pengelolaan Aset BUN	75.354.000
FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	75.354.000
UAK	Pengelolaan Aset BUN	90.572.000
UAK.201	Aset Eks BLBI yang dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara	90.572.000
WA	Program Dukungan Manajemen	1.966.297.000
<u>WA.4700</u>	<u>Legislasi dan Litigasi</u>	<u>26.281.000</u>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	26.281.000
EBA. 969	Layanan Bantuan Hukum	26.281.000
<u>WA.4701</u>	<u>Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum</u>	<u>1.888.524.000</u>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.858.824.000
EBA.002	Kerumahtanggaan	68.743.000
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.790.081.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	29.700.000
EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	29.700.000
<u>WA.4702</u>	<u>Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik</u>	<u>43.500.000</u>
BMB	Komunikasi Publik	43.500.000
BMB.001	Pembinaan/ Edukasi Publik	27.000.000
BMB.002	Kehumasan	7.500.000
BMB.003	Pameran/ Eksibisi	9.000.000
<u>WA.4704</u>	<u>Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal</u>	<u>7.992.000</u>
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.992.000
EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	7.992.000

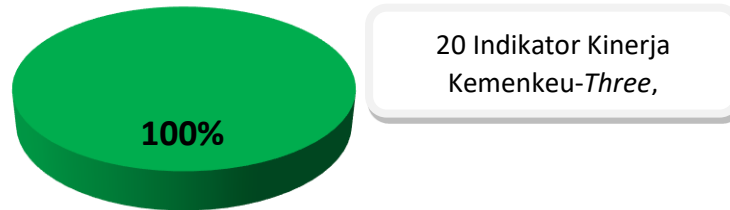
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja KPKNL Bandar Lampung tahun 2024 dilakukan dengan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian kinerja organisasi yang terdiri dari Indikator Kinerja (IKU). Pada tahun 2024 KPKNL Bandar Lampung menetapkan 11 (Sebelas) Sasaran Program/Kegiatan yang terjabarkan dalam 20 (dua puluh) indikator kinerja. Ikhtisar capaian kinerja unit Eselon III KPKNL Bandar Lampung tahun 2024 sebagai berikut:

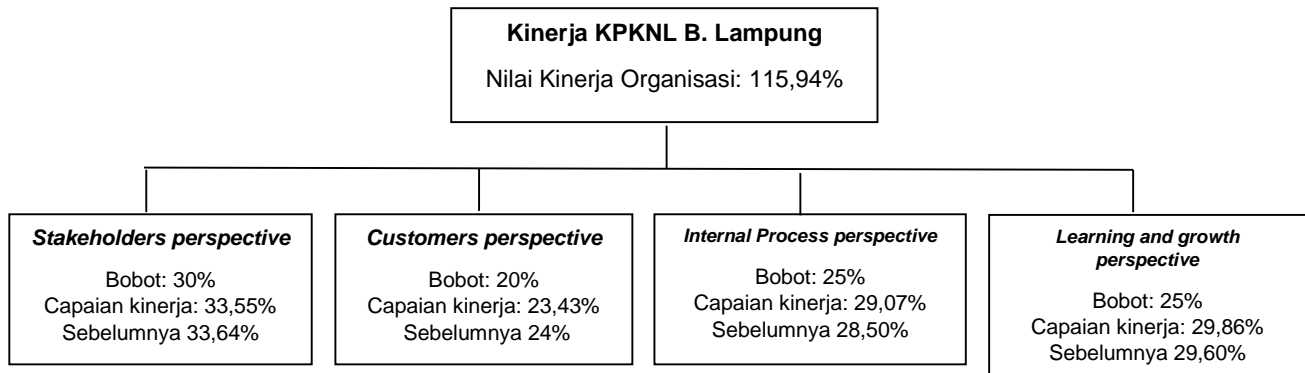
1. Indikator Kinerja dengan status hijau sejumlah 20 (dua puluh) sasaran kinerja pegawai yang terdiri dari:
 - a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - b. Indeks Integritas;
 - c. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan;
 - d. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN;
 - e. Persentase Realisasi Pokok Lelang;
 - f. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara;
 - g. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian;
 - h. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan;
 - i. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset);
 - j. Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN *Idle*;
 - k. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara;
 - l. Persentase Produktivitas Lelang;
 - m. Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian;
 - n. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai;
 - o. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko;
 - p. Indeks Kinerja Anggaran;
 - q. Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN;
 - r. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID);
 - s. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI);
 - t. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Diagram 4 Capaian Kinerja Keseluruhan sasaran kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2024



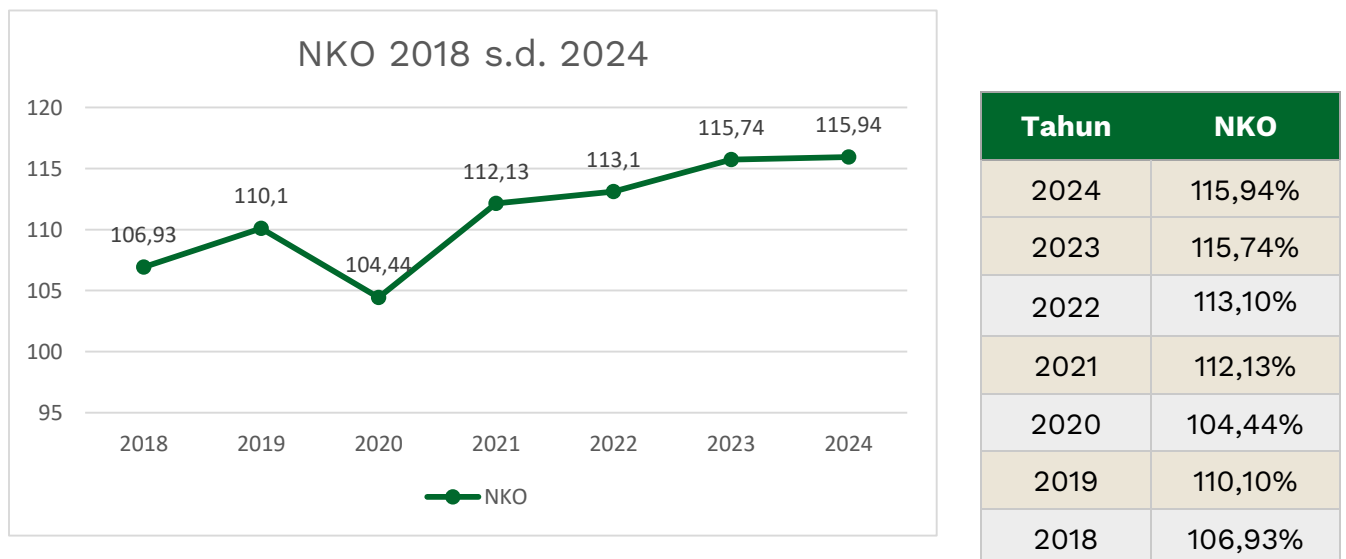
Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja tahun 2024 diketahui bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung sebesar 115,94% dengan rincian data capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Diagram 5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja KPKNL Bandar Lampung Berdasarkan Perspektif Tahun 2024



NKO Tahun 2024 merupakan NKO tertinggi selama kurun waktu enam tahun terakhir:

Diagram 6 Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bandar Lampung Tahun 2018 s.d. 2024



Penjelasan capaian indikator kinerja untuk setiap sasaran program/kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran program/kegiatan ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja. Dua Indikator Kinerja ini terkait karena tanpa adanya integritas dari pelayanan, mustahil terwujudnya realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 4.

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang;	100% (Rp 17,7 M)	139,13% (Rp 21,4 M)	121,09%
2.	Indeks Integritas	88,67	92,44	103,67%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1. PNBP Barang Milik Negara

- a. Penerimaan dari penggunaan Barang Milik Negara,
- b. Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh KPKNL Bandar Lampung,
- c. Penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL Bandar Lampung, dan
- d. Penerimaan dari hasil pemindahtanganan BMN yang berasal dari Barang Rampasan Kejaksaan.

yang sudah dikonfirmasi realisasinya kepada K/L bersangkutan dan KPPN setempat/ Ditjen Perbendaharaan.

2. PNBP Piutang Negara

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh KPKNL Bandar Lampung baik yang berasal dari angsuran, pelunasan, lelang maupun penarikan.

3. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL Bandar Lampung berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 *Capaian Trajectory Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang*

	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
	1a-CP : Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP

Target	10,00	30,00	30,00	50,00	50,00	100	100	Max /
Realisasi	19,04	36,16	36,16	93,21	93,21	121,09	121,09	TLK
Capaian	190,43	120,54	120,54	186,43	186,43	121,09	121,09	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi penerimaan negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp21.436.084.376,00 dari target 2024 sebesar Rp17.702.350.000,00, sehingga indeks capaian s.d. triwulan IV sebesar 121,09%. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. PNBPN Pengelolaan BMN = Rp13.544.708.359 (dari target Rp11.200.000.000, dengan capaian 120,93%).
- b. PNBPN Piutang Negara = Rp32.304.454 (dari target Rp8.500.000 dengan capaian 380,05%).
- c. PNBPN Lelang = Rp6.493.850.000 (dari target Rp7.859.071.563 dengan capaian 121,02%).

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Tidak hanya melakukan panggilan penyelesaian utang kepada seluruh debitur, Intensifikasi pengurusan piutang negara dilakukan melalui penagihan langsung secara tatap muka kepada setiap debitur;
2. Peningkatan status pengurusan piutang hingga penyampaian surat paksa;
3. Melakukan sosialisasi Crash Program Keringanan Utang;
4. Melakukan penggalan potensi lelang noneksekusi sukarela (UMKM);
5. Penelitian lapangan dalam rangka penggalan informasi terkait debitur;

6. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka penagihan bersama;
7. Pemantauan progress penyelesaian piutang secara berkala kepada setiap debitur;
8. Melakukan penggalian potensi ke seluruh satker di semua Wilayah kerja;
9. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Lelang.



Foto 1 **Sosialisasi Pengelolaan BMN, Penilaian dan Lelang, 9 September 2024**



Foto 2 **Bimbingan Teknis SIMAN V2, Sosialisasi Tugas dan Fungsi KPKNL di UIN, 24 Juni 2024**

Sedangkan Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya Anggaran dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 6 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	80,760,000	75,354,200	Telah dihasilkan 178 SK PSP dan 120 SK Persetujuan.
2	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	3,680,000	3,300,500	
2	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	37,071,000	31,023,000	Telah dihasilkan 64 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara.
4	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1,760,000	699,000	651 surat himbauan
5	Risalah Lelang	20,496,000	16,961,000	Telah dihasilkan 1879 Risalah Lelang.
6	Risalah Lelang Sukarela UMKM	65,119,000	58,100,400	Telah dihasilkan 25 Risalah Lelang UMKM.
7	Penggalian Potensi Lelang	88,750,000	77,724,700	Telah dilaksanakan sejumlah 14 penggalian potensi lelang
8	Sosialisasi/ Edukasi di Bidang Lelang	3,896,000	2,090,000	4 Kegiatan Sosialisasi Lelang

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah tercapai. Di sisi lain, sumber daya manusia yang melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara sejumlah 5 (lima) orang termasuk kepala seksi, Pengelolaan Piutang Negara 4 (empat) orang termasuk kepala seksi, dan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Pelelang Pertama dan 2 (dua) Pejabat Fungsional Pelelang Muda. Semua unsur bahu membahu mewujudkan capaian atas IKU ini.

Data kinerja untuk melihat perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung selama 5 tahun dari tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Indikator Kinerja Persentase Penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2020 s.d. 2024

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% (Rp14,74M)	87,98% (Rp12,97M)	100% (Rp13,93M)	110,54% (Rp15,40M)	100% (Rp14,01M)	129,5% (Rp18,11M)	100% (Rp15,4M)	139,13% (Rp21,4M)	100% (Rp17,7M)	121,09% (Rp21,4M)

Perbandingan capaian nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara pada KPKNL Bandar Lampung, jika dirinci menjadi PNBP Pengelolaan BMN (Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara), PNBP Piutang Negara (Seksi Piutang Negara) dan PNBP Lelang (Rumpun Jabatan Fungsional Pelelang) selama 5 tahun dari tahun 2020 s.d 2024, sebagai berikut.

Tabel 8 Capaian Nilai Manfaat Ekonomi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2018 s.d. 2024

	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	7.526.415.000	7.796.577.649	7.800.000.000	9.219.015.106
PNBP Piutang Negara	869.641	7.096.870	27.000.000	50.516.459
PNBP Lelang	7.220.000.000	5.171.082.677	6.110.000.000	6.137.103.848
	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	8.000.000.000	11.979.985.381	9.123.000.000	11.548.069.895
PNBP Piutang Negara	11.859.274	12.856.877	7.500.000	95.253.485
PNBP Lelang	6.000.000.000	6.118.970.851	6.273.000.000	9.788.006.356

	2024	
	Target	Realisasi
PNBP Pengelolaan BMN	11.200.000.000	13.544.708.359
PNBP Piutang Negara	8.500.000	32.304.454
PNBP Lelang	6.493.850.000	7.859.071.563

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 9 *Alignment Perjanjian Kerja, Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 1a-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	100	100	100	-	121,09
2023	100	100	100	100	-	139,13
2022	100	100	100	100	-	129,5
2021	100	100	100	100	-	110,54
2020	100	100	100	100	-	87,98

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap

tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Hal tersebut sejalan dengan kendala dan yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

1. Tidak adanya pengakuan utang oleh debitur yang bersangkutan khususnya pada debitur dari penyerahan oleh Pemerintah Daerah/ Dinas.
2. Rendahnya kesadaran debitur untuk melakukan penyelesaian kewajiban penyelesaian utang kepada negara;
3. Umur piutang terlalu lama sehingga menimbulkan permasalahan seperti debitur tidak dapat lagi ditemukan bahkan sudah meninggal dunia di sisi lain ahli warisnya tidak mengakui adanya piutang;
4. Kemampuan debitur untuk menyelesaikan utang relatif rendah;
5. Transisi Aplikasi Lelang Versi 2;
6. Belum optimal fungsi pengawasan KPKNL dan Kanwil terhadap satker KL untuk memutakhirkan data berupa persetujuan penjualan, risalah lelang, perjanjian sewa, dan bukti PNBP lainnya;
7. Tingkat Pemahaman satker K/L terhadap prosedur pelaksanaan pemindahtanganan dan pemanfaatan aset belum memadai dan belum merata;
8. PIC pengelolaan aset satker K/L kurang patuh dalam melengkapi data di SIMAN;
9. Barang yang dilelang kurang diminati tidak laku cukup tinggi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun atas pencapaian IKU Ini antara lain.

1. Koordinasi dengan kelurahan atau kantor desa setempat guna penelusuran debitur;
2. Dokumentasi perjanjian kredit sebagai dokumen sumber terjadinya utang piutang;
3. Melakukan sosialisasi melalui diskusi secara personal kepada setiap debitur terkait kewajiban penyelesaian utang kepada negara ;
4. Menginformasikan dan mendorong penggunaan fasilitas keringanan utang kepada debitur yang tidak memiliki kemampuan pembayaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.06/2024;
5. Laporan pengawasan dan pengendalian yang rutin;
6. Melakukan rekonsiliasi aset kredit dan properti eks BLBI dan optimalisasi pengurusan piutang negara;
7. Melakukan identifikasi setoran pada aplikasi Simponi setiap bulannya;

8. Melakukan *sharing session* mengenai Aplikasi Lelang Versi 2 dengan KPKNL Serang.



Foto 3 *Sharing Session Lelang Versi 2 dengan KPKNL Serang, 9 Desember 2024*

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain.

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja setiap bulan;
2. Melakukan verifikasi data realisasi PNBPN yang bersumber dari OMSPAN dan SLDK;
3. Mengadakan sosialisasi terkait peran Pengelola Barang dalam optimalisasi BMN;
4. Mengupayakan agar pelaksanaan tindak lanjut BMN dengan kondisi Rusak Berat (RB) untuk segera dilaksanakan dengan penjualan oleh Pengguna Barang/Satker;
5. Berkoordinasi dengan K/L dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
6. Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;
7. Melakukan pendampingan kepada Pengguna Barang dalam pemenuhan kelengkapan data/dokumen persyaratan untuk usulan ke Pengelola Barang;
8. Penggalan Potensi PNBPN pada satker-satker potensial;
9. Penggalan potensi lelang kepada stakeholder;

10. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
11. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum;
12. Capacity building SDM di bidang lelang;
13. Sosialisasi di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang;
14. Meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi dengan satker khususnya satker dengan potensi PNBPN tinggi.

b. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Dalam hal ini, dilakukan survei kepada seluruh pejabat/pegawai dan sampling pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

1. Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
2. Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Penilaian dilakukan dengan menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei terhadap ASN Kemenkeu dan para pengguna layanan melalui platform survei KPK. Atas hasil survei yang diterima, kemudian diperdalam melalui FGD untuk mengkonfirmasi hasil survei.. Selanjutnya, data primer menjadi penyusun indeks integritas yang disesuaikan dengan faktor koreksi dan apresiasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Faktor koreksi dijadikan faktor pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder seperti informasi kejadian OTT (Operasi Tangkap Tangan), hasil audit investigasi, informasi dari APH (Aparat Penegak Hukum), dan pengondisian survei. Sementara apresiasi dijadikan sebagai faktor penambah besaran indeks melalui penilaian atas realisasi rencana aksi

perbaikan hasil SPI periode sebelumnya dan kegiatan pencegahan korupsi pada unit eselon I. Penilaian persepsi integritas dilakukan pada triwulan III sampai dengan IV tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember. Unit yang dilakukan pengukuran adalah unit sampel dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Penentuan sampel disepakati bersama oleh tim survei dengan Unit Kepatuhan Internal tiap-tiap unit eselon I yang bersangkutan. Dari setiap unit sampel ditentukan responden internal (pegawai yang bekerja di unit sampel dengan status PNS dan/atau non-PNS) dan responden eksternal (pengguna layanan di setiap unit sampel seperti masyarakat, K/L lain, atau unit eselon I lain di Kemenkeu). Pengambilan data dilakukan oleh KPK melalui pihak ketiga (PT Frontier Internasional Indonesia). Metode penyebaran kuesioner dilakukan melalui penyebaran tautan kuesioner melalui whatsapp blast dan e-mail blast terhadap para responden pada unit sampel.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (*Proportional Stratified Random Sampling*) dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

1. Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
2. Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
3. Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
4. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
5. Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Realisasi atas IKU ini diukur melalui formulasi yaitu : Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi).

Berikut adalah trajectory Indeks integritas tahun 2024:

Tabel 10 *Capaian Trajectory Indikator Kinerja Indeks Integritas*

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan								
1b-CP : Indeks integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	Max /
Realisasi	10	20	20	42	42	92,44	92,44	TLK
Capaian	100	100	100	140	140	103,67	103,67	
Nilai Kinerja	100	100	100	120	120	103,67	103,67	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Integritas, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Menyampaikan informasi pelaksanaan *Focus Group Discussion*;
2. Permintaan partisipasi untuk mengikuti survey SPI;
3. Edukasi Publik mengusung tema Integritas setiap triwulan;
4. Sebagai upaya pencegahan korupsi, seluruh unit kerja di lingkungan DJKN telah melaksanakan rangkaian aksi pencegahan korupsi secara masif yang dilaksanakan sebagai wujud kolaborasi dan aksi nyata seluruh pejabat dan pegawai di seluruh unit DJKN. Adapun rincian materi sosialisasi antikorupsi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi kepada pihak internal DJKN dengan materi Hasil Survei Penilaian Integritas, Kerangka Kerja Integritas, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* (WISE) serta Perlindungan Pelapor yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja sebagai narasumber utama;
 - b. Sosialisasi kepada pihak eksternal (mitra kerja, pengguna layanan, dan pelaku usaha/rekanan) dengan judul “Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya

Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan” yang disampaikan oleh Kepala Unit Kerja sebagai narasumber utama. Adapun materi sosialisasi ini terdiri dari materi terkait Gratifikasi dan *Whistleblowing System* serta Perlindungan Pelapor;



Foto 4 *Jalan Sehat dan Sosialisasi Antigratifikasi*



Foto 5 *Sosialisasi Antigratifikasi kepada Satuan Kerja d lingkungan KPKNL Bandar Lampung*

- c. Kegiatan *integrity sharing* berupa dialog secara formal/informal yang dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja kepada pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional setara 1 s.d. 2 tingkat di bawahnya dengan tema dan metode *integrity sharing*; dan



Foto 6 *Integrity Sharing* oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung

- d. Amplifikasi konten media sosial berupa konten terkait “Tolak dan Laporkan Gratifikasi” dan Saluran Pengaduan WISE pada seluruh saluran komunikasi yang dimiliki oleh unit kerja.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 11 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Integritas*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	7,992,000	7,582,000	Telah dilaksanakan sosialisasi terkait pengendalian internal (Pengendalian Gratifikasi, <i>Whistle Blowing System</i>)

				kepada satker KPKNL Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2024 juga dilaksanakan observasi atau pengamatan terhadap proses bisnis pada KPKNL Bandar Lampung
2	Komunikasi Publik	43,500,000	37,781,300	Telah dilaksanakan Edukasi Publik setiap triwulan menyisipkan tema Integritas

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi, ditunjukkan dengan realisasi sebesar 94,87% dibandingkan dengan pagu 2024 (terjadi penghematan sebesar Rp409.800,00). Selain itu, Sumber Daya Manusia Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari 3 (tiga) orang termasuk kepala seksi.

IKU Indeks Integritas merupakan IKU yang memiliki realisasi nasional, yang berarti seluruh kantor vertikal DJKN memiliki realisasi yang sama yaitu 92,44. Namun demikian, KPKNL Bandar Lampung berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa. Untuk tahun 2020 s.d. 2022, indeks integritas tidak menjadi salah satu indikator kinerja KPKNL Bandar Lampung.

Berikut adalah data perbandingan antara capaian selama 2020 s.d. 2024.

Tabel 12 *Alignment, Perjanjian Kerja, Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 1b-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89,17	92,0	92,0	92,0	-	92,44

2023	88,67	91.5	91.5	91	-	89,17
2022	-	-	91	-	-	-
2021	-	-	90,5	-	-	-
2020	-	-	90	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

IKU ini digunakan sejak tahun 2023. Capaian IKU Indeks Integritas Tahun 2024 (103,67) naik dibandingkan tahun 2023 (100,56). Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh puasnya pengguna layanan atas kualitas layanan berintegritas yang dirasakannya selama Tahun 2024.

Walaupun demikian, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, misalnya kejadian fraud yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun penilaian/tahun survei, yang berakibat pada pengurangan nilai/indeks integritas, kejadian fraud dimaksud. Kendala teknis lainnya seperti survei yang dikirimkan langsung oleh KPK kepada target survei melalui *whatsapp* maupun melalui surel dan monitoring disampaikan oleh Kantor Pusat DJKN, dalam hal ini KPKNL tidak memiliki *tools* untuk memonitoring secara langsung apakah survei sudah diisi oleh target survei atau belum.

Sehingga upaya memitigasi risiko-nya dengan cara *knowing your employee* yang dilakukan oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung, rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi mingguan melalui acara Morning Call Sai Helau sebagai sarana untuk selalu

memberikan reminder kepada seluruh pegawai mengenai Integritas pada umumnya dan pelaksanaan survey serta kegiatan lain yang terkait.

2. Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,5%	82,84%	115,86%
2.	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,5%	93,20%	107,74%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Indikator Kinerja ini mengukur kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), yang terdiri atas tindak lanjut pengukuran SBSK di tahun-tahun sebelumnya (pengukuran SBSK pertama kali di TA 2020), serta pengukuran SBSK di tahun 2024. Pengukuran SBSK dilakukan terhadap Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran BMN dalam efisiensi anggaran belanja terutama terkait dengan barang modal/BMN (baik

pengadaan maupun pemeliharaan) sekaligus pula mendorong peningkatan penerimaan negara melalui PNBP yang bersumber dari BMN.

Indikator Kinerja ini diperoleh dari dua formula yaitu formula pengukuran (bobot 75%) dan formula optimalisasi (bobot 25%). Formula pengukuran adalah rata-rata tertimbang persentase kesesuaian per jenis objek per Satuan Kerja, sementara formula optimalisasi adalah rata-rata tertimbang persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per per Satuan Kerja. Bentuk optimalisasi adalah penggunaan BMN dan pemanfaatan BMN.

Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang sesuai dengan ketentuan tentunya menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi BMN kepada APBN sekaligus memastikan Barang Milik Negara (BMN) dikelola dan terutilisasi dengan optimal sesuai dengan potensi tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*). Tertib dalam pengelolaan, yaitu dengan penggunaan BMN yang tepat sesuai intensi pengadaannya dan/atau fungsinya serta mencukupi kebutuhan K/L dan satker secara tidak berlebihan. Perlu kita pahami bahwa setiap tahunnya, selalu terdapat usulan pengadaan BMN oleh K/L dengan berbagai argumen dan pertimbangan. Kebutuhan yang diusulkan di antaranya aset tetap barang berupa tanah dan bangunan. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, sesuai amanat PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah sebagian dengan PP 28 Tahun 2020 telah ditetapkan beberapa ketentuan terkait perencanaan kebutuhan BMN berikut dengan pengaturan Standar Kebutuhan dan Standar Barang (SBSK).

Selanjutnya, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan perencanaan kebutuhan dengan penggunaannya setelah diadakan serta pemanfaatan BMN tersebut di kemudian hari perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana amanat PP 27 Tahun 2017 jo PP 28 Tahun 2020 bahwa Pengelola Barang memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN, maka pelaksanaan pengukuran kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dengan menghimpun data BMN yang sedang digunakan langsung oleh satker, penggunaan sementara atau dioperasikan pihak lain, dan juga dimanfaatkan dengan kesesuaian kebijakan merupakan esensi dilakukannya kegiatan pengukuran

tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dilakukan dalam periode 5 tahun yaitu pada 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan pendistribusian target K/L berdasarkan jumlah satker dan BMN.

Pada tahun 2024, terdapat 855 objek SBSK yang tercatat di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Dit Polairud Polda Lampung, LANAL Lampung, Polres Lampung Barat, Polres Lampung Selatan, Polres Pesawaran, Polres Tanggamus, Polresta, Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, Sat Brimob Polda Lampung, SPN Kemiling Polda Lampung, Yanma, PN Kalianda, PA Tanjung Karang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, PA Tanggamus, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, KSOP Kelas I Panjang, Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Lampung, dan Satker BBWS Mesuji Sekampung.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 **Capaian Trajectory Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2024**

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	-	50	50	60	60	71,5	71,5	Max /
Realisasi	-	83,32	83,32	82,83	82,83	82,84	82,84	TLK
Capaian	-	166,64	166,64	138,05	138,05	115,86	115,86	
Nilai Kinerja	-	120,00	120,00	120,00	120,00	115,86	115,86	

Target IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan dan *extra effort* yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pemutakhiran kembali Formulir Pendataan & Perhitungan
2. Pelaksanaan lebih terkoordinasi dengan penyusunan dokumen pendukung antara lain:
 - a. Laporan Bulanan oleh KPKNL dan Laporan Triwulanan oleh Kanwil DJKN;
 - b. Laporan Revisi Target Pengukuran Kesesuaian dan Optimalisasi; dan
 - c. Laporan Review Pelaksanaan kepada PIC Kanwil dan KPKNL.
3. Terdapat tahapan awal yang perlu dilakukan oleh Kanwil DJKN, KPKNL, dan K/L antara lain:
 - a. Verifikasi Target;
 - b. Sosialisasi (Penyebarnyaan Informasi kepada Satker Target);
 - c. Pelaksanaan Pendataan;
 - d. Pelaksanaan Perhitungan;
 - e. Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Tingkat KPKNL;
 - f. Monev oleh Kanwil DJKN;
4. Penyusunan dan Penyampaian Pelaporan Tingkat Kanwil DJKN. Melakukan asistensi pengisian formulir pendataan dengan mengunjungi langsung objek SBSK;
5. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Biro Logistik Polda Lampung;
6. Melakukan Bimbingan Teknis Pengukuran Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK pada 12 (dua belas) Satker POLRI Wilayah Kerja KPKNL Bandar Lampung.



Foto 7 **Bimbingan Teknis Pengukuran Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK Satker POLRI, 21 Maret 2024**

- Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi SBSK secara *one on one* dengan satuan kerja.



Foto 8 **Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi SBSK Polres Tanggamus, 30 Juli 2024**

Dalam mewujudkan kinerja seperti di atas, efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 15 **Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan	32,400,000	31,210,000	Telah dilakukan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaannya dengan SBSK terhadap 855 NUP BMN.

	Standar Kebutuhan (SBSK)			
--	--------------------------------	--	--	--

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara sejumlah 5 (lima) orang pegawai termasuk kepala seksi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 16 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2a-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	71,5	70	70	70	-	82,84
2023	68	65	65	65	-	73,52
2022	65	60	60	60	-	76,29
2021	62	57	57	57	-	78,55
2020	55	55	55	55	-	79,32

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya.

Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam perjalanan untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut ditemukan kendala dan/atau permasalahan antara lain:

1. Perbedaan kemampuan satker dalam pengisian formulir;
2. Pengisian formulir oleh Satker tidak tepat waktu dan tidak lengkap;
3. Perlu dilakukan *review* kembali terkait data dan hasil input pada formulir pendataan dan perhitungan.

Mitigasi risiko yang telah disusun dalam penyelesaian IKU ini antara lain.

1. Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan satker dalam proses pengisian formulir;
2. Melakukan asistensi dan bimbingan teknis kepada satker.

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja pada tahun 2025 rencana aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi formulir pendataan dan perhitungan.
- 2) Berkoordinasi dengan PIC di Direktorat PKN terkait kendala dan informasi lanjutan terkait pendataan dan perhitungan SBSK.
- 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kesesuaian SBSK K/L.
- 4) Melakukan inventarisasi data dukung pengukuran SBSK dari satuan kerja.

b. Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN

Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN merupakan bagian dari pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Pengawasan dan Pengendalian BMN bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pelaksanaan Wasdal BMN salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN khususnya persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang

telah diterbitkan oleh Pengelola Barang periode semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2024. Tindak lanjut yang dilaksanakan dibuktikan dengan dokumentasi tindak lanjut sebagaimana tabel di bawah ini dan terhadap dokumentasi tersebut ditatausahakan oleh KPKNL dan Kanwil DJKN yang menerbitkan persetujuan.

Tabel 17 **Kriteria Persetujuan yang telah dilakukan tindak lanjut**

Kriteria persetujuan yang telah dilakukan tindak lanjut		
Kategori	Jenis Persetujuan	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian Sewa 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala KPKNL
	Kerja Sama Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender
	Pinjam Pakai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah lelang (baik dengan pemenang lelang maupun tidak ada peminat) atau dokumen perjanjian jual/sewa beli

		dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti. 3. pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender
	Hibah	1. Berita acara serah terima

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara Tahun 2024

	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP : Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	-	45	45	60	60	86,5	86,5	Max /

Realisasi	-	68,71	68,71	90,48	90,48	93,20	93,20	TLK
Capaian	-	152,68	152,68	150,79	150,79	107,74	107,74	
Nilai Kinerja	-	120,00	120,00	120,00	120,00	107,74	107,74	

Indikator Kinerja terkait Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN pada Semester I telah tercapai dengan baik. Terdapat 93 total persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode Semester II 2023 (sebelumnya 54 total persetujuan/penetapan pengelolaan BMN) yang ditindaklanjuti oleh K/L dan terdapat 51 persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2024 (sebelumnya 60 jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN).

Berdasarkan data monitoring pelaksanaan IKU, diperoleh persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN tahun 2024 adalah 93,20% dari target yang ditetapkan diawal tahun adalah 86,5%. Persentase tersebut turun 1,98% dari tahun sebelumnya sebesar 95,18%.

Target IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Telah ditetapkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Nomor SE-01/KN/2022 tentang Penggunaan Fitur Perekaman Billing Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara tanggal 22 Juli 2022 yang intinya adalah mendorong KPKNL, Kanwil DJKN, dan Dit. PKKN untuk melakukan Pembinaan Pengelolaan BMN;
2. Monitoring dan evaluasi capaian tindak lanjut Pengelolaan BMN.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 19 **Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan BMN**

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	6,768,000	6,457,000	Telah disusun Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara berupa Laporan Wasdal Pengelolaan BMN

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara memiliki 5 (lima) orang SDM termasuk kepala seksi.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 20 **Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 2b-CP**

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	86,5	-	80	-	-	93,20
2023	86	-	80	-	-	95,18
2022	85	-	75	-	-	93,52
2021	85	-	75	-	-	91,93
2020	80	-	70	-	-	87,35

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Tidak ada *alignment* dengan Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya maupun untuk Standar Nasional, sehingga tidak dibandingkan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu

1. Terdapat pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang tidak dilaporkan kepada Pengelola Barang. Pelaporan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN dilaporkan manual oleh satuan kerja.
2. Kurangnya pengetahuan satuan kerja dalam melaksanakan Pengelolaan BMN khususnya dalam rangka melakukan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN.

Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan untuk permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Kendala tersebut telah dilakukan mitigasi melalui implementasi SIMAN v2 modul Wasdal BMN. SIMAN v2 menjadi sarana dokumentasi pelaksanaan Wasdal BMN yang mana salah satunya adalah monitoring tindak lanjut atas persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.
2. Monitoring atas pelaksanaan persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
3. Koordinasi dengan satker terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Melakukan penguatan pelaksanaan Wasdal BMN sebagaimana ketentuan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN;
2. Implementasi SIMAN v2 dalam pelaksanaan Pengelolaan BMN;
3. Melaksanakan pembinaan Pengelolaan BMN secara intensif kepada satuan kerja; dan
4. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan.

3. Sasaran Strategis : Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal

Sasaran strategis ini merekapitulasi dua Indikator Kinerja yang berkaitan dengan kemampuan pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang hingga dapat laku terjual. Dua hal tersebut dijawantahkan dalam dua Indikator Kinerja Utama yaitu:

Tabel 21 *Capaian Indikator Kinerja pada Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp170,99 M)	124,69% (Rp213,21 M)	124,69%
2.	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (Rp 1 M)	138,95% (1,389 M)	138,95%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. **Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I/JF Pelelang dalam periode tertentu.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan (Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian / (Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian. IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

Adapun trajectory IKU Tingkat Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024 adalah.

Tabel 22 *Trajectory Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024*

Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal

3a-CP : Persentase Realisasi Pokok Lelang

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100 (Rp17,1M)	100 (Rp51,2M)	100 (Rp51,2M)	100 (Rp136M)	100 (Rp136M)	100 (Rp213M)	100 (Rp213M)	Max /
Realisasi	114,55	223,66	223,66	119,2	119,2	124,69	124,69	TLK
Capaian	114,55	223,66	223,66	119,2	119,2	124,69	124,69	
Nilai Kinerja	114,55	120,00	120,00	119,2	119,2	120,00	120,00	

Uraian terhadap capaian pokok lelang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 23 Rincian Target dan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2024

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
Pokok Lelang PL Kelas I/JF Pelelang	Rp130.890.000.000	Rp175.447.136.934	134,04%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp40.100.000.000	Rp37.765.977.300	94,18%
Jumlah Pokok Lelang	Rp170.990.000.000	Rp213.213.114.234	124,69%

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan pelaksanaan lelang barang gadai.
2. Membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan *stakeholder* potensial.
3. Sosialisasi dan edukasi kepada *stakeholder* agar menginventarisir permohonan yang berpotensi laku/*marketable*.



Foto 9 **Sosialisasi Lelang Bersama PNM, 4 Maret 2024**

4. Berkoordinasi dengan perbankan khususnya Perbankan BUMN untuk segera memproses objek lelang yang telah terdata dalam daftar potensi objek lelang yang akan dimohonkan lelang.
5. Penggalian potensi lelang.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 24 **Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pokok Lelang**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Risalah Lelang	20,496,000	16,961,000	Telah dihasilkan 1879 Risalah Lelang.
2	Risalah Lelang Sukarela UMKM	65,119,000	58,100,400	Telah dihasilkan 25 Risalah Lelang UMKM.

3	Penggalian Potensi Lelang	88,750,000	77,724,700	Telah dilaksanakan sejumlah 14 penggalian potensi lelang
---	---------------------------	------------	------------	--

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Pejabat Fungsional Pelelang KPKNL Bandar Lampung sejumlah 2 (dua) Pejabat Fungsional Muda dan 3 (tiga) Pejabat Fungsional Pertama.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 25 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3a-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	100	-	-	124,69
2023	100	-	100	-	-	160,23
2022	100	-	100	-	-	120,80
2021	100	-	100	-	-	120,82
2020	100	-	100	-	-	71,28

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian

Keuangan di setiap tahunnya maupun untuk Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan.

Pada dasarnya, tidak ada kendala/ permasalahan namun karena di tahun 2024 adalah masa transisi penggunaan aplikasi lelang versi 2, kendala/ permasalahan yang muncul seputar transisi tersebut.

Mitigasi risiko atas kendala yang dihadapi adalah melakukan sosialisai dan asistensi kepada pengguna layanan lelang terkait aplikasi lelang versi 2.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Penggalian potensi lelang stakeholder;
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
3. MoU dengan stakeholder.

b. Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 (BKPN lama). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

Termasuk di dalamnya apabila terdapat penyelesaian piutang negara melalui *asset debt swap*.

Target penurunan outstanding Piutang Negara pada KPKNL Bandar Lampung adalah sebesar 100% (Rp 1.000.000.000,00) Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi penurunan outstanding piutang negara sebesar 138,95,% (Rp 1.389.541.009,69).

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan berupa :

1. Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar (Dit PKN DJKN, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, Dinas Kelautan Provinsi Lampung untuk membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN;
2. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Pengurusan Piutang KPKNL Bandar Lampung;
3. Melakukan pemetaan BKPN dan penentuan prioritas tindak lanjut pengurusan piutang;
4. Adanya *Crash* Program Keringanan Utang di tahun 2024 menyebabkan banyak debitur menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pelunasan utang;
5. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, serta PSBDT (terutama yang bernilai dibawah Rp8.000.000,00 karena tidak memerlukan survei lapangan);
6. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka pemetaan debitur yang perlu ditindaklanjuti pengurusan piutangnya.

Adapun *trajectory* selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 **Capaian Trajectory Indikator Kinerja Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara**

	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
	3b-CP : Persentase penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP

Target	100 (Rp100jt)	100 (Rp300jt)	100 (Rp300jt)	100 (Rp600jt)	100 (Rp600jt)	100 (Rp1,38M)	100 (Rp1,38M)	Max /
Realisasi	236,49	139,95	139,95	160,03	160,03	138,95	138,95	TLK
Capaian	236,49	139,95	139,95	160,03	160,03	138,95	138,95	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Meningkatkan keterlibatan penyerah piutang dalam proses penagihan piutang. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 27 **Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	37,071,000	31,023,000	Telah dihasilkan 64 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara.
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1,760,000	699,000	651 surat himbuan

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Seksi Piutang Negara memiliki 4 (empat) orang SDM termasuk kepala seksi.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2021 dan 2024.

Tabel 28 **Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara Tahun 2021 s.d. 2024**

2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100% (Rp0,35 M)	259,95% (Rp0,93 M)	100% (Rp0,45 M)	109,81% (Rp0,49 M)	100% (Rp2,8 M)	143,25% (Rp4,01 M)	100% (Rp1 M)	138,95% (Rp1,38M)

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 29 **Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 3b-CP**

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	138,95
2023	100	-	-	-	-	143,25
2022	100	-	-	-	-	109,81
2021	100	-	-	-	-	259,95
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, tidak ada proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, serta

tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU digunakan sejak tahun 2021.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian:

1. Masih ada Penanggung Utang/ Debitur yang tidak beritikad untuk menyelesaikan piutang negara;
2. Piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan atau ada barang jaminan namun tidak *marketable*/belum *clear* secara hukum;
3. Terbatasnya SDM dan anggaran pada K/L.
4. Kurangnya perhatian K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Piutang, sehingga terhadap piutang yang telah diserahkan kepada PUPN relatif ditindaklanjuti secara pasif.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Pelaksanaan Penetapan Target Bidad Piutang Negara Tahun 2024;
2. Sosialisasi PMK NOMOR 30/PMK.06/2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2024;
3. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara KPKNL dengan penyerah piutang secara berkala;



Foto 10 **Rekonsiliasi Piutang Negara dengan KSOP Panjang, 25 April 2024**

4. Melakukan monitoring BKPN pada aplikasi FocusPN.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada KPKNL Bandar Lampung;
2. Percepatan pengurusan piutang dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Koordinasi dengan penyerah piutang baik Kementerian Negara/Lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka kerja sama dalam proses penagihan piutang negara.
4. Mendorong pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan sebagai upaya penyelesaian BKPN atas debitur yang tidak melunasi utangnya;
5. Mengoptimalkan fasilitas *SLIK OJK* pada aplikasi Focus PN guna mendorong kesadaran penyelesaian utang oleh debitur.

4. Sasaran Strategis : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain.

Tabel 30 **Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien**

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	90,02	120,03%

a. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e. Objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Penilaian secara tepat waktu adalah:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N).

Terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a. penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b. penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c. penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f. penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis

Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya:

- a. untuk objek penilaian tanah dan/ atau bangunan yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja. (Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 (17 + 2*3) hari terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. *Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku."

Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien sebesar 90,02 dari target Indikator Kinerja maximize sebesar 75% sehingga indeks capaian tahunan sebesar 120,03%.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Rata-rata Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien								
4a-CP : Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max /
Realisasi	97,63	93,5	93,5	90,32	90,32	90,02	90,02	TLK

Capaian	130,17	124,67	124,67	120,43	120,43	120,03	120,03	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Kegiatan dan *extra effort* yang dilaksanakan sehingga IKU bisa tercapai, seperti:

1. Penyusunan sumber daya penilai secara baik, efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kegiatan penilaian merupakan kunci utama dalam penyelesaian layanan penilaian secara tepat waktu;
2. Keterlibatan Penilai Pemerintah non Jafung dan pegawai yang dianggap cakap untuk melakukan penilaian dalam membantu proses penilaian masih dibutuhkan guna percepatan penyelesaian layanan penilaian; dan
3. Selain itu, pembagian tugas dalam tim dan kedisiplinan tim penilai untuk menyelesaikan rangkaian proses penilaian juga sangat menentukan dalam rangka penyelesaian layanan penilaian secara tepat waktu.



Foto 11 *Proses Penilaian Sewa ATM Liwa, 5 November 2024*

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 32 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Penilaian	10,800,000	8,610,000	Daftar Komponen Penilaian Bangunan dan Daftar Komponen Penilaian Sewa
2	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	80,760,000	75,354,200	Telah dihasilkan 276 Laporan Penilaian

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi penilaian sejumlah 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Penilai Muda dan 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Penilai Pertama.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 33 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 4a-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	89,72

2023	100	-	-	-	-	96,5
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, tidak ditemukan adanya proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya hingga standar narasi nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Kendala dan Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kinerja:

1. *Load* permohonan penilaian yang masuk dalam jumlah banyak dalam waktu bersamaan, diperlukan strategi yang tepat dalam pengaturan sumber daya penilai yang akan melaksanakan penilaian, mengingat keterbatasan jumlah penilai yang tersedia di KPKNL Bandar Lampung.
2. Selain itu, kendala lain juga muncul ketika penilaian harus dilaksanakan dan diketuai oleh Jafung, sehingga keterlibatan Penilai Pemerintah non Jafung kurang optimal dalam hal permohonan dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang bersamaan.

Mitigasi Risiko, sebagai berikut.

1. Menyusun sumber daya penilai secara baik, efektif dan efisien untuk melaksanakan layanan penilaian atas permohonan yang masuk guna menjaga SOP layanan agar tetap berjalan baik dan tepat waktu.
2. Permohonan bantuan tenaga penilai ke Kanwil untuk membantu melaksanakan penyelesaian layanan penilaian dalam hal permohonan masuk dalam jumlah banyak dalam waktu yang bersamaan.

Rencana Aksi berikutnya, adalah:

1. Melakukan verifikasi permohonan penilaian yang masuk dan segera menyusun jadwal pelaksanaan penilaian;
2. Pemberdayaan Penilai Pemerintah non Jafung atau pegawai yang dianggap cakap untuk melaksanakan penilaian dalam rangka membantu penyelesaian layanan penilaian secara tepat waktu;
3. Mengajukan permohonan bantuan tenaga Penilai ke Kanwil untuk turut membantu penyelesaian layanan penilaian dalam hal permohonan masuk dalam jumlah banyak dalam waktu yang bersamaan.

5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) Perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) Pengurusan piutang negara; dan
- 3) Pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNPB (*revenue generating*);
- 3) Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

Tabel 34 **Capaian Indikator Kinerja pada Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
--------------------------	---------------	------------------	----------------

1.	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100% (581)	103,10% (599)	103,10%
2.	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	100% (34 dan 9)	121,05% (42 dan 10)	121,05%
2.	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	100	120%

a. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang Disertipikatkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud maka juga diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2024 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

1. Kelompok 1/K1 (*clean & clear*): dengan *output* Sertipikat Hak Atas Tanah;
2. Kelompok 2/K2 (*not clean but clear*): dengan *output* Peta Bidang Tanah (PBT);
3. Kelompok 3/K3 (*clean but not clear/not clean & not clear*): dengan *output* Peta Tematik/Produk Lainnya/BA Pemeriksaan Fisik dan/atau data Yuridis;
4. Kelompok 4/K4: dengan *output* updating data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Valserah

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan;

- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan;
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran Indikator Kinerja tahun 2024 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Tabel 35 **Pembagian Kendali Program Sertifikasi BMN**

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertifikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertifikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertifikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Indikator Kinerja ini mengukur Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah guna melaksanakan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan Tahun 2024*

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif								
8b-N : Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	-	40	40	60	60	100	100	Max /
Realisasi	-	41,14	41,14	99,83	99,83	103,10	103,10	TLK
Capaian	-	102,84	102,84	166,38	166,38	103,10	103,10	
Nilai Kinerja	-	102,84	102,84	120,00	120,00	103,10	103,10	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain:

1. Menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dan solid antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN;
2. Melakukan beberapa penyesuaian juga dilakukan untuk percepatan dan efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah baik pada diantaranya klusterisasi objek target berdasarkan status tanah serta *outputnya* (K1-K2-K3-K4), serta pendaftaran akun aplikasi mitra instansi pemerintah baik untuk *user* satuan kerja/KL maupun pengelola barang sebagai langkah persiapan digitalisasi proses pensertipikatan tanah di mana kedepannya sertipikat tanah akan berbentuk elektronik.

- Melakukan koordinasi yang intensif dengan Satker dalam rangka percepatan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan.



Foto 12 *Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi, 19 Desember 2024*

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 37 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	27,720,000	23,955,400	Telah dilaksanakan program pensertipikatan BMN berupa tanah dengan capaian sertipikat tercapai sebanyak 599 NUP

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara ada 5 (lima) orang termasuk Kepala Seksi.

Target dan realisasi capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami *trend* peningkatan. Hal tersebut tentunya didorong dengan perbaikan *database* BMN berupa tanah pada Master Aset SIMAN dengan dilakukannya verifikasi dan identifikasi serta validasi data menggunakan *tools* Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah) dan monitoring dengan *tools* Monitoring Sertifikasi Tanah (Monserah).

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 s.d 2024.

Tabel 38 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5a-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	100	-	-	103,10
2023	100	-	100	-	-	124,05
2022	100	-	100	-	-	194,93
2021	100	-	100	-	-	122,29
2020	100	-	100	-	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Namun untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan dan untuk Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

Pada dasarnya, target tercapai tidak ada kendala/ permasalahan yang berarti. Namun dalam prosesnya, pada saat pengumpulan dokumen persyaratan permohonan pensertipikatan memiliki banyak tantangan, penguasaan bidang tanah oleh pihak lain/pihak ketiga, bidang tanah bersengketa maupun berperkara, serta beberapa kendala penyediaan anggaran pendampingan pada satker/KL maupun anggaran pelaksanaan pada Kementerian ATR/BPN.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun untuk pencapaian IKU ini antara lain.

1. Rapat persiapan program percepatan pensertipikatan BMN berupa Tanah;
2. Melakukan koordinasi secara intens antara pengelola barang, pengguna barang, dan Kementerian ATR/BPN.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Menyampaikan nota dinas kepada Kanwil DJKN agar Kanwil DJKN menyampaikan target sertifikasi kepada Kanwil DJKN dan memastikan tersedianya DIPA pelaksanaan pensertipikatan TA 2024;

1. Bersurat kepada seluruh KL untuk penyampaian target, meminta dukungan DIPA, SDM, dan melengkapi dokumen pensertipikatan;
2. Koordinasi intensif dengan satuan kerja dengan target terbesar agar bidang tanah yg clean and clear sebagai hasil identifikasi dapat dituntaskan, dengan dukungan antara lain berupa: penyediaan DIPA dan SDM serta melengkapi dokumen persyaratan pensertipikatan;

b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN, maka ditetapkanlah KMK Nomor 349/KM.0/2018 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN. Pelaksanaan evaluasi kinerja BMN diterapkan ketika Kementerian/Lembaga membutuhkan informasi tentang bagaimana portofolio BMN mereka berkinerja, khususnya untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan pengelolaan BMN terkait:

1. Perencanaan aset strategis untuk memenuhi kebutuhan seluruh entitas pemerintah pusat/Kementerian/Lembaga;
2. Keputusan perencanaan sebelum pengadaan dan investasi, termasuk dalam proses penyusunan dokumen penganggaran khususnya alternatif pendanaan/pembiayaan aset;
3. Keputusan penghapusan dan rasionalisasi aset;
4. Keputusan penggantian/pengadaan baru;
5. Keputusan pemeliharaan, renovasi, restorasi dan *everhaul* aset; dan/atau
6. Benchmarking kinerja aset dan perbaikan terus-menerus.

Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait aset *performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*). Indikator Kinerja Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN merupakan Indikator Kinerja yang muncul sejak Tahun 2020.

Rekomendasi Hasil Evaluasi kinerja BMN (portofolio) di KPKNL Bandar Lampung difokuskan pada satuan kerja yaitu Kantor SAR Lampung, BNN Kab. Lampung Selatan, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Stasiun Meteorologi Lampung, Balmon Spektrum Frekuensi Radio Lampung, Kantah Kab. Pringsewu, Kantah Kab. Pesawaran, Kejari Lampung Selatan, Kantah Kab. Tanggamus, dan BAPAS Pringsewu, sejumlah 42 Rekomendasi dari target 34 Sedangkan untuk Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti sejumlah 10 dari target 9.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 **Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif								
5b-CP : Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	10	32	32	80	80	100	100	Max /
Realisasi	18,82	37,39	37,39	102,48	102,48	121,05	121,05	TLK
Capaian	188,24	116,83	116,83	128,10	128,10	121,05	121,05	
Nilai Kinerja	120,00	116,83	116,83	120,00	120,00	120,00	120,00	

Upaya dan extra effort yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi satuan kerja terpilih yang menjadi objek evaluasi kinerja BMN.
2. Koordinasi dengan satuan kerja terpilih agar evaluasi BMN dapat dilaksanakan secara efektif.



Foto 13 Asistensi Evaluasi Kinerja BMN pada Kejari Kab. Lampung Selatan, 16 Juli 2024



Foto 14 Asistensi Evaluasi Kinerja BMN pada BPKP Provinsi Lampung, 7 September 2024

- Mengupayakan koordinasi via media elektronik dengan PIC satuan kerja terkait, untuk melakukan crosscheck atas tambahan informasi yang dibutuhkan misalnya mencantumkan kondisi fisik dalam bentuk foto atau video objek evaluasi kinerja BMN.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 40 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	21,915,000	18,493,900	Evaluasi dan rekomendasi kinerja BMN sejumlah 42 dan 10 yang ditindaklanjuti

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara ada 5 (lima) orang termasuk Kepala Seksi.

Perbandingan Capaian Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) KPKNL Bandar Lampung dari tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) Tahun 2020 s.d. 2024

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Evaluasi Kinerja					50	58	30	48	34	42
Rekomendasi	96	172	158	163	385	385	7	7	9	10

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 s.d 2024.

Tabel 42 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5b-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	100	-	-	121,05
2023	100	-	100	-	-	148,00
2022	100	-	100	-	-	108
2021	100	-	100	-	-	103,16
2020	100	-	100	-	-	179,17

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Namun untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya serta untuk Standar Nasional, tidak ada narasi yang dapat dibandingkan.

Pada dasarnya, tidak ada kendala dan/atau permasalahan yang berarti karena pekerjaannya dominan berada di KPKNL Bandar Lampung. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi teknis fisik, keberadaan dengan sekitar lingkungan sekitar obyek yang akan dievaluasi kinerja BMN-nya. Hal ini untuk dapat mengetahui potensi penggunaan masa depannya. Hal ini sudah dimitigasi dengan mendatangi seluruh obyek yang akan dievaluasi kerjanya. Rencana Aksi untuk tahun berikutnya adalah melakukan identifikasi

c. Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle

Salah satu indikasi pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*). Namun terkadang, beberapa satuan kerja melaporkan adanya BMN yang tidak ter-utilisasi dengan baik. BMN idle tersebut dicatat oleh Pengelola Barang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara / Lembaga dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2024 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara Idle. KPKNL Bandar Lampung mengelola 3 (tiga) NUP BMN Idle dimana 1 (satu) NUP berada di Bandar Lampung dan 2 (dua) NUP di Kabupaten Lampung Selatan dengan taksiran nilai sebesar Rp5.436.959.000.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja pada Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle*

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif								
5c-N : Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	25	55	55	70	70	100	100	Max /
Realisasi	25	55	55	100	100	100	100	TLK
Capaian	100	100	100	142,86	142,86	120	120	
Nilai Kinerja	100	100	100	120,00	120,00	120	120	

Upaya dan extra effort yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Inventarisasi BMN di satuan kerja yang terindikasi BMN Idle;
2. Melakukan inventarisasi data BMN Idle yang perlu dilaporkan secara berkala;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas BMN Idle dengan atau tanpa Direktorat PKKN;
4. Survey rencana penggalan potensi dengan tujuan optimalisasi BMN Idle.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 44 Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Pengamanan dan Inventarisasi BMN Idle	12,008,000	11,332,000	3 (tiga) BMN Idle yang dikelola

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara ada 5 (lima) orang termasuk Kepala Seksi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 s.d 2024.

Tabel 45 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 5c-N*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, IKU Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle baru ditetapkan di Perjanjian Kerja sejak tahun 2024. Pun tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya serta untuk Standar Nasional, sehingga tidak ada yang dapat dibandingkan. IKU digunakan sejak tahun 2024.

Kendala dan/atau permasalahan yang dihadapi:

1. Untuk BMN Idle di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung, belum dilakukan optimalisasi, pengamanan kurang dan dikuasai pihak yang tidak berhak.



Foto 15 **Monitoring dan Evaluasi BMN Idle Kota Bandar Lampung**

2. Untuk BMN Idle di Kalianda, Lampung Selatan, belum dilakukan optimalisasi, pengamanan kurang, serta bangunan yang kondisinya sudah rusak berat.



Foto 16 **Monitoring dan Evaluasi BMN Idle Kabupaten Lampung Selatan**

Dalam rangka memitigasi risiko dari kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BMN Idle dilakukan upaya pemasangan plang serta monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka meningkatkan pengamanan.

Rencana Aksi untuk tahun berikutnya adalah perlunya penganggaran untuk upaya pengamanan lebih lanjut.

6. Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, selain Barang Milik Negara, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Bandar Lampung mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 46 *Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	88% (281)	80,06% (257)	108,54%
2.	Persentase Produktivitas Lelang	89%	120%	134,83%

Uraian mengenai kedua Indikator Kinerja tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN yang dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusannya, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah.

Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN yang telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda diukur dengan penjumlahan:

- 1) BKPN Lunas (SPPNL);
- 2) BKPN Penarikan (SPPNS);

- 3) BKPN Dikembalikan (SKPPN);
- 4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
- 5) Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 6) BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;

BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN). Persentase saldo BKPN ditunjukkan melalui hasil akhir saldo BKPN yang lebih kecil dibandingkan saldo BKPN di awal tahun 2024. Persentase saldo berkas kasus piutang negara dihitung dengan polarisasi *minimize* dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Target saldo BKPN} = \frac{\text{Saldo Akhir Periode Berjalan}}{\text{Saldo Awal Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi saldo BKPN} = \frac{\text{Saldo Akhir Periode Berjalan}}{\text{Saldo Awal Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \left(\left(1 - \frac{\% \text{ Realisasi Saldo BKPN}}{\% \text{ Target Saldo BKPN}} \right) \times 100\% \right)$$

Target Persentase Penyelesaian BKPN adalah sebesar 89% (Saldo akhir 281 BKPN). Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi penyelesaian BKPN sebesar 64 BKPN sehingga saldo akhir berdasarkan update pada Focus PN sebanyak 257 BKPN atau sebesar 108,54%).

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 **Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Saldo BKPN Tahun 2024**

	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
	6a-CP : Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	99 (318 BKPN)	97 (311 BKPN)	97 (311 BKPN)	93 (299 BKPN)	93 (299 BKPN)	89 (281 BKPN)	89 (281 BKPN)	Max /
Realisasi	98,13	94,7	94,7	87,5	87,5	80,06	80,06	TLK
Capaian	89,74	93,60	93,60	101,69	101,69	108,54	108,54	
Nilai Kinerja	89,74	93,60	93,60	101,69	101,69	108,54	108,54	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan antara lain Koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN, Kementerian komunikasi dan informasi, serta Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung) guna membahas strategi dan permasalahan penyelesaian piutang yang diurus PUPN serta dalam rangka melaksanakan penagihan bersama.

Target IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Pengurusan Piutang KPKNL Bandar Lampung;
2. Melakukan pemetaan BKPN dan penentuan prioritas tindak lanjut pengurusan piutang
3. Adanya *Crash Program* Keringanan Utang di tahun 2024 menyebabkan banyak debitur menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pelunasan utang.
4. Melaksanakan pengurusan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) berupa Angsuran, Penarikan/Pengembalian, serta PSBDT (terutama yang bernilai dibawah Rp8.000.000,00 karena tidak memerlukan survey lapangan).

5. Koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka pemetaan debitur yang perlu ditindaklanjuti pengurusan piutangnya.



Foto 17 *Koordinasi PUPN Cabang Bandar Lampung, 24 Juli 2024*

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemberitahuan kepada debitur dan melakukan pemanggilan debitur.
2. Sosialisasi Program Keringanan Hutang (*Crash Program*) kepada Debitur yang memenuhi kriteria baik melalui korespondensi maupun tatap muka.
3. Koordinasi yang lebih intensif dengan debitur.
4. Optimalisasi tahapan pengurusan piutang negara melalui intensifikasi dan penelitian lapangan terhadap masing-masing penanggung hutang.
5. Mencari informasi keberadaan penanggung hutang melalui aparat kelurahan/desa setempat.
6. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka penagihan baik bersama maupun tanpa didampingi oleh penyerah piutang.
7. Melakukan kunjungan lapangan terkait pemberitahuan Surat Paksa.

8. Pembuatan PSBDT dengan nilai nominal di bawah 9 juta dan umur BKPN sudah cukup lama. Serta ditunjang dengan Surat Keterangan dari penyerah piutang ataupun surat keterangan yang dibuat oleh aparat setempat (kelurahan/desa).

Tabel 48 **Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	37,071,000	31,023,000	Telah dihasilkan 64 berkas pengurusan/pengelolaan Piutang Negara.
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1,760,000	699,000	651 surat himbauan

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia di Seksi Piutang Negara ada 4 (empat) orang termasuk Kepala Seksi.

Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 49 **Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Saldo BKPN tahun 2020 s.d. 2024**

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	101,21%	100%	108,72%	100%	124,24%	100%	104,29%	88%	80,06%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 50 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6a-CP*

TAHUN	TARGET					
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89	-	100	-	-	80,06
2023	100	-	100	-	-	117,76
2022	100	-	100	-	-	125,02
2021	100	-	100	-	-	122,45
2020	100	-	100	-	-	101,21

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya serta untuk Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan.

Isu dan akar permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja **Persentase efektivitas penyelesaian BKPN** (Berkas Kasus Piutang Negara) antara lain:

1. Umur piutang sudah lama.
2. Tidak didukung barang jaminan.
3. Keberadaan debitur tidak diketahui.
4. Dokumen pendukung tidak lengkap.
5. Penolakan pembayaran oleh debitur Karena merasa tidak memiliki hutang.

6. Lokasi debitur jauh dari perbankan sehingga terkendala untuk melakukan penyetoran.

Kemudian untuk pelaksanaan IKU Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Penanggung Utang tidak memiliki kesepahaman maupun tidak mengakui akan adanya kewajiban kepada negara,
2. Rendahnya itikad debitur untuk menyelesaikan piutang negara,
3. Kurangnya perhatian K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Piutang, sehingga terhadap piutang yang telah diserahkan kepada PUPN relatif ditindaklanjuti secara pasif,
4. Piutang negara yang diserahkan kepada PUPN tidak memiliki barang jaminan, atau ada barang jaminan namun tidak marketable/belum clear secara hukum, dan
5. Terbatasnya SDM dan anggaran pengelolaan piutang pada K/L dan/atau pemerintah daerah.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Pelaksanaan Penetapan Target Biad Piutang Negara Tahun 2024;
2. Sosialisasi PMK NOMOR 30/PMK.06/2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN TA 2024;
3. Rekonsiliasi Pencatatan Piutang Negara KPKNL dengan penyerah piutang secara semesteran;
4. Melakukan monitoring BKPN pada aplikasi FocusPN.
5. Meningkatkan keterlibatan penyerah piutang dalam proses penagihan piutang.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja pada KPKNL Bandar Lampung;
2. Percepatan pengurusan piutang dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

3. Koordinasi dengan penyerah piutang baik Kementerian Negara/Lembaga maupun pemerintah daerah dalam rangka kerja sama dalam proses penagihan piutang negara.
4. Mendorong pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan sebagai upaya penyelesaian BKPN atas debitur yang tidak melunasi utangnya;
5. Mengoptimalkan fasilitas *SLIK OJK* pada aplikasi Focus PN guna mendorong kesadaran penyelesaian utang oleh debitur.

b. Persentase Produktivitas Lelang

Tujuan dari sub-IKU ini adalah agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi lelang dengan formula :

$$\left(\left(\frac{\sum \left(\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right)}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \times 60\% \right) \right)$$

Rincian target persentase lot laku lelang berdasarkan jenis lelang adalah sebagai berikut : 1) lelang noneksekusi sukarela : 75%, 2) lelang noneksekusi wajib : 55%, 3) lelang eksekusi HT : 5%, 3) lelang eksekusi selain HT : 25%.

Realisasi produktivitas lelang sampai dengan Desember 2023 sebesar 105%, dimana realisasi indeks laku lot lelang per jenis lelang tercapai 105% dan realisasi frekuensi lelang sebesar 105%.

Adapun trajectory IKU Produktivitas lelang tahun 2024 adalah.

Tabel 51 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Saldo BKPN Tahun 2024*

6 Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif								
6b-CP : Persentase Produktivitas Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	30	45	45	60	60	89	89	Max /
Realisasi	45,69	96.02	96.02	120	120	120	120	TLK
Capaian	152,30	213,38	213,38	200	200	134,83	134,83	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

*Untuk sub-iku menggunakan capaian maksimal 120 untuk proses konsolidasi

Sejalan dengan ketercapaian IKU Produktivitas Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud, antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*;
2. Pelaksanaan rangkaian lelang (Non eksekusi sukarela (UMKM) dan eksekusi Hak Tanggungan) dalam rangka peringatan hari lelang;
3. Mou dan koordinasi intensif dengan Stakeholder lelang;
4. Penggalian Potensi Lelang;
5. Pelaksanaan kompetensi dan inovasi lelang UMKM;
6. Melaksanakan sosialisasi lelang kepada stakeholder.



Foto 18 *Bimbingan Teknis Lelang Versi 2, 26 September 2024*

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 52 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Produktivitas Lelang*

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Risalah Lelang	1,825,832,000	1,638,791,820	Telah dihasilkan 61484 Risalah Lelang.
2	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	3,067,135,000	2,382,095,380	Telah dihasilkan 1748 Risalah Lelang UMKM.
3	Penggalian Potensi Lelang	6,441,385,000	5,555,022,880	Telah dilaksanakan sejumlah 984 penggalian potensi lelang
4	Sosialisasi/ Edukasi di Bidang Lelang	3,896,000	2,090,000	4 Kegiatan Sosialisasi Lelang

Dari tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia yang mendukung pencapaian IKU ini adalah 2 (dua) Pejabat Fungsional Pelelang Muda, 3 (tiga) Pejabat Pelelang Pertama, 1 (satu) pelaksana subbagian umum yang didedikasikan untuk membantu

pelelang, serta seluruh Pegawai yang terlibat aktif dan kegiatan sosialisasi lelang di Tahun 2024.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 53 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 6b-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89	-	34	-	-	120
2023	80	-	34	-	-	105
2022	36	-	34	-	-	36,92
2021	35	-	34	-	-	37,87
2020	34	-	32	-	-	34,31

Sumber: Data Olahan

* terdapat perubahan manual iku

Tahun 2023 dan 2024 memiliki manual IKU yang sama namun untuk Tahun 2020 s.d, 2022 tidak bisa dibandingkan mengingat pada tahun 2023 terdapat perubahan manual IKU dengan memasukkan unsur frekuensi lelang dalam formula Produktivitas. Perubahan formula disebabkan adanya pembahasan pada saat refinement IKU yang diselenggarakan mulai akhir Tahun 2022.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, serta untuk Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan.

Pada dasarnya, tidak terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena IKU ini capaiannya telah memenuhi namun untuk operasional teknis aplikasi lelang versi 2, masih terdapat beberapa kendala teknis.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain :

1. Sosialisasi aplikasi lelang versi 2 kepada pengguna layanan lelang;
2. Monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil DJKN atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*;
3. Pengembangan fitur lelang.go.id;
4. MoU dan koordinasi intensif dengan stakeholder lelang;

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Penggalian potensi lelang stakeholder;
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait lelang;
3. MoU dengan stakeholder perbankan dan penegak hukum.

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain :

1. Rekomendasi Lelang Produk UMKM dan Pemberdayaan UMKM pada Kemenkeu Satu;
2. Memberikan aspek Kemudahan Penggunaan lelang.go.id;
3. Akan memberikan proses permohonan yang lebih sederhana;
4. Intensifikasi promosi melalui berbagai kanal;

5. Inovasi produk UMKM untuk memperluas pasar yang dapat meningkatkan efektivitas dan dukungan jangka panjang bagi pelaku UMKM.

7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

a. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Indikator Kinerja Deviasi ketergunaan hasil penilaian bertujuan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian. Selain itu dasar penilaian adalah hasil survei lapangan sedangkan dasar persetujuan pada umumnya adalah membandingkan nilai usulan dari pemohon dan hasil penilaian. Implikasinya, tujuan pengelolaan BMN untuk menghasilkan nilai wajar belum tercapai.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah

100% dan deviasinya 0%. Apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan). Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Formula perhitungan IKU ini adalah

$$Deviasi = \left[\frac{A - B}{B} \right] \times 100\%$$

A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan perhitungan

B = Nilai yang disampaikan dalam laporan untuk persetujuan

[] = Nilai Mutlak

Sumber data IKU ini adalah Surat Persetujuan/Penolakan Pengelolaan dari KPKNL, dan form rekapitulasi ketergunaan hasil penilaian yang dibuat Direktorat Penilaian.

Sampai dengan triwulan IV 2024, realisasi Indikator Kinerja deviasi ketergunaan hasil penilaian sebesar 0,00% dari target Indikator Kinerja minimize sebesar 16% sehingga indeks capaian tahunan sebesar 120%.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 54 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian Tahun 2024*

Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
7a-CP : Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	16	16	16	16	16	16	16	Min /
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0	AVG
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Target IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian berhasil dicapai dengan baik karena dilakukan beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan penilaian secara akuntabel dengan didukung pengendalian kualitas hasil penilaian melalui kegiatan kendali mutu laporan penilaian;
2. Sinergi antara Tim Penilai dan Pengelola BMN dalam rangka memberikan edukasi kepada pemohon/satker terkait taksiran nilai limit yang diajukan pada permohonan persetujuan pengelolaan BMN;
3. Sosialisasi sekaligus memberikan edukasi mengenai Penaksiran BMN kepada Satuan Kerja untuk meminimalisasi deviasi sangat pengajuan Pemindahtanganan/ Penghapusan BMN.



Foto 19 **Sosialisasi SIMAN Versi 2 bertempat di KPPN Liwa, 21 Oktober 2024**

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 55 **Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	80,760,000	75,354,200	Telah dihasilkan 276 Laporan Penilaian, 178 SK PSP dan 120 SK Persetujuan
2	Rekomendasi Hasil Penilaian	10,800,000	8,610,000	Daftar Komponen Penilaian Bangunan dan Daftar Komponen Penilaian Sewa

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia yang menangani IKU ini adalah 1 (satu) Pejabat Fungsional Penilai Muda selaku koordinator dan 2 (dua) Pejabat

Fungsional Penilai Pertama dengan dibantu 1 (satu) pelaksana umum yang membidangi penilaian.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 56 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 7a-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	16	-	26	-	-	0
2023	25	-	27	-	-	0
2022	19	-	28	-	-	0,01
2021	22	-	29	-	-	0
2020	30	-	30	-	-	0

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, serta untuk Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu kepastian capaian deviasi perlu menunggu tindak lanjut/realisasi satker atas surat persetujuan pemindahtanganan/pemanfaatan yang ditetapkan oleh pengelola. Dalam

perkembangannya apabila nilai persetujuan tidak ditindaklanjuti /tidak terealisasi maka tidak diakui sebagai deviasi.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain.

1. Memberikan edukasi kepada pemohon/satker terkait taksiran nilai limit yang diajukan pada permohonan penilaian.
2. Memastikan data/informasi yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Tim Penilai terkait objek penilaian maupun objek pembanding lengkap, update, dan akuntabel
3. Melaksanakan kendali mutu laporan penilaian melalui kegiatan pemaparan konsep laporan penilaian (*peer review*) sebelum finalisasi nilai yang akan disampaikan kepada Pengelola dan segera menyampaikan laporan penilaian yang telah disusun untuk dilakukan kaji ulang oleh Kantor Wilayah.
4. Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat menyampaikan penjelasan kepada Pengelola Barang melalui ekspose laporan penilaian;
5. Peningkatan/penguatan kompetensi bagi penilai pemerintah dengan mengikuti berbagai kegiatan di bidang penilaian, misalnya sosialisasi peraturan, webinar, *Focus Group Discussion*, diklat, *e-learning*, dan kegiatan lainnya terkait penilaian;

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah

1. Sinergi antara Tim Penilai dan Pengelola BMN dalam rangka memberikan edukasi/sosialisasi kepada pemohon/satker terkait nilai taksiran BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor oleh panitia penaksir sebagaimana telah diatur dalam KMK Nomor 375 Tahun 2024.
2. Pelaksanaan penilaian secara akuntabel dengan didukung pengendalian kualitas hasil penilaian melalui kegiatan kendali mutu laporan penilaian.

8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian

Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Selain itu, dibutuhkan dukungan dari Sumber Daya Manusia dengan kualitas yang baik dan adaptif. Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti tidak hanya pelatihan namun juga bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, sharing session, outbond, benchmark, e-learning, mentoring, hingga secondment dan job-shadowing serta bentuk peningkatan kompetensi pegawai lainnya sesuai perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan

Tabel 57 *Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	119	132,22%
2.	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	98,39	115,75%

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Terdapat dua kriteria pengembangan kompetensi pegawai menurut SE-28/MK.1/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Kementerian Keuangan yaitu kegiatan jalur pengembangan klasikal dan non-klasikal. Seluruh pejabat pengawas, pejabat fungsional setara sampai dengan pelaksana diwajibkan melakukan pengembangan kompetensi hingga memenuhi 40 jam pelatihan (JP). Kegiatan pelatihan dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Pengajuan diklat pegawai disesuaikan dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*. Target persentase pengembangan kompetensi pegawai pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung tahun 2024 ditetapkan sebesar 90% dengan Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 40 jamlat dan dapat direalisasikan sebesar 119%.

Tabel 58 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai*

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								
8a-N: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	45	60	60	80	80	90	90	Min /
Realisasi	56,3	81,5	81,5	108,71	108,71	119	119	AVG
Capaian	125,11	135,83	135,83	135,89	135,89	132,22	132,22	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Pengembangan Kompetensi Pegawai, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu :

1. Mengusulkan pegawai yang belum memiliki kompetensi di Seksi/Subbag untuk dipanggil Diklat;
2. Monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara berkala;
3. Penyusunan rencana melalui Individual Development Plan (IDP);
4. Mencatat tambahan rencana karena ada pengembangan kompetensi Mandatory;
5. Mengkomunikasikan secara aktif pemanggilan diklat kepada pegawai;
6. Monitoring triwulanan capaian pengembangan kompetensi seluruh pegawai.

Kegiatan yang membutuhkan alokasi anggaran dalam IKU ini, tidak menggunakan alokasi anggaran di KPKNL Bandar Lampung melainkan anggaran Sekretariat DJKN dan/atau pusdiklat masing-masing. Sedangkan pengembangan kompetensi lainnya, tidak membutuhkan pembebanan biaya. Terdapat 2 (orang) yang dikhususkan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai yaitu Kepala Subbagian umum dan 1 (satu) orang pengelola kinerja pegawai.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 59 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 8a-N*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	90	-	-	-	-	117,23
2023	100	-	-	-	-	120
2022	100	-	-	-	-	120
2021	100	-	-	-	-	120
2020	100	-	-	-	-	120

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya maupun Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan.

Kendala/Permasalahan

1. Pegawai mengajukan pengunduran diri dari pemanggilan diklat yang dijadwalkan Kantor Pusat karena bersamaan dengan Pelaksanaan Dinas Luar Pegawai.
2. Terdapat beberapa pegawai yang tidak mengajukan usulan diklat pada aplikasi diklat.

Mitigasi Resiko

1. Pegawai yang berhalangan mengikuti pemanggilan diklat dihibau mencari pengganti.
2. Menghibau seluruh pegawai untuk mengusulkan diklat pada aplikasi diklat.

Rencana Aksi

1. Memonitoring pemenuhan jamlat pegawai sesuai ketentuan yang berlaku
2. Menghibau pegawai untuk mengajukan usulan diklat pada aplikasi diklat
3. Memonitoring pemenuhan pemanggilan diklat yang dijadwalkan Kantor Pusat.

b. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko digunakan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. IKU dimaksud merupakan suatu sistem penilaian kinerja yang juga merupakan bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan kinerja dilakukan serta untuk menghasilkan perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang, diperlukan reuvisi atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko terbagi atas 3 (tiga) komponen penilaian yaitu:

1. Pengelolaan Kinerja Organisasi

Reviu atas pengelolaan kinerja organisasi dilaksanakan terhadap empat aspek meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

2. Kualitas Manajemen Risiko

Reviu atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

3. Pengelolaan Kinerja Pegawai

Reviu atas pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan terhadap empat aspek meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

Tabel 60 *Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko*

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								
8b-N: Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Min /
Realisasi	85	100	100	100	100	98,39	98,39	AVG
Capaian	100	117,65	117,65	117,65	117,65	115,75	115,75	
Nilai Kinerja	100	117,65	117,65	117,65	117,65	115,75	115,75	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan serta *extra effort* untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan kinerja dan risiko pada 24 Oktober 2024 sesuai dengan undangan nomor UND-115/KNL.0502/2024 yang diikuti oleh seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung.

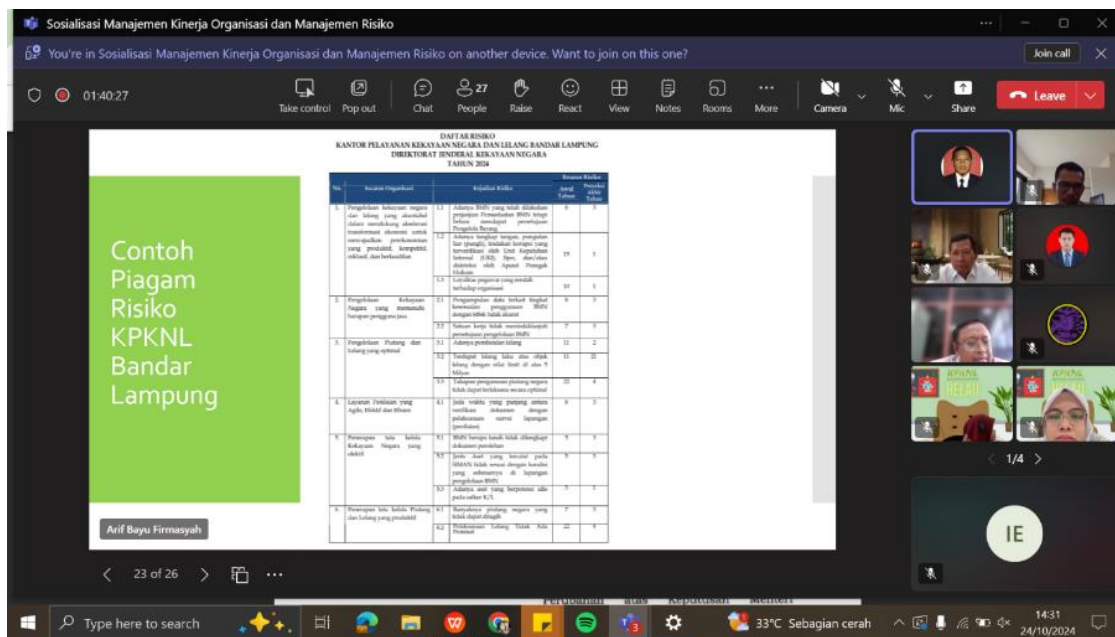


Foto 20 Gambar Sosialisasi Manajemen Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko tahun 2024

2. Melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan pengelola kinerja di Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal.
3. Melakukan asistensi atas permasalahan kinerja pada KPKNL Bandar Lampung.
4. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi dan Dialog Kinerja Individu setiap triwulan.
5. Melaksanakan Rapat Refinement Indikator Kinerja Utama;



Foto 21 **Gambar Sosialisasi Manajemen Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko tahun 2024**

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 61 **Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	7,992,000	7,582,000	Telah dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai kepada seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Sumber Daya Manusia yang ditugaskan dalam pengelolaan kinerja dan risiko adalah 3 (tiga) orang termasuk Kepala Seksi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 62 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 8a-N*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	85	-	-	-	-	98,39
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut IKU ini masuk dalam Perjanjian Kerja mulai tahun 2024 dan tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya serta Standar Nasional, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU dimaksud antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap kinerja;
2. Untuk kinerja terdapat 2 aplikasi yang dipakai yaitu aplikasi e-performance untuk meng-input SKP dan IKI serta HKT dan modul kinerja pada Satu Kemenkeu untuk meng-input Perjanjian Kinerja (PK) Pimpinan Unit dan juga untuk menilai perilaku. Dipakainya dua aplikasi ini tidak praktis dan menimbulkan kebingungan di beberapa pegawai.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun antara lain.

1. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kinerja dan risiko;
2. Meminimalisir terjadinya permasalahan seperti nilai kinerja yang rendah pada pegawai;
3. Melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan pengelola kinerja di Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal.

Rencana aksi yang telah disusun untuk mencapai target IKU ini pada tahun yang akan datang antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kinerja dan risiko kepada seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung;
2. Melakukan asistensi kepada pegawai terkait kinerja;
3. Melakukan koordinasi dengan pengelola kinerja di Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta pengelola kinerja Kantor Pusat.

9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Alokasi anggaran perlu dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu adanya penguatan fungsi pengelolaan keuangan. Selain itu, keuangan

yang akuntabel pun dapat tercermin dari minimnya deviasi data-data keuangan yang terkait misalnya data PNBP.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 63 *Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis : Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Indeks Kinerja anggaran	100%	120%	120%
2.	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%	0%	200%

Penjelasan atas kedua Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut.

a. Indeks Kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan Indikator Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan Indikator Kinerja terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA, yaitu pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020, yang terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Dengan bobot masing-masing indikator tersebut berpedoman pada formula IKPA di OM-SPAN.

Trajectory Indikator Kinerja ini di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 64 **Trajectory Capaian Kinerja Indikator Kinerja Indeks Kinerja Anggaran**

Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel								
9a-CP : Indeks kinerja anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	TLK
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tindakan dan extra effort yang dilaksanakan di KPKNL Bandar Lampung, agar IKU tercapai:

1. Berusaha memenuhi target RPD penyerapan anggaran atau melakukan revisi RPD;
2. Menyusun strategi penyerapan anggaran tiap bulannya guna efisiensi;
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran pada setiap periode.
4. Melaksanakan GUP sesuai dengan ketentuan agar tidak meleset dari RPD setiap bulannya;
5. Memperhatikan data kontrak yang akan disampaikan ke KPPN;
6. Mengisi capaian output setiap awal bulan sesuai dengan realisasi yang telah dilaksanakan oleh setiap seksi.

Sumber Daya Manusia yang melakukan pelaksanaan anggaran terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Ahli Terampil dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama.

Perbandingan capaian Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Bandar Lampung selama 6 tahun dari tahun 2016 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 65 Target dan Realisasi indeks Kinerja Anggaran Tahun 2016 s.d. 2024

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95,5%	95,5%	100%
Realisasi	107%	107%	87%	85%	100%	94,85%	96,24%	106,92%	120%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 66 Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 9a-CP

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	95	95	95	-	120
2023	95.5	95	95	95	-	106,92
2022	95.5	95	95	95	-	96,24
2021	95.5	95	95	95	-	94,85
2020	95	95	95	95	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis

Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Walaupun capaian IKU ini, selalu sempurna, namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya kenaikan sebesar 35% penyerapan anggaran dari Triwulan I ke Triwulan II yang semula 15% pada Triwulan I menjadi 50% pada Triwulan II. Hal tersebut berakibat pada proses perencanaan dan penyerapan yang lebih intens. Namun kendala tersebut tidak mengganggu realisasi capaian. Saat itu, mitigasi risikonya adalah membuat perencanaan yang lebih matang antara subbagian umum, PBJ dengan PPK agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Untuk Tahun Anggaran berikutnya, rencana aksi untuk IKU ini adalah membuat daftar prioritas yang akan dilakukan penyerapan anggaran.

b. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (Pejabat Lelang Kelas II) dan 425782, 425784 (Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
2. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. IKU ini bertujuan untuk penyajian Data PNBP DJKN yang akurat.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 67 *Trajectory Capaian Indikator Kinerja Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Tahun 2024*

Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel								
9b-CP : Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	10	10	10	10	10	10	10	Max /
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0	TLK
Capaian	200	200	200	200	200	200	200	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Isu Utama dalam pencapaian Indikator Kinerja ini adalah guna meminimalisir perbedaan data PNBP Piutang Negara dan Lelang dengan Jumlah PNBP yang sesuai masuk ke kas Negara.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan secara fisik dan digital terhadap Data PNBP yang diperoleh melalui aplikasi FocusPN dan Portal Lelang;
2. Melakukan rekonsiliasi Data PNBP antara FocusPN dan Portal Lelang dengan Setoran PNBP Bendahara Penerima KPKNL Bandar Lampung.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 68 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 9b-CP*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	10%	-	-	-	-	0%
2023	15%	-	-	-	-	0%
2022	10%	-	-	-	-	0,38%
2021	12,5%	-	-	-	-	0%
2020	n/a	-	-	-	-	n/a

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, Rencana Kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya serta untuk Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan.

Dalam perjalanannya, tidak ada kendala dan/atau permasalahan yang perlu diperhatikan. Sehingga tidak ada risiko yang perlu dimitigasi karena keterjadiannya pun hampir tidak terjadi, hal tersebut tercermin dari sangat minimnya deviasi data fungsional DJKN.

10. Komunikasi Publik yang Efektif

Sebagai kantor vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang melaksanakan fungsi pelayanan, KPKNL Bandar Lampung

perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi Kementerian Keuangan kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Tabel 69 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Komunikasi Publik yang Efektif

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Rata-rata indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	80	100	125%

a. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan

Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Tujuan IKU ini yaaitu agar terwujud pengelolaan layanan informasi publik yang tepat waktu.

Informasi Publik adalah Informasi yang sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari:

1. Penetapan Keputusan Kepala KPKNL Bandar Lampung tentang Tim PPID dan Laporan PPID;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala dalam website DJKN, yaitu informasi yang wajib diumumkan atau diubah, meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yaitu informasi yang wajib diumumkan secara spontan, pada saat itu juga mengenai informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja sejak adanya informasi tersebut. Informasi ini diumumkan melalui website DJKN; dan
4. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Waktu penetapan kapan penghitungan dimulai apabila nomor register telah diterbitkan oleh PPID DJKN.

Selama tahun 2024, KPKNL Bandar Lampung menerima 3 (tiga) permohonan informasi publik namun yang dapat ditindaklanjuti hanya 2 (dua) permohonan. Sehingga *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik Tahun 2024

	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
	10a-N : Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max /
Realisasi	100	110	110	112	112	100	100	TLK
Capaian	110	110	110	110,67	110,67	108	108	
Nilai Kinerja	110	110	110	110,67	110,67	108	108	

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Membuat pelaporan PPID sekaligus menetapkan Keputusan Kepala KPKNL Bandar Lampung sebelum tenggat waktu yaitu di akhir tahun 2024;
2. Selalu melakukan update di website DJKN atas Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. Memproses permohonan PPID dengan cepat dan sesuai prosedur, jika permohonan tidak lengkap maka dimintakan kelengkapannya, jika permohonan lengkap maka akan langsung ditindaklanjuti.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 71 **Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik**

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Komunikasi Publik	43,500,000	37,781,300	3 (tiga) permohonan PPID, sosialisasi per triwulan, update social media.

Dari tabel di atas, menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi. Pelaksana PPID terdiri dari 3 (tiga) orang termasuk Kepala Seksi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, IKU PPID baru dijadikan salah satu IKU Peta. Sebelumnya hanya merupakan IKU Non-Peta di Seksi Hukum dan Informasi. IKU tersebut baru mulai di Tahun 2023 dan di Tahun 2024, ada tambahan penjelasan komponen nilai baru.

Tabel 72 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 10a-N*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	80	-	-	-	-	110
2023	70	-	-	-	-	120
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, Rencana Kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya serta untuk Standar Nasional, tidak ada yang dapat dibandingkan.

Pada dasarnya, tidak terdapat kendala yang berarti. Hanya saja pada prosesnya, misalnya ketika ingin melakukan update website, laptop/ komputer harus terhubung dengan LAN Kemenkeu untuk dapat melakukan update. Sedangkan saat itu, jaringan Kemenkeu terkendala. Mitigasi Risikonya adalah dengan melakukan update jauh hari sebelum tenggat waktu. Pun untuk pelaporan PPID dibuat jauh sebelum tenggat waktu. Rencana aksi untuk tahun berikutnya adalah dengan memberikan edukasi kepada petugas APT Virtual untuk dapat memproses permintaan ppid dengan langsung mengisikan dokumen kelengkapan PPID. Selain itu, menambahkan perwakilan dari masing-masing seksi/ rumpun jabatan fungsional dalam penanganan PPID sehingga penanganan permohonan PPID dapat dijalankan dengan lebih baik.

11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 73 *Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah*

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK	100	120	120%
2.	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82	98,13	119,67

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit (Bobot 25%)

a) Komitmen Pimpinan (7,5%)

Subkomponen ini mengukur komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas UKI.

b) Dukungan Sumber Daya Manusia serta Akses Data & Informasi (7,5%)

Subkomponen ini mengukur kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI.

c) Akses Data dan Informasi (5%)

Subkomponen ini mengukur akses UKI atas data & informasi terkait proses bisnis yang dipantau.

d) Komunikasi (5%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan komunikasi UKI dengan pimpinan & pegawai di unit kerjanya, dengan UKI di tingkat atasnya, maupun dengan Itjen (Auditor Mitra/Tim Pembina UKI)

2. Komponen Proses (Bobot 25%)

a) Pemilihan Probis yang Dipantau (4%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemilihan proses bisnis yang dipantau oleh UKI.

b) Penyusunan RCM dan Fraud Risk Scenario (FRS) (4%)

Subkomponen ini mengukur penyusunan RCM dan FRS yang dilakukan oleh UKI.

c) Profiling Pegawai (4%)

Subkomponen ini mengukur kesesuaian penyusunan profil pegawai UKI serta tindak lanjut atas profil yang disusun.

d) Penyusunan Program Kerja (3%)

Subkomponen ini mengukur program kerja yang disusun oleh UKI dalam rangka pemantauan.

e) Pelaksanaan Pemantauan (3%)

Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Pengendalian Intern serta tindak lanjut hasil pemantauannya.

f) Penarikan Simpulan Pengendalian Internal (3%)

Subkomponen ini mengukur penarikan simpulan efektivitas pengendalian intern dari hasil pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI.

g) Pelaporan Pengendalian Internal (4%)

Subkomponen ini mengukur proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh UKI.

3. Komponen Hasil (Bobot 50%)

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan integritas dan perilaku pegawai (*fraud* dan *non fraud*) yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil verifikasi, serta penyelesaian pengaduan yang dilimpahkan oleh Inspektorat Jenderal

2. Penyelesaian Laporan informasi pada Aplikasi J3Li (15%)

Subkomponen ini mengukur efektivitas penyelesaian laporan informasi yang ditujukan kepada UKI pada Aplikasi J3Li

3. Kejadian Tangkap Tangan (20%)

Subkomponen ini mengukur kontribusi UKI atas kejadian tangkap tangan oleh Itjen dan APH, maupun *fraud* yang ada di unit eselon I.

Nilai diberikan atas unsur-unsur yang menjadi perhatian Tim Inspektorat Jenderal berdasarkan data sumber relevan yang dipilih selama kegiatan penilaian efektivitas UKI dengan batasan bahwa setiap pengendalian memiliki kelemahan melekat seperti kesalahan manajemen/pemilik/pelaksana pengendalian atau pengabaian pengendalian yang dilakukan oleh manajemen.

Adapun trajectory tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 74 **Trajectory Capaian Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal**

	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif
	11a-N : Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max /
Realisasi	5	15	15	20	20	98,13	98,13	TLK
Capaian	100	100	100	100	100	119,67	119,67	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	119,67	119,67	

Target IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Keterlibatan Pimpinan dalam proses perencanaan tugas UKI dan dukungan secara aktif terhadap pelaksanaan tugas UKI.
2. Pelaksanaan diklat terkait UKI dan juga diklat teknis yang diikuti oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan staff pada Seksi Kepatuhan Internal.
2. Melakukan komunikasi intensif dengan UKI Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dalam pelaksanaan tugas.
3. Sosialisasi rencana pemantauan tahunan pada tahun 2024 kepada unit teknis serta seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung
4. Melaksanakan dan menyampaikan hasil profiling terhadap seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung
5. Menyusun dan menyampaikan Fraud Risk Scenario (FRS) tahun 2024 terhadap proses bisnis yang dipantau.
6. Menyusun Laporan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) Tahun 2024.
7. Melaksanakan pemantauan terhadap proses bisnis sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-184/KN/2023 tentang Rencana Pemantauan Tahunan Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tahun 2024. Pemantauan dan pelaporan terhadap hasil pemantauan dilakukan secara bulanan.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

Tabel 75 *Pagu dan Realisasi Kegiatan Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal*

No.	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Kepatuhan Internal	7,992,000	7,582,200	Telah dilaksanakan sosialisasi terkait pengendalian internal (Pengendalian Gratifikasi, <i>Whistle Blowing System</i>) kepada satker KPKNL Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2024 juga dilaksanakan observasi atau pengamatan terhadap proses bisnis pada KPKNL Bandar Lampung

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 76 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 11a-N*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	82	-	-	-	-	98,13
2023	82	-	-	80	-	91,89

2022		-	-	-	-	89,56
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, tidak terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya serta untuk Standar Nasional, tidak ada standar yang dapat dibandingkan. IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal baru muncul di Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Bandar Lampung di tahun 2024 namun sudah ada di Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen pada tahun 2023 sebagai IKU mandatory.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan yaitu Sosialisasi dan penyempurnaan perangkat pemantauan (PPU) disebabkan adanya SOP baru untuk probis integrasi layanan dan pelayanan penilaian.

Kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut:

1. IKU Indeks Efektivitas UKI diukur melalui kertas kerja yang disusun oleh UKI Pusat dan kertas kerja serta sosialisasi disampaikan secara mendadak (tidak dari awal tahun) dan batas waktu penyampaian kertas kerja yang sempit.
2. Terdapat kendala dalam memperoleh dokumen pemantauan sehingga mengurangi nilai Indeks Efektivitas UKI

Adapun mitigasi risiko yang telah dilaksanakan untuk memaksimalkan pencapaian IKU antara lain.

1. Sosialisasi penggunaan Perangkat Pemantauan Pengendalian Utama (Perangkat PPU) Tahun 2024.
2. Berkoordinasi dengan pemilik proses bisnis agar dokumen pemantauan dapat disampaikan tepat waktu
3. Melakukan koordinasi dengan UKI Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu serta UKI Pusat



Foto 22 Sosialisasi Anti Gratifikasi kepada BPKAD Pesawaran, 18 November 2024

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah Sosialisasi Rencana Pemantauan Tahunan Pengendalian Intern Tahun 2025.

b. Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

IKU ini merupakan salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 77 Trajectory Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK Tahun 2024

Penguatan PengawasanPengendalian Internal yang Efektif								
15a-CP : Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI WBK								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol / KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max /
Realisasi	100	100	100	100	100	120	120	TLK
Capaian	100	100	100	100	100	120	120	

Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	120	120	
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Target IKU Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM, berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Keterlibatan seluruh pegawai KPKNL Bandar Lampung baik pegawai ASN maupun non-ASN (PPNPN) dalam mewujudkan keberlanjutan ZI-WBK/WBBM di KPKNL Bandar Lampung.
2. Persyaratan keberlanjutan ZI-WBK/WBBM yang lengkap dan dapat dipenuhi tepat waktu.
3. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara bulanan.



Foto 23 Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK setiap Bulan

Tidak ada alokasi anggaran yang dikhususkan dalam pencapaian IKU ini. Namun seluruh sumber daya baik PNS maupun PPNPN berpadu dalam mewujudkan Pembangunan ZI-WBK.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 78 *Alignment Perjanjian Kerja dengan Renstra, Renja dan Standar Nasional Indikator Kinerja 11b-N*

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	120
2023	-	-	-	-	-	-
2022	75	-	-	-	-	90,56
2021	75	-	-	-	-	74
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, tidak terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya serta untuk Standar Nasional, tidak ada standar yang dapat dibandingkan. Di tahun 2020, belum ada Pembangunan ZI-WBK sehingga tidak ada IKU ini. Sedangkan untuk Tahun 2023, KPKNL Bandar Lampung masih melakukan pengumpulan dokumen ZI-WBBM/ Monev Keberlanjutan ZI-WBK.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Batas waktu unggah di aplikasi DIA sangat sempit sehingga terkadang dilakukan secara terburu-buru.
2. SK mutasi pejabat dan pelaksana yang seringkali keluar di tengah tahun dan menyebabkan pergantian anggota tim ZI/WBK-WBBM.
3. Adanya unit yang pada tahap *clearance* terdapat catatan dari pihak eksternal sehingga tidak memenuhi kriteria ZI WBK;

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini pada tahun mendatang:

1. Mengumpulkan dokumen persyaratan di awal waktu sehingga tidak tergesa-gesa dan terdapat cukup waktu untuk mengevaluasi ulang dokumen dan memastikan dokumen persyaratan lengkap.
2. Menyusun Surat Keputusan Pimpinan Unit terkait Inovasi dan penyusunan proposal inovasi pada KPKNL Bandar Lampung.
3. Menyiapkan inovasi yang sudah dijalankan agar dapat direplikasi oleh unit lain baik unit dalam lingkup Kementerian Keuangan maupun di luar lingkup Kementerian Keuangan.
4. Menyiapkan dokumen terkait Surat Keputusan yang dibutuhkan dalam pembangunan ZI-WBBM dan menetapkannya di bulan Januari.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung, KPKNL Bandar Lampung mendapat alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024. Penyerapan anggaran mencapai 91,47% dari pagu yang diterima KPKNL Bandar Lampung sebesar Rp2.533.358.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Pencapaian tersebut diperoleh dari komponen realisasi belanja barang dan belanja modal.

Berikut uraian realisasi anggaran KPKNL Bandar Lampung yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja:

Tabel 79 **Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Per Jenis Belanja Tahun 2024**

	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
PAGU	-	Rp2.503.658.000,-	Rp29.700.000,-
REALISASI	-	Rp2.287.668.199,-	Rp29.699.160,-
PRESENTASE	-	91,37%	99,99%
SISA	-	Rp 215.989.801,-	Rp 840,-

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2020 s.d. 2024 tersaji sebagai berikut.

Tabel 80 **Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran KPKNL Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 s.d. 2024**

Tahun/ Jenis Belanja	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Persentase
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	
2024	-	-	2.503.658.000	2.287.668.199	29.700.000	29.699.160	91,47%
2023	-	-	2.244.325.000	2.066.533.451	65.402.000	56.637.230	91,92%
2022	-	-	1.779.222.000	1.601.622.526	-	-	90,02%
2021	-	-	1.625.903.000	1.588.576.237	1.028.088.000	1.025.321.586	98,49%
2020	1.313.694.000	1.313.690.358	1.846.698.000	1.844.748.661	415.331.000	415.027.900	99,94%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran KPKNL Bandar Lampung pada tahun 2024 turun, dengan penyerapan terendah ada di Tahun 2024. Namun demikian, output dari seluruh kegiatan KPKNL Bandar Lampung telah tercapai dengan optimal.

Pada Triwulan IV Tahun 2024, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *self-blocking* belanja perjalanan dinas dimana untuk KPKNL Bandar Lampung sejumlah Rp 10.031.000,00.

Adapun rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA per kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 81 Rincian Pagu dan Realisasi per Kegiatan di KPKNL Bandar Lampung

Uraian		Pagu	Realisasi
		2.533.358.000	2.317.367.359
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	567.061.000	489.080.000
CD.4796	Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	9.336.000	6.089.500
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	9.336.000	6.089.500
AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	3.680.000	3.300.500
AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	1.760.000	699.000
AEF.002	Sosialisasi/ Edukasi di Bidang Lelang	3.896.000	2.090.000
CD.4798	Pengelolaan Aset	557.725.000	482.990.500
AAH	Peraturan Lainnya	117.831.000	106.377.200
AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	80.760.000	75.354.200
AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	37.071.000	31.023.000
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	54.315.000	49.703.900
ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	21.915.000	18.493.900
ABA.003	Rekomendasi Hasil Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	32.400.000	31.210.000
BAE	Pelayanan Publik kepada UMKM	65.119.000	58.100.400
BAE.301	Risalah Lelang Sukarela UMKM	65.119.000	58.100.400
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	20.496.000	16.961.000
BAH.001	Risalah Lelang	20.496.000	16.961.000
FAE	Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan	134.038.000	124.344.000
FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	6.768.000	6.457.000
FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	10.800.000	8.610.000
FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	88.750.000	85.321.600
FAE.301	Rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan	27.720.000	23.955.400
FAK	Pengelolaan Aset BUN	75.354.000	67.875.500
FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	75.354.000	67.875.500
UAK	Pengelolaan Aset BUN	90.572.000	59.628.500
UAK.201	Aset Eks BLBI yang dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara	90.572.000	59.628.500

Uraian		Pagu	Realisasi
WA	Program Dukungan Manajemen	1.966.297.000	1.828.287.359
<u>WA.4700</u>	<u>Legislasi dan Litigasi</u>	<u>26.281.000</u>	<u>23.271.000</u>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	26.281.000	23.271.000
EBA. 969	Layanan Bantuan Hukum	26.281.000	23.271.000
<u>WA.4701</u>	<u>Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum</u>	<u>1.888.524.000</u>	<u>1.759.652.859</u>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.858.824.000	1.729.953.699
EBA.002	Kerumahtanggaan	68.743.000	59.432.800
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.790.081.000	1.670.520.899
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	29.700.000	29.699.160
EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	29.700.000	29.699.160
<u>WA.4702</u>	<u>Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik</u>	<u>43.500.000</u>	<u>37.781.300</u>
BMB	Komunikasi Publik	43.500.000	37.781.300
BMB.001	Pembinaan/ Edukasi Publik	27.000.000	23.765.100
BMB.002	Kehumasan	7.500.000	5.116.000
BMB.003	Pameran/ Eksibisi	9.000.000	8.900.200
<u>WA.4704</u>	<u>Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal</u>	<u>7.992.000</u>	<u>7.582.200</u>
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.992.000	7.582.200
EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	7.992.000	7.582.200

C. KINERJA LAINNYA

Berikut adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Bandar Lampung selama Tahun 2024.



Foto 24 *In House Training dan Jalan Sehat, 5 Januari 2024*



Foto 25 *Bintal Edisi Ramadhan, 21 Maret 2024*



Foto 26 *Kegiatan Olahraga Rutin – Futsal yang merupakan Inisiasi dari Agen Perubahan*



Foto 27 *Gebyar Lelang 116, 3 Mei 2024*



Foto 28 Pemasangan Plang BLBI, 25 Juni 2024



Foto 29 Forum Konsultasi Publik, 28 Agustus 2024



Foto 30 Collocation di KPPN Liwa – Mendekatkan Layanan ke Pengguna (Inovasi), 21 Oktober 2024



Foto 31 Nota Kesepahaman dengan Kabupaten Tanggamus, 4 November 2024



Foto 32 **Goes to Campus, 7 November 2024**



Foto 33 **Edukasi Publik di ITERA, 8 November 2024**



Foto 34 Focus Group Discussion TIK oleh KPTIK Medan, 13 November 2024



Foto 35 Tali Kasih Hari Kekayaan Negara, 4 Desember 2024



Foto 36 *Perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia, 10 Desember 2024*

D. PENGHARGAAN

Selama Tahun 2024, KPKNL Bandar Lampung meraih beberapa penghargaan sebagai berikut.

1. Penghargaan atas Penyelesaian Berkas Piutang LPDB-KUMKM di wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung;



Foto 37 *Penghargaan kepada Seksi Piutang Negara (1)*

2. Penghargaan atas percepatan penyelesaian Berkas Piutang BPD LH;
Atas Percepatan Penyelesaian Berkas
Piutang BPD LH



Foto 38 Penghargaan kepada Seksi Piutang Negara (2)

3. Juara I Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2024;



Foto 39 Penghargaan kepada Seksi Kepatuhan Internal (1)

4. Penghargaan sebagai KPKNL dengan Penerimaan PNBP Tertinggi Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu;



Foto 40 *Penghargaan kepada Seksi PKN, PN dan Lelang*

5. Penghargaan sebagai KPKNL dengan Pokok Lelang Tertinggi Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.



Foto 41 *Penghargaan kepada Pejabat Fungsional Pelelang*

6. Penghargaan sebagai KPKNL dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.



Foto 42 *Penghargaan kepada Seksi Kepatuhan Internal (2)*

E. GENDER EQUALITY, DISABILITY AND SOCIAL INCLUSION (GEDSI)

KPKNL Bandar Lampung telah menyusupkan prinsip-prinsip GEDSI dalam kebijakan, pelayanan dan sarana-prasarana:

1. Kepala KPKNL Bandar Lampung telah menetapkan Keputusan Kepala KPKNL Bandar Lampung Nomor KEP-59/KNL.0502/2023 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di KPKNL Bandar Lampung;
2. Terdapat sarana dan prasarana layanan untuk pengguna layanan penyandang disabilitas, ruang menyusui dan ruangan bermain anak;
3. Semua pelelang dan penilai tanpa memandang *gender* berhak untuk melaksanakan tugas penilaian dan lelang;
4. Semua pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi apapun selama jam layanan KPKNL Bandar Lampung yaitu pukul 08.00 s.d. 16.00 (selain waktu istirahat).

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN, peta strategi dan kontrak kinerja Kemenkeu-*Three* KPKNL Bandar Lampung. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Secara umum, pencapaian kinerja KPKNL Bandar Lampung Tahun 2024 telah sesuai dengan target dalam kontrak kinerja. Semua Indikator Kinerja dengan status hijau dengan capaian kinerja tahun 2024 diketahui bahwa nilai kinerja organisasi (NKO) KPKNL Bandar Lampung sebesar 115,94%.

Meskipun capaian kinerja KPKNL Bandar Lampung telah sesuai dengan target, upaya untuk memperbaiki kinerja tetap terus dilaksanakan. Tuntutan menjadi “*Distinguished Asset Manager*” mengharuskan DJKN khususnya KPKNL Bandar Lampung bergerak lebih inovatif kedepannya. Tuntutan dan tantangan ini melecutkan semangat KPKNL Bandar Lampung untuk bekerja lebih keras sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal baik diperoleh dari pengelolaan asset/kekayaan negara, maupun dari tugas pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang.

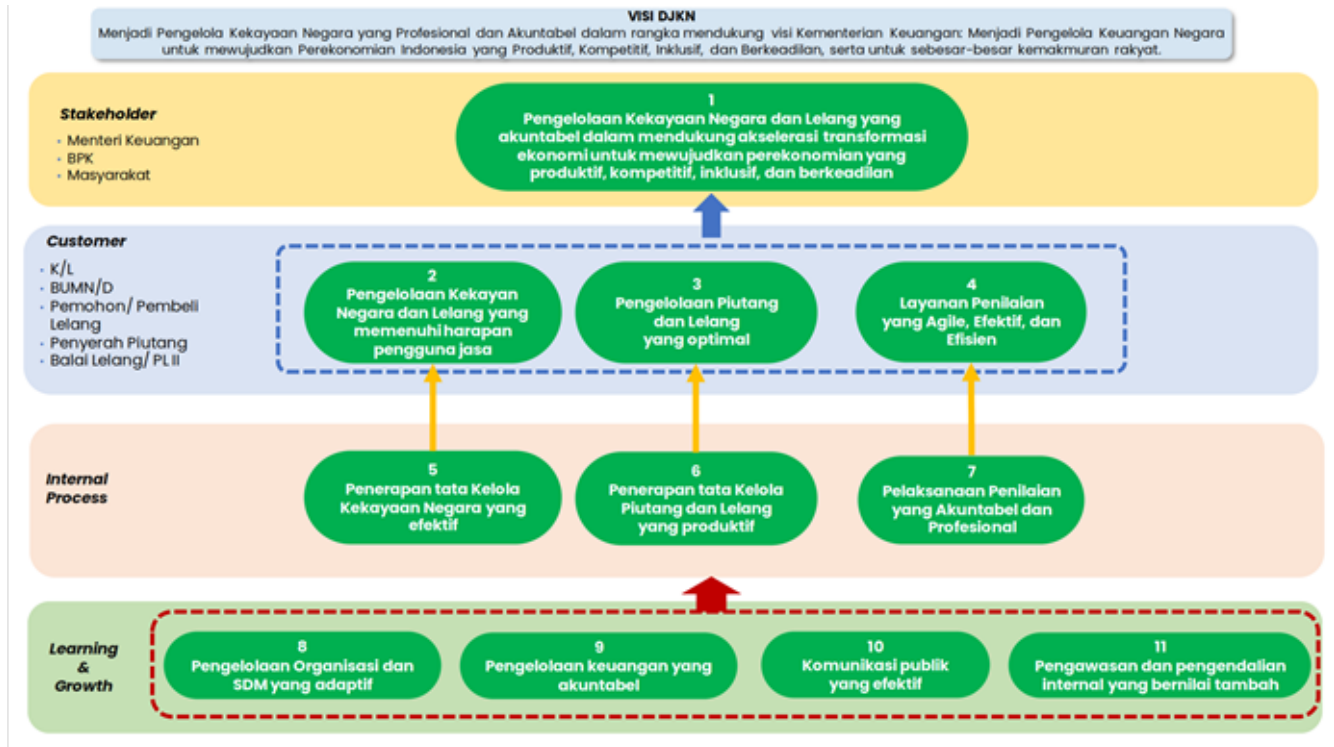
Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Bandar Lampung sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2.1/WKN.05/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BANDAR LAMPUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANDAR LAMPUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp13,57 M)
		1b-CP Indeks integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp131,09 M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara	100 (Rp766 juta)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75
5	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100 (426)
		5b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)	100 (34 NUP & 9 Paket)
		5c-N Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	100
6	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100 (286)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	35
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi data PNBPF fungsional DJKN	10



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

Program: Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	475,112,000
Kegiatan		
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	9,336,000
2. Pengelolaan Aset	Rp	465,776,000
	Rp	
Program: Program Dukungan Manajemen	Rp	1,966,297,000
Kegiatan		
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	26,281,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1,888,524,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	43,500,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	7,992,000

Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal
Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu



Ditandatangani Secara Elektronik
Raden Hariyadi Murti Kurniawan

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Bandar Lampung



Ditandatangani Secara Elektronik
Titik Wijayanti



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANDAR LAMPUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks integritas		20	20	30	30	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN		45	45	60	60	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang		100	100	100	100	100	100
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara		100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian		75	75	75	75	75	75
5	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)		32	32	80	80	100	100
5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle		55	55	70	70	100	100
6	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara		97	97	93	93	89	89
6b-CP	Persentase produktivitas lelang		45	45	60	60	89	89



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian		16	16	16	16	16	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai		5	5	25	25	35	35
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko		85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi data PNBP fungsional DJKN		10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi publik yang efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)		80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)		15	15	20	20	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM		100	100	100	100	100	100

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Bandar Lampung,



Ditandatangani Secara Elektronik
Titik Wijayanti



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan IKU : Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Unit Penanggung Jawab Utama : Kepala KPKNL Unit Pendukung : Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung



Ditandatangani Secara Elektronik
Titik Wijayanti



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Titik Wijayanti, S.H., M.A.P., M.A.	NAMA	Raden Hariyadi Murti Kurniawan	
NIP	198010172002122001	NIP	197510071996021001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung	JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif,	Indeks integritas	89,17	Penerima Layanan



	dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)			
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase realisasi pokok lelang	100	Penerima Layanan
6.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100	Penerima Layanan
7.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	Penerima Layanan
8.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis



9.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)	100	Proses Bisnis
10.	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	100	Proses Bisnis
11.	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	89	Proses Bisnis
12.	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase produktivitas lelang	89	Proses Bisnis
13.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16	Proses Bisnis
14.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	35	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran



16.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Persentase Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu</p>



PERILAKU KERJA		
		pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

1 Juni 2024

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Titik Wijayanti
198010172002122001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Raden Hariyadi Murti Kurniawan
197510071996021001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	34 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100	100	100	100	100	100
2	Indeks integritas		20	20	30	30	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		50	50	60	60	71,5	71,5
4	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN		45	45	60	60	86,5	86,5
5	Persentase realisasi pokok lelang		100	100	100	100	100	100
6	Persentase penurunan outstanding piutang negara		100	100	100	100	100	100



7	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian		75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
9	Persentase evaluasi kinerja BMN (Portfolio Aset)		32	32	80	80	100	100
10	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle		55	55	70	70	100	100
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara		97	97	93	93	89	89
12	Persentase produktivitas lelang		45	45	60	60	89	89
13	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian		16	16	16	16	16	16
14	Persentase pengembangan kompetensi pegawai		5	5	25	25	35	35
15	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko		85	85	85	85	85	85
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		100	100	100	100	100	100
17	Persentase Deviasi data PNBPN fungsional DJKN		10	10	10	10	10	10
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)		80	80	80	80	80	80
19	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)		15	15	20	20	82	82
20	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM		100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan							



yang berlaku.

1 Juni 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Titik Wijayanti
198010172002122001

Ditandatangani secara elektronik
Raden Hariyadi Murti Kurniawan
197510071996021001



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG
PER 31 DESEMBER 2024**

SS	IKU	Uraian IKU	Target Tahun 2024	Target Q1	Realisasi s/d	Indeks Thd Target Tahunan	Target Q2	Realisasi s/d	Indeks Thd Target Tahunan	Target Q3	Realisasi s/d	Indeks Thd Target Tahunan	Target Q4	Realisasi s/d	Indeks Thd Target Tahunan
					Q1			Q2			September			Desember	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan														
	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	MAX/TLK 100%	10%			30%			60%			100%		
	a.	PNBP Pengelolaan BMN	Rp11.200.000.000	Rp1.120.000.000	Rp 2.132.817.126	19,04%	Rp3.360.000.000	Rp4.050.264.583	36,16%	Rp6.720.000.000	Rp10.439.928.018	93,21%	Rp11.200.000.000	Rp13.544.708.359	120,93%
	b.	PNBP Piutang Negara	Rp8.500.000	Rp850.000	Rp 2.262.155	26,61%	Rp2.550.000	Rp5.037.509	59,26%	Rp5.100.000	Rp22.455.022	264,18%	Rp8.500.000	Rp32.304.454	380,05%
	c.	PNBP Lelang	Rp6.493.850.000	Rp649.385.000	Rp 741.202.674	11,41%	Rp1.948.155.000	Rp3.886.597.461	59,85%	Rp3.896.310.000	Rp5.708.251.093	87,90%	Rp6.493.850.000	Rp8.076.579.828	124,37%
		Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp17.702.350.000	Rp1.770.235.000	Rp 2.876.281.955	16,25%	Rp5.310.705.000	Rp7.941.899.553	44,86%	Rp10.621.410.000	Rp16.170.634.133	91,35%	Rp17.702.350.000	Rp21.653.592.641	122,32%
		Capaian IKU				162,48%			149,55%			152,25%			
	1b-CP	Indeks Integritas	MAX/TLK												
		Target/Realisasi	89,17	10	10	11,21%	20	20	22,43%	30	42	47,10%	89,17	92,44	103,67%
		Capaian IKU				100,00%			100,00%			140,00%			103,67%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa														
	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,5%												
	a.	Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2024)	Bobot 75%	30%	28,64%		50%	86,59%		60%	85,93%		71,5%	85,95%	
	b.	Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2023	Bobot 25%		73,52%			73,52%			73,52%			73,52%	
		Target/Realisasi			39,86%			83,32%			82,83%			82,84%	
		Capaian IKU			132,87%	55,75%		166,65%	116,53%		138,05%	115,84%		115,86%	115,86%
	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara													
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L			80			80			86			86	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2024 yang ditindaklanjuti oleh K/L			12			21			47			51	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2023			93			93			93			93	
		Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2024			27			54			54			54	
		Target/Realisasi	86,5%	10%	76,67%		45%	68,71%		60%	90,48%		86,5%	93,20%	
		Capaian IKU			766,67%	88,63%		152,68%	79,43%		150,79%	104,60%		107,74%	107,74%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yg Optimal														
	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX/TLK 100%	10%			30%			80% (Adendum) Target sebelumnya 60%			100%		
		Pokok Lelang Kelas I	Rp130.890.000.000	Rp13.089.000.000	Rp 8.417.075.466	6,43%	Rp39.267.000.000	Rp 94.649.241.317	72,31%	Rp104.712.000.000	Rp 135.545.664.929	103,56%	Rp130.890.000.000	Rp 175.447.136.934	134,04%
		Pokok Lelang Pegadaian	Rp40.100.000.000	Rp4.010.000.000	Rp 11.170.658.500	27,86%	Rp12.030.000.000	Rp 20.084.011.800	50,08%	Rp32.080.000.000	Rp 27.503.649.300	68,59%	Rp40.100.000.000	Rp 48.633.142.800	121,28%
		Target/Realisasi Pokok Lelang	Rp170.990.000.000	Rp17.099.000.000	Rp 19.587.733.966	11,46%	Rp51.297.000.000	Rp 114.733.253.117	67,10%	Rp136.792.000.000	Rp 163.049.314.229	95,36%	Rp170.990.000.000	Rp 224.080.279.734	131,05%
		Capaian IKU			114,55%			223,66%			119,20%			131,05%	
	3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAX/TLK 100%	10%			30%			60%			100%		
		Target/Realisasi	Rp961.000.000	Rp96.100.000	Rp 236.485.822	24,61%	Rp288.300.000	Rp 419.848.803	43,69%	Rp576.600.000	Rp 960.161.670	99,91%	Rp1.000.000.000	Rp 1.389.541.010	138,95%
		Capaian IKU			246,08%			145,63%			166,52%			138,95%	
4	Birokrasi dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien														
	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	MAX/AVG												
		Target/Realisasi	75	75	97,63	130,17%	75	93,50	124,67%	75	90,32	120,43%	75	90,02	120,03%
		Capaian IKU			130,17%			124,67%			120,43%			120,03%	
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif														
	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX/TLK 100%	20%			40%			60%			100%		
		Target/Realisasi	581	116	4	0,69%	232	239	41,14%	349	580	99,83%	581	599	103,10%
		Capaian IKU			3,44%			102,84%			166,38%			103,10%	
	5b-CP	Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	MAX/TLK												
		Target/Realisasi Evaluasi 2022													
		Target/Realisasi Penyampaian Rekomendasi (Bobot 80%)	34	4	8		11	14		28	36		34	42	
		Target/Realisasi Tindak Lanjut oleh Satuan Kerja atas Rekomendasi yang telah Disampaikan KPKNL (Bobot 20%)	9	1	0		3	2		8	8		9	10	
		Target/Realisasi	100%	10%	18,82%	18,82%	32%	37,39%	37,39%	80%	102,48%	102,48%	100%	121,05%	121,05%
		Capaian IKU			188,24%			116,83%			128,10%			121,05%	

SS	IKU	Uraian IKU	Target Tahun 2024	Target Q1	Realisasi s/d	Indeks Thd Target Tahunan	Target Q2	Realisasi s/d	Indeks Thd Target Tahunan	Target Q3	Realisasi s/d	Indeks Thd Target Tahunan	Target Q4	Realisasi s/d	Indeks Thd Target Tahunan
					Q1			Q2			September			Desember	
5c-N		Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle (KONVERSI 120)	MAX/TLK	25											
		Target/Realisasi	100	25	25	25%	55	55	55%	70	100	100%	100	100	120,00%
		Capaian IKU	-		100%			100%			142,86%			120,00%	
6	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif														
6a-CP	321	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	MIN/TLK												
		Target/Realisasi (BKPN) : TARGET AWAL BKPN : 321	281	317	315	87,90%	310	304	91,81%	300	281	100,00%	281	257	109,02%
		Target/Realisasi (%)	88%	99%	112,10%		97%	108,19%		93%	87,54%		88%	80,06%	
		Capaian IKU			100,63%			101,94%			105,87%			109,02%	
6b-CP		Persentase produktivitas lelang	MAX/TLK												
		Target/Realisasi	89%	30%	45,70%	51,35%	45%	96,02%	107,89%	60%	115,46%	129,73%	89%	120%	134,83%
		Capaian IKU			152,33%			213,38%			192,43%			134,83%	
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional														
7a-CP		Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN/TLK												
		Target/Realisasi	16%	16%	0,00%	120,00%	16%	0,00%	120,00%	16%	0,00%	200,00%	16%	0,00%	200,00%
		Capaian IKU			120,00%			120,00%			200,00%			200,00%	
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif														
8a-N		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX/TLK												
		Target/Realisasi	90%	45%	56,30%	62,55%	60%	81,50%	90,56%	80%	108,71%	120,79%	90%	119,00%	132,22%
		Capaian IKU			125,10%			135,83%			135,89%			132,22%	
8b-N		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	MAX/TLK												
		a. Pengelolaan Kinerja Organisasi			100			100			99,72			99,78	
		b. Pengelolaan Kinerja Pegawai			100			92,02			96,95			95,84	
		c. Pengelolaan Manajemen Risiko			100			100			98,13			99,25	
		Target/Realisasi	85	85	100	117,65%	85	97,61	114,83%	85	98,25	115,59%	85	98,39	115,75%
		Capaian IKU			117,65%			114,83%			115,59%			115,75%	
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel														
9a-CP		Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	MAX/TLK												
		Target/Realisasi	100	100	105,26	105,26%	100	105,26	105,26%	100	120	120,00%	100	120	120,0%
		Capaian IKU			105%			105%			120,0%			120,0%	
9b-CP	a	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DIKN	MIN/TLK												
		Target/Realisasi	10%	10%	0,00%		10%	0,00%		10%	0,00%		10%	0,00%	
		b	Deviasi Data PNBPN Piutang Negara	10%	10%	0,00%		10%	0,00%		10%	0,00%		10%	0,00%
		Rata-Rata Target	10%	10%	0,00%	120%	10%	0,00%	120%	10%	0,00%	200,00%	10%	0,00%	200,00%
		Capaian IKU			120%			120%			200,00%			200,00%	
10	Komunikasi Publik yang Efektif														
7a-N		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	MAX/AVG												
		Target/Realisasi	80	80	110	137,50%	80	110	137,50%	80	112	140,00%	80	108	135,00%
		Capaian IKU			137,50%			137,50%			140,00%			135,00%	
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah														
11a-N		Indeks efektivitas UKI	MAX/TLK												
		Target/Realisasi	82	5	5	6,10%	15	15	18,29%	20	20	24,39%	82	98,13	119,67%
		Capaian IKU			100,00%			100,00%			100,00%			119,67%	
11b-N		Tingkat capaian Unit Kerja dalam keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	MAX/TLK												
		Target/Realisasi	100	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	120	120,00%
		Capaian IKU			100,00%			100,00%			100,00%			120,00%	

Kepala KPKNL Bandar Lampung



ditandatangani secara elektronik
Titik Wijayanti



**NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL BANDAR LAMPUNG
PERIODE S/D 31 DESEMBER 2024**

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Target Raw Data	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(30%)	30%							33,55%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan								111,83%
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	Rp 17.702.350.000	122,32%	14%	50%	122,32%	120,00%
1b-CP	Indeks Integritas	P/M	89,17		92,44	14%	50%	103,67%	103,67%
	Customer Perspective(20%)	20%							23,45%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								111,80%
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	71,5%		82,84%	19%	50%	115,86%	115,86%
2b-CP	Tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	P/L	86,5%		93,20%	19%	50%	107,74%	107,74%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal								120,00%
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	Rp 170.990.000.000	131,05%	14%	50%	131,05%	120,00%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	Rp 1.000.000.000	138,95%	14%	50%	138,95%	120,00%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien								120,00%
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	P/M	75		90,02	14%	100%	120,03%	120,00%
	Internal Process Perspective (25%)	25%							29,07%
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif								114,37%
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%		103,10%	14%	33%	103,10%	103,10%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100%		121,05%	14%	33%	121,05%	120,00%
5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	P/M	100,00		100	14%	33%	120,00%	120,00%
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif								114,51%
6a-CP	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	88,00%	281	80,06%	14%	50%	109,02%	109,02%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%		120,00%	14%	50%	134,83%	120,00%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								120,00%
7a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	16%		0,00%	14%	100%	200,00%	120,00%
	Learning & Growth Perspective (25%)	25%							29,86%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								117,88%
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	90%		119,00%	14%	50%	132,22%	120,00%
8b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	P/M	85		98,39	14%	50%	115,75%	115,75%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel								120,00%
9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	P/M	100		120,00	14%	50%	120,00%	120,00%
9b-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	P/M	10%		0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%
10	Komunikasi publik yang efektif								120,00%
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80		108,00	14%	100%	135,00%	120,00%
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah								119,86%
11a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal	P/M	82		98,13	14%	42%	119,67%	119,67%
11b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/L	100		120,00	19%	58%	120,00%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									115,94%

Kepala KPKNL Bandar Lampung



ditandatangani secara elektronik
Titik Wijayanti





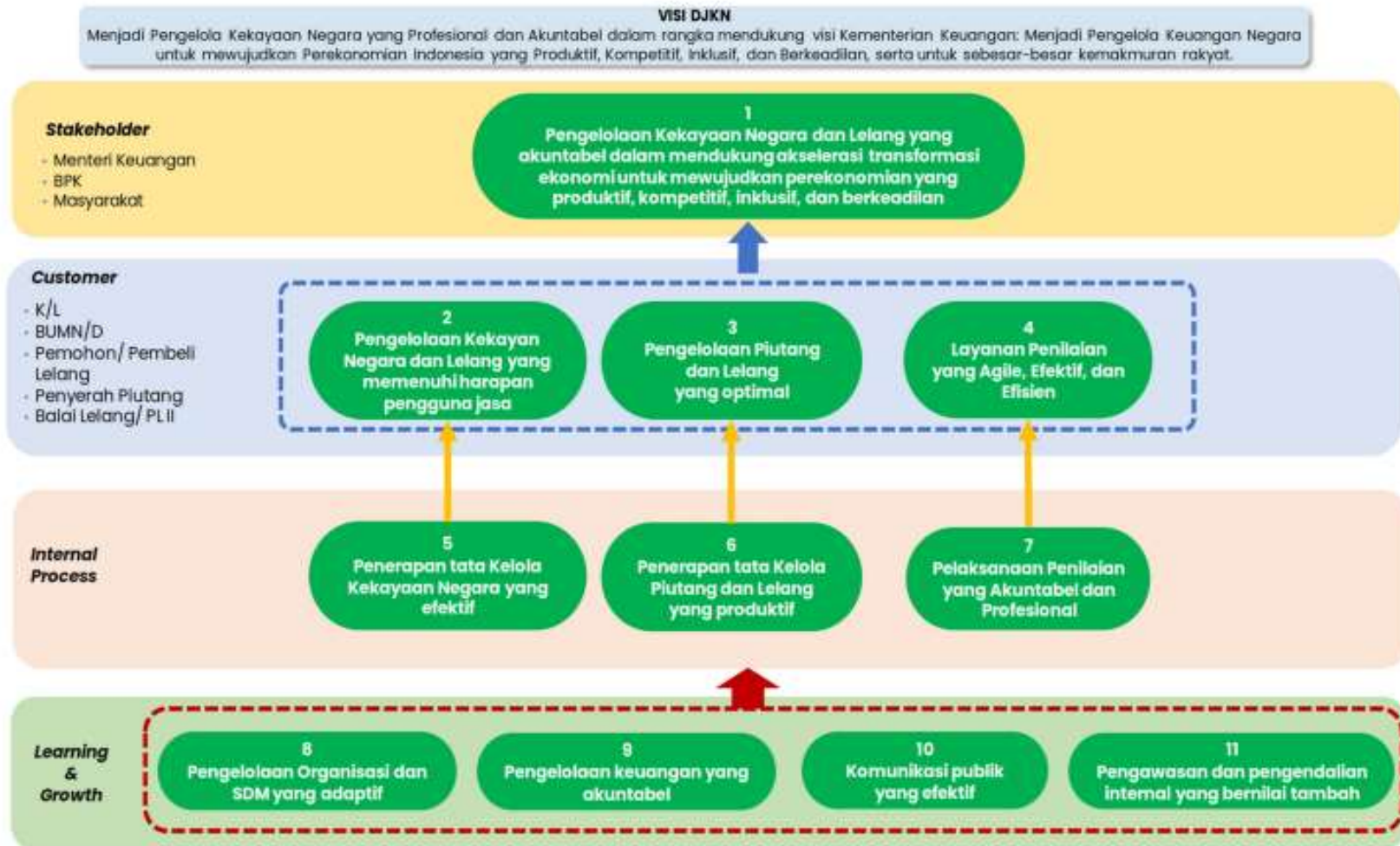
**Dialog Kinerja Organisasi (DKO)
KPKNL Bandar Lampung
Periode Triwulan IV 2024
Bandar Lampung, 3 Januari 2025**





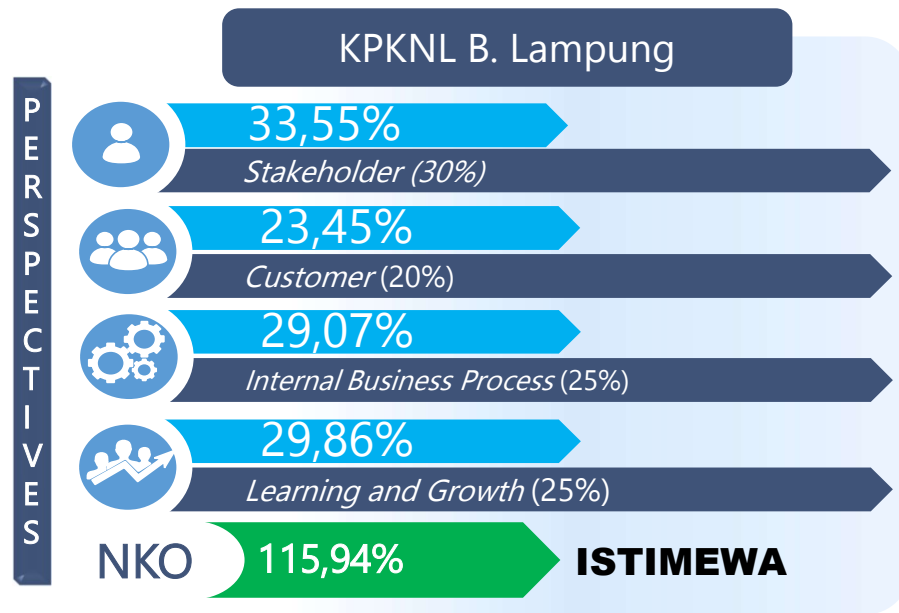
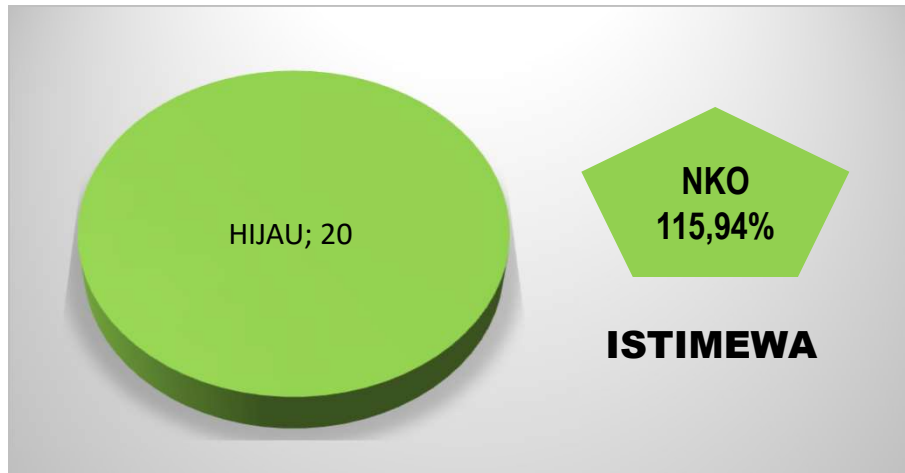
PETA STRATEGI KPKNL BANDAR LAMPUNG

Peta Strategi





IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KPKNL BANDAR LAMPUNG PER 31 DESEMBER 2024



20 IKU dengan Status HIJAU	
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
1b-CP	Indeks Integritas
2a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
2b-CP	Tingkat efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian
5a-CP	Persentase BMN berupa Tanah yang disertipikatkan
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle
6a-CP	Persentase Saldo BKPN
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)
11a-N	Indeks efektivitas UKI
11b-N	Tingkat capaian Unit Kerja dalam keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM



Ikhtisar Capaian Kinerja

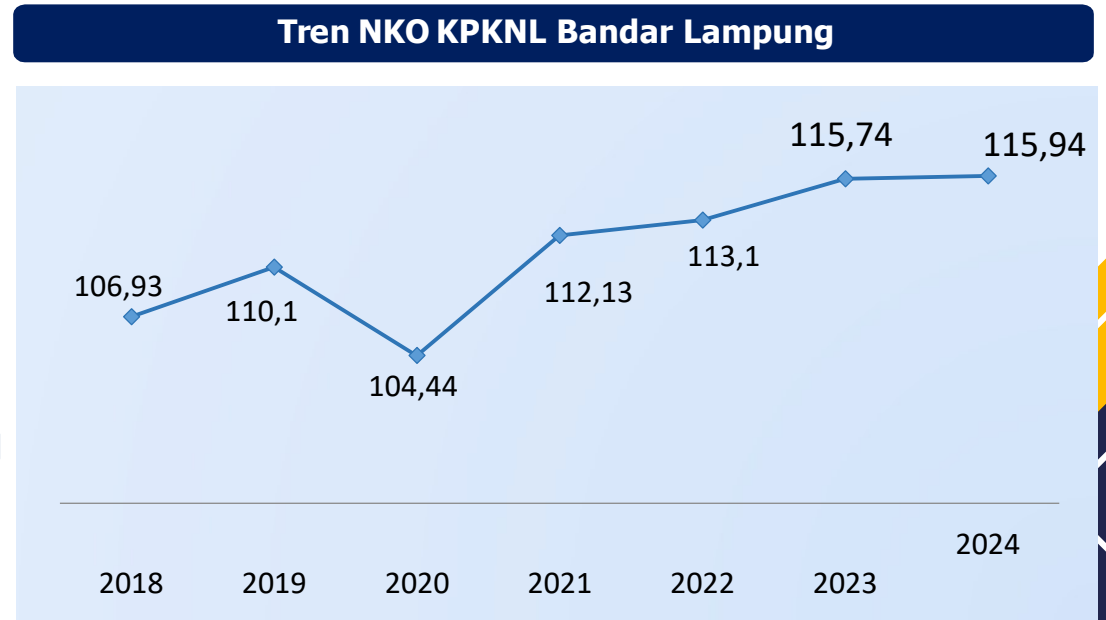


KPKNL BANDAR LAMPUNG TRIWULAN IV 2024

20 Total IKU	
20	0
0	0
0	0

Stakeholder (30%)	33,55
Customer (20%)	23,45
Internal Process (25%)	29,07
Learning & Growth (25%)	29,86

NKO s.d Triwulan IV	115,94	ISTIMEWA
---------------------	--------	----------





Highlight Risiko

KPKNL BANDAR LAMPUNG

IKHTISAR RISIKO ORGANISASI

Peta Risiko Hasil Identifikasi Awal Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti terjadi	6.1 2.2	12	17	6.2 2.2	25
	4 Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	3 Kadang Terjadi	3.1 3	8	13	11.2 16	23
	2 Jarang Terjadi	2.1 2	6	11 11.1	16	21
	1 Hampir Tidak terjadi	1.1 1	5.1 5.2 7.1 7.2	1.2 1.1 9.2	15	20

22

Jumlah Risiko yang dipantau pada KPKNL Bandar Lampung

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

Risiko yang Dimitigasi

Prioritas	RE	Nama Risiko	PO
1	6.2	Pelaksanaan Lelang Tidak Ada Peminat	22
2	3.2	Tahapan pengurusan piutang negara tidak dapat terlaksana secara optimal	22
3	11.2	Tidak terpenuhinya penilaian keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM dengan memadai	18
4	1.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungi), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh UKI, Itjen dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	15

Peta Risiko Per Triwulan IV Tahun 2024



Peta Risiko Aktual Akhir Triwulan IV KPKNL Bandar Lampung

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti terjadi	7	12	17	22	25
	4 Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	3 Kadang Terjadi	3	8	13	18	23
	2 Jarang Terjadi	2	6	11 11.2	16	21
	1 Hampir Tidak terjadi	1	5.1 5.2 7.1 7.2	1.2 1.1 9.2	10	15

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20 - 25	Merah
Tinggi	16 - 19	Oranye
Sedang	12 - 15	Kuning
Rendah	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah	1 - 5	Biru

Ikhtisar Perubahan Besaran Risiko

Risk Event	Nama Risiko	PO	Q2
6.2	Pelaksanaan Lelang Tidak Ada Peminat	22	7
3.2	Tahapan pengurusan piutang negara tidak dapat terlaksana secara optimal	22	3
11.2	Tidak terpenuhinya penilaian keberlanjutan pembangunan ZIWBK/WBBM dengan memadai	18	6
1.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungi), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh UKI, Itjen dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	15	1



Penjelasan Masing-Masing IKU (Termasuk *hot issues*)

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s/d Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100 (10%)	100 (30%)	100 (30%)	100 (60%)	100 (60%)	100 (100%)	100 (100%)	Max/PM
Realisasi	162,5 (16,25%)	149,53 (44,86%)	149,53 (44,86%)	150,70 (90,42%)	150,70 (90,42%)	122,32 (122,32%)	122,32 (122,32%)	
Capaian	162,5%	149,53%	149,53%	150,70%	150,70%	122,32%	122,32%	

Isu Utama dan Implikasi (<i>Apa yang Terjadi dan Implikasinya?</i>)	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Isu Utama : Persetujuan pemindahtanganan tidak laku lelang, Persetujuan sewa dilakukan untuk UMKM, Objek yang dilelang jarang laku	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi potensi satuan kerja yang dapat berkontribusi terhadap kinerja PNBPN; Koordinasi dengan satuan kerja terpilah; Melakukan himbauan melalui surat. Mendorong satuan kerja, mengajukan kembali penetapan nilai wajar penghapusan BMN Profiling BKP Pemanggilan kembali debitur dengan Surat Panggilan Melakukan penelitian lapangan barang jaminan Melakukan penagihan langsung kepada debitur Melakukan sosialisasi keringanan utang Crash Program Koordinasi dengan penyerah piutang Melaksanakan permohonan lelang yang masuk 		
Akar Masalah (<i>Mengapa hal tersebut terjadi?</i>)	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan pemindahtanganan yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan lelang tidak ada peminat. Persetujuan sewa dilakukan permohonan keringanan sewa Harga limit masih tinggi, Objek lelang tidak marketable, Adanya permasalahan hukum (gugatan) Lokasi debitur yang relatif jauh dan terpencar (terutama yang berada di luar wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung) sehingga membutuhkan manajemen biaya, waktu dan personil yang lebih efisien. Memerlukan kunjungan lebih dari satu kali untuk meyakinkan debitur untuk melakukan penyelesaian hutang. Debitur kelompok tani yang pembayarannya mengandalkan musim panen. Piutang negara sebagian tidak ada barang jaminannya. 	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong satker yang telah memiliki persetujuan pemindahtanganan/pemanfaatan untuk segera melaksanakan lelang/melakukan perjanjian pemanfaatan dengan mitra pemanfaatan Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Lamkulu untuk mengirimkan surat permintaan data PNBPN Aset BLU Sosialisasi ke Pemohon Lelang Seksi PN melanjutkan tindakan/kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya 	Seksi PKN Seksi PN Jabung Pelang	2024



**RINCIAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PER 31 DESEMBER 2024**

No	PNBP	Target 2024	Capaian s/d 31 Desember 2024	Indeks Capaian
1	BMN	Rp. 11.200.000.000	Rp 13.544.708.359	120,93%
2	PN	Rp 8.500.000	Rp 32.304.454	380,05%
3	Lelang	Rp. 6.493.850.000	Rp. 8.076.579.828	124,37%
	Total	Rp. 17.702.350.000	Rp. 21.653.592.641	122,32%

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1b-CP Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	Max/ PM
Realisasi	10	20	20	42	42	92,44	92,44	
Capaian	100%	100%	100%	140%	140%	103,67%	103,67%	

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)
<p>1. Terdapat beberapa parameter atas penilaian pengelolaan kinerja yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dokumentasi perencanaan • Dokumentasi pelaksanaan/eksekusi kinerja • Penilaian manual IKU Non Pemilik Peta Strategi • Kualitas dokumentasi monitoring dan evaluasi • Kualitas tindak lanjut monitoring dan • Kualitas edukasi pengelolaan kinerja

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
-

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan SDM pada seksi Kepatuhan Internal KPKNL Bandar Lampung melalui <i>microlearning</i> Pengelolaan Kinerja. 2. Meningkatkan edukasi terkait pengelolaan kinerja

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
-	Seksi KI	2024



PERHITUNGAN REALISASI IKU INDEKS INTEGRITAS

TAHUN 2024

NO	PERIODE	TARGET	REALISASI CAPAIAN	FORMULA	BUKTI DUKUNG
1	TRIWULAN I	10	10	Q1 = Matriks Action Plan Hasil SPI 2023 (10%)	Sesuai ND Sekretaris DJKN Nomor : ND-1687 hal Penyampaian Capaian IKU Indeks Integritas pada Triwulan I Tahun 2024, disebutkan bahwa realisasi capaian untuk periode triwulan I tahun 2024 adalah 10 dari target 10 (indeks capaian 100%)
2	TRIWULAN II	20	20	Q2 = Matriks Action Plan Hasil SPI 2023 (10%) + Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden Internal dan Eksternal ke Inspektorat Jenderal (5%) + Kegiatan Pencegahan: Sosialisasi Anti Korupsi (5%)	Sesuai ND Sekretaris DJKN Nomor : ND-2247 hal Penyampaian Capaian IKU Indeks Integritas pada Triwulan II Tahun 2024, disebutkan bahwa realisasi capaian untuk periode triwulan II tahun 2024 adalah 20 dari target 20 (indeks capaian 100%)
3	TRIWULAN III	30	42	Q3 = Tindak Lanjut Action Plan Hasil SPI 2023 (30%). Penghitungan: (Total Action Plan selesai ditindaklanjuti s.d. Q3 / Total Action Plan yang harus ditindaklanjuti s.d. Q3) x 30%	Sesuai ND Sekretaris DJKN Nomor : ND-3601/KN.1/2024 tanggal 1 Oktober 2024 hal Penyampaian Capaian IKU Indeks Integritas pada Triwulan III Tahun 2024, disebutkan bahwa realisasi untuk periode triwulan III tahun 2024 adalah 42 dari target 30 (indeks capaian 140%)
4	TRIWULAN IV	89,17	92,44	Q4 = Penilaian dari komponen Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi (5%)	Sesuai ND Sekretaris DJKN Nomor : ND-155/KN.1/2025 tanggal 13 Januari 2025 hal Penyampaian Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi DJKN Periode Triwulan IV Tahun 2024, disebutkan bahwa realisasi untuk periode triwulan IV tahun 2024 adalah 92,44 dari target 89,17 (indeks capaian 103,67%)

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	30	50	50	60	60	71,5	71,5	Max/ PL
Realisasi	39,86	83,32	83,32	82,83	82,83	82,84	82,84	
Capaian	132,86%	166,64%	166,64%	138,05	138,05	115,86	115,86	

Isu Utama dan Implikasi (*Apa yang Terjadi dan Implikasinya?*)

No	Komponen	Bobot	Capaian s/d 31 Desember 2024	Capaian
1	Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2024)	75%	85,95%	82,84%
2	Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2023	25%	73,52%	

Isu utama : Telah dilakukan sosialisasi terkait SBSK namun satker belum dapat mengisi formulir pendataan secara mandiri
 Implikasi : keterlambatan pengisian formulir pendataan dan keterlambatan pemrosesan formulir perhitungan

Akar Masalah (*Mengapa hal tersebut terjadi?*)

- Satker mengalami kesulitan untuk melakukan pengisian formulir pendataan secara mandiri, perlu untuk didampingi oleh petugas KPKNL
- Menunggu update formulir pendataan dan perhitungan yang telah di update dari Direktorat PKN

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- Melaksanakan sosialisasi pendataan SBSK untuk satker POLRI (dilaksanakan tanggal 21 Maret 2024)
- Telah dilakukan asistensi one on one untuk 5 Satker POLRI dan 1 Satker Kemenhan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penang gung jawab	Periode
Melaksanakan asistensi <i>one on one</i> pada masing-masing satker target (satker POLRI) untuk 8 (delapan) Satker sisa	Seksi PKN	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2b-CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	10	45	45	60	60	86,5	86,5	Max/ PM
Realisasi	76,67	68,71	68,71	90,48	90,48	93,20	93,20	
Capaian	766,7%	152,68	152,68	150,8	150,8	107,74	107,74	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>
<p>Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2023 yang ditindaklanjuti oleh K/L = 86</p> <p>Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2024 yang ditindaklanjuti oleh K/L = 51</p> <p>Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2023 = 93</p> <p>Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2024 = 54</p> <p>Realisasi IKU = $(86+51) / (93+54) = 93,20\%$</p>

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
<p>Persetujuan sewa tidak ditindak lanjuti dengan pelaksanaan sewa, dan terdapat satker yang tidak melaporkan tindak lanjut dari persetujuan yang telah diterbitkan KPKNL</p>

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
<p>Berkomunikasi dengan satker agar segera menindaklanjuti surat-surat persetujuan yang telah ditetapkan oleh KPKNL</p>

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Membuat surat konfirmasi tindak lanjut pengelolaan BMN kepada satker	Seksi PKN	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3 (Adendum)	s.d. Q3 (Adendum)	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	100 (10%)	100 (30%)	100 (30%)	100 (80%)	100 (80%)	100 (100%)	100 (100%)	Max/ PM
Realisasi	114,55 (11,46%)	220,67 (66,20%)	220,67 (66,20%)	119,20 (95,35%)	119,20 (95,35%)	131,05 (131,05%)	131,05 (131,05%)	
Capaian	114,6%	220,67%	220,67%	119,20%	119,20%	131,05%	131,05%	

Isu Utama dan Implikasi (*Apa yang Terjadi dan Implikasinya?*)

Realisasi IKU ini terdiri dari :

No	Komponen	Target 2024	Capaian s/d 31 Desember 2024	Indeks Capaian
1	PL Kelas I	Rp.130.890.000.000	Rp. 175.447.136.934	134,04%
2	Pegadaian	Rp. 40.100.000.000	Rp. 48.633.142.800	121,28%
	Total	Rp.170.990.000.000	Rp.224.080.279.934	131,05%

Isu Utama : Objek yang dilelang jarang laku
 Implikasi : Pokok lelang tidak tercapai

Akar Masalah (*Mengapa hal tersebut terjadi?*)

1. Barang yang dilelang tidak *free and clear* (masih berpenghuni / masih ada permasalahan) namun guna mencapai target yang diharapkan, upaya menjadikan laku tetap menjadi prioritas utama
2. Harga limit masih tinggi
3. Objek tidak marketable

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Koordinasi dengan para pemangku kepentingan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasyarakatkan layanan lelang di media sosial 2. Koordinasi dengan stakeholder 3. Sosialisasi dan penggalian potensi lelang kepada instansi Kemenkeu, K/L, Perbankan, Pemda 	Jabfung Pelelang	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
	3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	100 (10%)	100 (30%)	100 (30%)	100 (60%)	100 (60%)	100 (100%)	100 (100%)	Max/ PM
Realisasi	236,49 (23,65%)	139,93 (41,98%)	139,93 (41,98%)	160,03 (96,02)	160,03 (96,02)	138,95 (138,95)	138,95 (138,95)	
Capaian	236,5%	139,93%	139,93%	160,03%	160,03%	138,95%	138,95%	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>			
Realisasi IKU :			
No	Target 2024	Capaian s/d 31 Desember 2024	Indeks Capaian
1	Rp.1.000.000.000	Rp. 1.389.541.010	138,95%

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Profiling BKPN 2. Pemanggilan kembali debitur dengan Surat Panggilan 3. Melakukan penelitian lapangan barang jaminan 4. Melakukan penagihan langsung kepada debitur 5. Melakukan sosialisasi keringanan utang Crash Program 6. Koordinasi dengan penyerah piutang

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi debitur yang relatif jauh dan terpencar (terutama yang berada di luar wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung) sehingga membutuhkan manajemen biaya, waktu dan personil yang lebih efisien. 2. Memerlukan kunjungan lebih dari satu kali untuk meyakinkan debitur untuk melakukan penyelesaian hutang. 3. Debitur kelompok tani yang pembayarannya mengandalkan musim panen. 4. Piutang negara sebagian tidak ada barang jaminannya.

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Melanjutkan tindakan/kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya	Seksi PN	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Birokrasi dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/ TLK
Realisasi	97,63	93,50	93,50	90,32	90,32	90,02	90,02	
Capaian	130,17%	124,67%	124,67%	120,43%	120,43%	120,03%	120,03%	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>
Dalam pengajuan permohonan, masih banyak satuan kerja yang belum menginput permohonan SIP dalam aplikasi Sistem Informasi Penilaian, sementara berkas usulan sudah masuk melalui aplikasi Nadine dan diproses oleh Penilai. Hal ini mengakibatkan perbedaan perhitungan ketepatan waktu jika dibandingkan antara ketepatan waktu melalui aplikasi SIP dan jumlah usulan sebenarnya yang diproses oleh Penilai. Hal ini akan berdampak SIP menjadi kurang mencerminkan beban kerja sebenarnya dari Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
Masih terdapat satuan Kerja yang belum mengetahui ketentuan untuk menginput permohonan penilaian melalui aplikasi SIP (online) selain mengajukan berkas fisik ke KPKNL.

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan penilaian sesuai dengan SOP yang ditetapkan,. Melakukan perhitungan indeks ketepatan waktu melalui aplikasi SINILAM (Sistem Informasi Penilaian) KPKNL Bandar Lampung 		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Melakukan Sosialisasi kepada Satuan Kerja terkait implemetasi Permohonan Penilaian melalui SIP	Jabfung Penilai	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							
	5a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	20	40	40	60	60	100	100	Max/ TLK
Realisasi	20	41,14	41,14	99,83	99,83	103,10	103,10	
Capaian	100%	102,84%	102,84%	166,38%	166,38%	103,10%	103,10%	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>
<p>Target Sertifikasi : 581 NUP Realisasi Sertifikasi : 599 NUP</p> <p>Sumber data yang digunakan ada 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Master Aset pada Aplikasi SIMAN 2. Data tanah pada Aplikasi SIMANTAP 3. Daftar BMN dengan kategori BBSK

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Satker DJKA (satker dengan NUP terbanyak) belum melakukan pergerakan;

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan kepada satker dan kantah untuk melakukan sertifikasi BMN dengan akurat.

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rapat tripartite 2. Menganalisa permasalahan utama dalam rapat tersebut 3. Koordinasi dengan satker-satker dengan target yang banyak 4. Koordinasi dengan satker-satker dengan target yang sedikit 	Seksi PKN	2024



**RINCIAN REALISASI SERTIFIKASI BMN BERUPA TANAH
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	KANWIL DJKN/KPKNL	TARGET SERTIPIKASI BMN TA 2024						Hulu Migas	TOTAL TARGET 2024
		K1	K2	K3	K4	TARGET (BMN)			
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6			
5103	Bandar Lampung	101	12	468	0	581		581	

NO	KANWIL DJKN / KPKNL	TOTAL CAPAIAN														Ketersediaan DIPA pada BPN
		K1						K2		K3		K4		JUMLAH		
		NUP	Bidang					NUP	Bidang	NUP	Bidang	NUP	Bidang	Capaian	%	
1	2	13	P1	P2	P3	P4	P5	15	16	17	18	19	20	21	22=21/11	23
5	LAMKULU	104	4	0	24	0	205	29	29	293	1,252	98	117	1,603	108.53%	0
5101	Bengkulu	21	2	0	24	0	19	8	8	15	53	98	117	197	102.60%	0
5103	Bandar Lampung	26	0	0	0	0	129	12	12	132	458	0	0	599	103.10%	0
5104	Metro	57	2	0	0	0	57	9	9	146	741	0	0	807	114.63%	0
Grand Total		104	4	0	24	0	205	29	29	293	1,252	98	117	1,603	108.53%	0

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							
	5b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	10	32	32	80	80	100	100	Max/ TLK
Realisasi	18,82	37,39	37,39	102,48	102,48	121,05	121,05	
Capaian	188,2%	116,84%	116,84%	128,10%	128,10%	121,05%	121,05%	

Isu Utama dan Implikasi (<i>Apa yang Terjadi dan Implikasinya?</i>)					
Realisasi IKU :					
No	Komponen	Bobot	Target 2024	Capaian s/d 31 Des 2024	Indeks Capaian
1	Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN (Perhitungan)	80%	34 NUP	42 NUP	121,05%
2	Target/Realisasi Evaluasi Kinerja BMN (Tindak Lanjut Rekomendasi)	20%	9 Paket	10 Paket	
Diperlukan kunjungan ke lapangan, untuk membantu pelaksanaan penyusunan laporan portofolio					
Akar Masalah (<i>Mengapa hal tersebut terjadi?</i>)					
Tantangan transisi migrasi penggunaan SIMAN v1 ke SIMAN v2, yang memerlukan proses yang lebih detail					

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan portofolio aset secara desktop pada satker Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung (BASARNAS/Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) Melakukan pendataan portofolio aset secara peninjauan langsung kepada 3 Satker 		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Survey lapangan untuk 8 (delapan) Satker (36 NUP)	Seksi PKN	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif							
	5c-N Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	25	55	55	70	70	100	100	Max/ TLK
Realisasi	25	55	55	100	100	100	100	
Capaian	100%	100%	100%	142,86%	142,86%	120% (KONVERSI 120)	120% (KONVERSI 120)	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
-	1. Menerbitkan SK Tim Inventarisasi BMN Idle 2. Pelaksanaan inventarisasi BMN Idle		
Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
-	Pelaksanaan Penyampaian Rekomendasi tindaklanjut BMN Idle	Seksi PKN	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif							
	6a-CP Persentase Saldo BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	99	97	97	93	93	88	88	Min/ PM
Realisasi	98,13	94,70	94,70	87,54	87,54	80,06	80,06	
Capaian	100,88%	102,37%	102,37%	105,87%	105,87%	109,02%	109,02%	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>				
Realisasi IKU :				
No	Jumlah BKPN 2023	Target 2024	Capaian s/d 31 Des 2024	Indeks Capaian
1	321 BKPN	281 BKPN	257 BKPN	109,02%
Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>				
<ol style="list-style-type: none"> Lokasi debitur yang relatif jauh dan terpencar (terutama yang berada di luar wilayah kerja KPKNL Bandar Lampung) sehingga membutuhkan manajemen biaya, waktu dan personil yang lebih efisien. Memerlukan kunjungan lebih dari satu kali untuk meyakinkan debitur untuk melakukan penyelesaian hutang. Debitur kelompok tani yang pembayarannya mengandalkan musim panen. Piutang negara sebagian tidak ada barang jaminannya. 				

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<ol style="list-style-type: none"> Profiling BKPN Pemanggilan kembali debitur dengan Surat Panggilan Melakukan penelitian lapangan barang jaminan Melakukan penagihan langsung kepada debitur Melakukan sosialisasi keringanan utang Crash Program Koordinasi dengan penyerah piutang 		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
Melanjutkan tindakan/kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya	Seksi PN	2024



**RINCIAN REALISASI SALDO *OUTSTANDING* BKPN
PER 30 SEPTEMBER 2024
(POLARISASI : *MINIMIZE*)**

No	Jumlah BKPN 2023	Target 2024	Target Q3	Capaian s/d 30 September 2024	Indeks Capaian	Keterangan
1	321 BKPN	286 BKPN (88%)	300 BKPN (93%)	281 BKPN (87,54%)	105,87%	(Adendum Target Q4)

**RINCIAN REALISASI SALDO *OUTSTANDING* BKPN
PER 31 DESEMBER 2024
(POLARISASI : *MINIMIZE*)**

No	Jumlah BKPN 2023	Target 2024 (Awal Tahun)	Target Q4 (Adendum)	Capaian s/d 31 Desember 2024	Indeks Capaian	Keterangan
1	321 BKPN	286 BKPN (89%)	281 BKPN (88%)	257 BKPN (80,06%)	109,02%	-



**Ralat atas Perubahan Target IKU
Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara**

No	Kanwil/KPKNL	Saldo Awal	Target Awal	Target Awal	Realisasi	Status Adendum	Target Baru	Target Baru
		Raw	Q4 (%)	Q4 (Raw)	Q3 (Raw)	untuk Q4	Q4 (Raw)	Q4 (%)
1	ACEH	252	80%	203	206	adendum	191	76%
1	Banda Aceh	97	65%	63	78	-	63	65%
1	Lhokseumawe	155	90%	140	128	adendum	128	83%
2	SUMATERA UTARA	734	83%	610	621	adendum	608	83%
2	Kisaran	46	71%	34	33	adendum	33	71%
2	Medan	594	86,53%	514	513	adendum	513	86%
2	Padangsidempuan	46	48%	22	34	-	22	48%
2	Pematangsiantar	48	83%	40	41	-	40	83%
3	RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEP. RIAU	821	73%	597	575	adendum	570	69%
3	Batam	174	90%	157	157	-	157	90%
3	Bukittinggi	190	65%	124	129	-	124	65%
3	Dumai	138	71%	98	95	adendum	95	69%
3	Padang	223	62%	138	113	adendum	113	51%
3	Pekanbaru	96	84%	81	81	-	81	84%
4	SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG	181	61%	111	120	adendum	107	59%
4	Jambi	40	50%	20	26	-	20	50%
4	Lahat	8	25%	2	4	-	2	25%
4	Palembang	114	80%	89	85	adendum	85	75%
4	Pangkalpinang	19	0%	-	5	-	-	0%
5	LAMPUNG DAN BENGKULU	495	86%	425	381	adendum	381	77%
5	Bandar Lampung	321	89%	286	281	adendum	281	88%

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif							
	6b-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	30	45	45	60	60	89	89%	Max/ PM
Realisasi	45,70	75,75	75,75	120	120	120	120	
Capaian	152,3%	168,33%	168,33%	200%	200%	134,83%	134,83%	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>
<p>Isu Utama:</p> <p>Implikasi:</p>

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
-

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
1. Menerima seluruh permohonan lelang yang masuk ke KPKNL Bandar Lampung		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
-	Jabfung Pelelang	2024



RINCIAN PRESENTASE PRODUKTIVITAS LELANG PER 31 DESEMBER 2024

C MONITORING PRODUKTIVITAS LELANG S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2024

Kanwil/KPKNL	Indeks Laku Lot Lelang per Jenis Lelang [A]				Realisasi Frek. Lelang [B]			Nilai Produktivitas			
	Persentase Lot Lelang Laku				NILAI [A] (Max 120%)	Target Frek. Lelang	Realisasi Frek. Lelang	NILAI [B] (Max 120%)	Target	Realisasi [A] x 40% + [B] x 60%	% Capaian
	Sukarela	Wajib	E ksekusi Ps6 UUHT	E ksekusi Lainnya							
KPKNL Bandar Lampung	69,39%	90,45%	9,19%	43,52%	120,00%	1.174	1.667	120,00%	89,00%	120,00%	134,83%

Pejabat Lelang	Indeks Laku Lot Lelang per Jenis Lelang [A]				Realisasi Frek. Lelang [B]			Nilai Produktivitas			Masa Kerja (bulan)	
	Persentase Lot Lelang Laku				NILAI [A] (Max 120%)	Target Frek. Lelang	Realisasi Frek. Lelang	NILAI [B] (Max 120%)	Target	Realisasi [A] x 40% + [B] x 60%		% Capaian
	Sukarela	Wajib	E ksekusi Ps6 UUHT	E ksekusi Lainnya								
KPKNL Bandar Lampung												
Dhanu Abdul Khobier, S.E., M.M.	0,00%	0,00%	10,27%	8,33%	119,33%	215	437	120,00%	89,00%	119,73%	134,53%	11
Wenny Yuliant, S.E.	80,00%	95,38%	8,60%	76,92%	120,00%	235	385	120,00%	89,00%	120,00%	134,83%	12
Susi Deni Wijaya, S.E.	100,00%	0,00%	7,59%	0,00%	95,08%	98	80	81,77%	89,00%	87,09%	97,86%	5
Arifin, S.E.	0,00%	0,00%	17,27%	45,16%	120,00%	78	116	120,00%	89,00%	120,00%	134,83%	4
Yoga Sulistiono, S.E.	0,00%	50,00%	15,07%	33,33%	120,00%	59	45	76,66%	89,00%	94,00%	105,61%	3

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	7a-CP Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	16	16	16	16	16	16	16	Min/ PM
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>
Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>
-

Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
Memastikan Penilaian telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan lebih memperhatikan analisis pasar terhadap objek penilaian untuk memastikan hasil penilaian dapat diterima oleh Pasar. Sehingga hasil penilaian dapat digunakan untuk mendukung kebijakan terkait pengelolaan BMN		
Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
-	Jabfung Penilai	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	45	60	60	80	80	90	90	Max/ TLK
Realisasi	56,30	81,50	81,50	108,71	108,71	119	119	
Capaian	125,10%	135,83%	135,83%	135,89%	135,89%	132,22%	132,22%	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<p>IKU ini mengukur 2 (dua) komponen, yaitu :</p> <p>A. Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan</p> <p>B. Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai</p>	<p>Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang bersifat massive, dimana diklat ini bisa diikuti oleh semua pegawai tanpa terkecuali, diklat dapat dilaksanakan secara online ataupun offline.</p>		
Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
-	-	Subbagian Umum	2024



RINCIAN PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PER 31 DESEMBER 2024

3. Perhitungan Capaian IKU

Jnit : Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

Periode : Desember 2024

No	Unit Kerja	Capaian Utama			Capaian Tambahan			Capaian IKU
		Jumlah Bawahan Yang Telah Memenuhi Kriteria	Jumlah Bawahan (Sesuai Lingkup IKU)	%	Jumlah Bawahan Yang Telah Melebihi Kriteria	Jumlah Bawahan (Sesuai Lingkup IKU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	44	44	100,00%	44	44	20,00%	120,00%
2	KPKNL Bengkulu (Komponen B)	26	26	100,00%	26	26	20,00%	120,00%
3	KPKNL Bandar Lampung (Komponen B)	33	33	100,00%	33	33	20,00%	120,00%
4	KPKNL Metro (Komponen B)	22	22	100,00%	22	22	20,00%	120,00%

Persentase Pengembangan Kompetensi pegawai s.d Desember 2024

A. Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan

Parameter		Nilai
Intensitas Pelaksanaan Kegiatan	6 kegiatan	120
Waktu Kepatuhan pelaporan	sebelum batas waktu	110
Capaian Komponen A		118

B. Kualitas Pemenuhan Standard JP bagi Pegawai adalah 120

Perhitungan Realisasi IKI Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah $(\text{Capaian Komponen A} + \text{Capaian Komponen B})/2$

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/ TLK
Realisasi	100	97,61	97,61	98,25	98,25	98,39	98,39	
Capaian	117,65%	114,84%	114,84%	115,59%	115,59%	115,75%	115,75%	

Isu Utama dan Implikasi (<i>Apa yang Terjadi dan Implikasinya?</i>)						
<p>IKU ini mengukur 3 (tiga) komponen, dengan realisasi per 31 Des 2024 yaitu :</p> <p>A. Pengelolaan Kinerja Organisasi (seksi KI) : 99,78</p> <p>B. Pengelolaan Kinerja Pegawai (subbag Umum) : 95,84</p> <p>C. Pengelolaan Manajemen Risiko (seksi KI) : 99,25</p>						
No	Komponen IKMR	Skor	Bobot	Nilai	Total Nilai	Periode
1	Pengelolaan Kinerja Organisasi	99,78	30%	29,93	98,39	DESEMBER
2	Pengelolaan Kinerja Pegawai	95,84	30%	28,75		
3	Kualitas Manajemen Risiko	99,25	40%	39,7		
<p>Sesuai ND Kakanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Nomor : ND-60/WKN.05/2025 tanggal 14 Januari 2025 hal Penyampaian Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2024</p>						

Akar Masalah (<i>Mengapa hal tersebut terjadi?</i>)
-

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
<p>Melakukan pemantauan dan penyampaian informasi tindakan2 yang harus dilaksanakan pegawai terkait kontrak kinerja.</p> <p>Melaksanakan tahapan-tahapan dalam pengelolaan kinerja organisasi dan manajemen risiko</p>

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
-	Seksi KI Subbag Umum	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	105,26 ^{DM1}	105,26 ^{DM2}	120	103,60	103,60	120	120	
Capaian	105,26%	105,26%	120%	103,60%	103,60%	120%	120%	
Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>					Tindakan yang Telah Dilaksanakan			
Masih belum dibukanya capaian output pada aplikasi sakti sehingga tidak dapat diketahui capaian anggaran KPKNL Bandar Lampung baik tiap bualan ataupun triwulan					1. Optimalisasi pengelolaan anggaran pada setiap periode			
					Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode	
Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>								

Slide 29

DM1 Ada revisi capaian dari subbag umum

Dian Marudut; 10/10/2024

DM2 Ada revisi capaian dari subbag umum

Dian Marudut; 10/10/2024



RINCIAN INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2024

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	017	015	537902	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG	Nilai	100.00	94.66	98.94	0.00	0.00	100.00	98.34	78.57	80%	0.00	98.22
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.20	19.79	0.00	0.00	10.00	24.59				
					Nilai Aspek	97.33				99.47						

The screenshot shows a web interface for monitoring budget execution. It includes a search bar, a table with columns for 'No.', 'Kode Satuan Kerja', 'Satuan Kerja', 'NK Perencanaan Anggaran', 'NK Pelaksanaan Anggaran', and 'Nilai Kinerja Anggaran'. The table shows a value of 99.22 for both planning and execution budget performance, resulting in a final performance score of 99.22.

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian 120} - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95 - 91) / (120 - 100)$
 ** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$
 $= (91 - 80) / (100 - 80)$

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	10	10	10	10	10	10	10	Min/ TLK
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<p>Terdiri atas: Deviasi Data PNBP Lelang = 0% dari Target 10% Dengan catatan, capaian yang dihitung belum termasuk pelunasan lelang di akhir bulan yang sisanya akan dilunasi pada awal bulan. Sehingga akan ada perubahan data/updating sesuai dengan data pada dropbox dan OMSPAN. Deviasi Data PNBP Piutang Negara = 0% dari Target 10%</p>	<p>Rekonsiliasi data antara dropbox dengan OMSPAN serta focus PN dan OMSPAN.</p>		
Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
-	-	Subbag Umum Seksi HI	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Komunikasi publik yang efektif							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ AVG
Realisasi	110	110	110	112	112	100	100	
Capaian	137,5%	137,5%	137,5%	140%	140%	125%	125%	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>	Tindakan yang Telah Dilaksanakan		
<p>Komponen dari perhitungan capaian terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ketepatan waktu penyampaian Laporan Informasi publik -Ketepatan waktu penyampaian Informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan -Penyediaan dan pemutakhiran Layanan Informasi publik pada website 	<ul style="list-style-type: none"> -Menyampaikan Laporan tepat waktu -Melakukan penyediaan dan pemutakhiran layanan Informasi publik pada website sesuai form yang tersedia 		
Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>	Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
-	-	Seksi HI	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11a-N Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max/ TLK
Realisasi	5	15	15	20	20	98,13	98,13	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	119,67%	119,67%	

Isu Utama dan Implikasi <i>(Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)</i>					
NO	PERIODE	TARGET	REALISASI CAPAIAN	FORMULA	BUKTI DUKUNG
1	TRIWULAN I	5	5	Q1 (5) Penyampaian Laporan Efektivitas Pengendalian Intern/LEPI	
2	TRIWULAN II	15	15	Q2 (15) = Efektivitas Pengendalian Intern Tahun 2023 serta rencana kegiatan pemantauan dan scenario risiko kecurangan Tahun 2024 --> dokumen bukti: Laporan Efektivitas Pengendalian Intern/LEPI (5%), PMEPI (5%), dan Laporan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario Semester II 2023 (5%)	
3	TRIWULAN III	20	20	Q3 (20) = Hasil pemantauan pengendalian intern pada Semester I Tahun 2024 --> dokumen bukti: LHPPU Semester I 2024 (20%)	
4	TRIWULAN IV	82	98,13	Q4 (82) = Pemenuhan standar efektivitas UKI --> dokumen bukti: hasil penilaian IKU indeks efektivitas UKI	ND-1077 (Kanwil) tanggal 15 Nov 2024 hal Penyampaian Penilaian Indeks Efektivitas UKI
Penghitungan: Nilai Komponen Pengungkit (25%) + Nilai Komponen Proses (25%) + Nilai Komponen Hasil (50%)					
Akar Masalah <i>(Mengapa hal tersebut terjadi?)</i>					
-					

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Seksi KI telah menyampaikan dokumen-dokumen : Laporan Efektivitas Pengendalian Intern/LEPI, PMEPI dan Laporan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario Semester II 2023 .

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
-	Seksi KI	2024

KPKNL BANDAR LAMPUNG	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11b-N Tingkat capaian Unit Kerja dalam keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/ K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	120	120	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Isu Utama dan Implikasi (<i>Apa yang Terjadi dan Implikasinya?</i>)
<p>Target pada periode Q2 2024 adalah Indeks Komponen II = Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian (<i>Submit</i>) Dokumen pada Aplikasi DIA</p> <p>100 = Tidak Melebihi Batas Waktu yang disampampaikan Biro Organta 0 = Melebihi Batas Waktu yang disampaikan Biro Organta</p>

Tindakan yang Telah Dilaksanakan
<p>1. Implementasi Keberlanjutan Program ZI dengan ketersediaan dokumen mulai (Y-1) s.d tahun penilaian berlangsung (Y) antara lain sebagai berikut : SK Tim Kerja ZI-WBK/WBBM, Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM, Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Monev Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM secara berkala (Undangan, notula, daftar hadir). Total dokumen terkait implementasi keberlanjutan Program ZI = 6 Dokumen</p> <p>2. Melakukan penyampaian (<i>Submit</i>) Dokumen pada Aplikasi DIA</p>

Akar Masalah (<i>Mengapa hal tersebut terjadi?</i>)
-

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung jawab	Periode
-	Semua Seksi dan Jabfung	2024



TERIMA KASIH





**Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

Laporan Pemantauan Risiko Berkala **KPKNL BANDAR LAMPUNG**

Periode s.d. Triwulan IV Tahun 2024



Bandar Lampung, 3



25





Peta Risiko Sesuai Addendum KPKNL Bandar Lampung

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti terjadi	7 2.2 6.1	12	17	22 3.3 6.2	25
	4 Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	3 Kadang Terjadi	3 5.3 8.2 8.1	8 2.1 4.1	13	18 11.2	23
	2 Jarang Terjadi	2 9.1	6 1.1	11 3.1 11.1	16	21
	1 Hampir Tidak terjadi	1 10.1	5 5.2 7.1 5.1	10 1.3 9.2	15 1.2	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20 – 25	Merah
Tinggi	16 – 19	Oranye
Sedang	12 – 15	Kuning
Rendah	6 – 11	Hijau
Sangat Rendah	1 - 5	Biru



Peta Risiko Aktual Akhir Triwulan IV KPKNL Bandar Lampung

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak					
		1	2	3	4	5	
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti terjadi	6.2 7	12	17	22	25
	4	Sering Terjadi	2.2 4	9	14	19	24
	3	Kadang Terjadi	3.3 3 3.1	8	13	18	23
	2	Jarang Terjadi	3.2 4.1 1.1 6.1 11.1	6 11.2	11	16	21
	1	Hampir Tidak terjadi	10.1 8.2 1.3 8.1 9.2 5.3 5.1 5.2 2.1 7.1	5	10	15	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20 – 25	Merah
Tinggi	16 – 19	Oranye
Sedang	12 – 15	Kuning
Rendah	6 – 11	Hijau
Sangat Rendah	1 - 5	Biru



Ikhtisar Perubahan Besaran Risiko KPKNL Bandar Lampung Tahun 2024

Prioritas	No. RE	Risk Event	P24	Q4
SO #6		<i>Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif</i>		
1	6.2	Pelaksanaan Lelang Tidak Ada Peminat	22	7
SO #3		<i>Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal</i>		
2	3.3	Tahapan pengurusan piutang negara tidak dapat terlaksana secara optimal	22	3
SO #11		<i>Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah</i>		
3	11.2	Tidak terpenuhinya penilaian keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM dengan memadai	18	6
SO #1		<i>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan</i>		
4	1.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungi), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh UKI, Itjen dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	15	1
SO #3		<i>Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal</i>		
5	3.1	Adanya pembatalan lelang	11	3
SO #11		<i>Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah</i>		
6	11.1	Unit Kepatuhan Internal (UKI) melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern dengan tidak sesuai dengan KMK 477 dan arahan lainnya yang telah ditetapkan	11	2



Ikhtisar Perubahan Besaran Risiko KPKNL Bandar Lampung

Prioritas	No. RE	Risk Event	P24	Q4
SO #3		<i>Pengelolaan Piutang dan lelang yang optimal</i>		
7	3.2	Terdapat lelang laku atas objek lelang dengan nilai limit diatas 5 Milyar	11	2
SO #1		<i>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan</i>		
8	1.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	10	1
SO #9		<i>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</i>		
9	9.2	Adanya kesalahan pencatatan pada aplikasi oleh Bendahara Penerimaan	10	1
SO #2		<i>Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa</i>		
10	2.1	Pengumpulan data terkait tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tidak akurat	8	5
SO #4		<i>Birokrasi dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien</i>		
11	4.1	Jeda waktu yang panjang antara verifikasi dokumen dengan pelaksanaan survei lapangan (penilaian)	8	2
SO #6		<i>Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif</i>		
12	6.1	Banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih	7	2



Ikhtisar Perubahan Besaran Risiko KPKNL Bandar Lampung

Prioritas	No. RE	Risk Event	P24	Q4
SO #2		<i>Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa</i>		
13	2.2	Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN	7	4
SO #1		<i>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan</i>		
14	1.1	Adanya BMN yang telah dilakukan perjanjian Pemanfaatan BMN tetapi belum mendapat persetujuan pengelola barang	6	2
SO #5		<i>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</i>		
15	5.1	BMN berupa tanah tidak dilengkapi dokumen perolehan	5	1
SO #5		<i>Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif</i>		
16	5.2	Jenis Aset yang tercatat pada SIMAN tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan	5	5
SO #7		<i>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</i>		
17	7.1	nilai wajar hasil penilaian BMN tidak akurat	5	5
SO #5		<i>Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif</i>		
18	5.3	Adanya aset yang berpotensi idle pada satker K/L	3	1



Ikhtisar Perubahan Besaran Risiko KPKNL Bandar Lampung

Prioritas	No. RE	Risk Event	P24	Q4
SO #8		<i>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</i>		
19	8.1	Kinerja individu pegawai tidak mendukung tercapainya kinerja unit/organisasi	3	1
SO #8		<i>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</i>		
20	8.2	Tidak sesuainya hard competency pegawai dengan bidang tugas	3	1
SO #9		<i>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</i>		
21	9.1	Penarikan dana tidak sesuai dengan rencana	2	1
SO #10		<i>Komunikasi publik yang efektif</i>		
22	10.1	Ketidaktepatan waktu tindak lanjut permintaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN	2	1



Laporan Pemantauan Triwulan IV

1

Sasaran	<i>Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif</i>
Risiko 6.2	Banyaknya lelang TAP
IRU	Persentase lelang laku

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

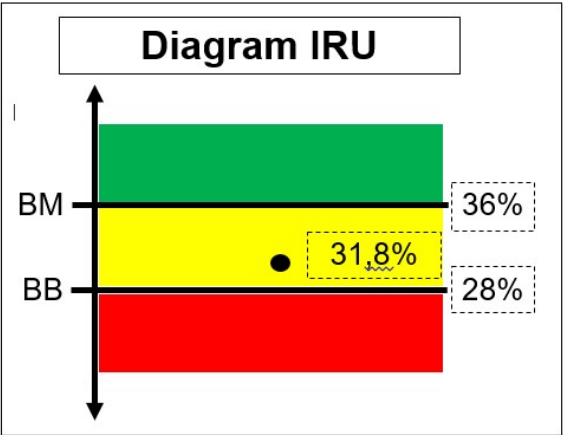
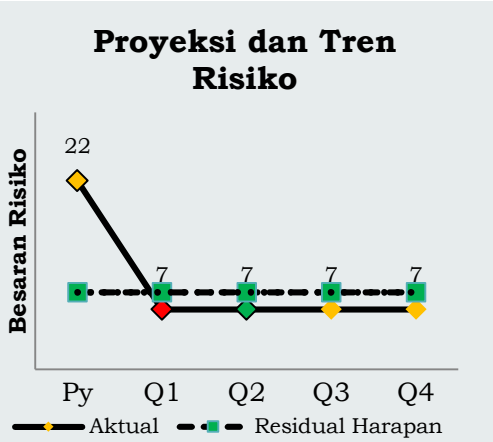
Pada awal tahun, risiko ini memiliki level kemungkinan 5 (hampir pasti terjadi) dan level dampak 4 (signifikan) sehingga besaran risikonya sebesar 22 (tinggi).

Secara aktual pada Triwulan IV, persentase lelang TAP dibandingkan total lelang sebesar 79,51% (2.278 dari 2.865 Risalah lelang). Karena frekuensi masih >50%, level kemungkinan tetap 5 (hampir pasti terjadi). Capaian target bea lelang pada Triwulan IV 2024 adalah 119,71% dari target Triwulan IV 2024 sebesar 100 %, membuat level dampak menjadi 1 (tidak signifikan).

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menjadi 7.

Proyeksi Risiko:

Level risiko turun jika dibandingkan dengan proyeksi awal tahun dikarenakan dengan meningkatnya frekuensi lelang yang berpotensi menambah frekuensi lelang laku/produktivitas lelang.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemohon terkait layanan dan informasi lelang pada Pemkab Pringsewu dan calon peserta lelang

Mitigasi yang akan Dilaksanakan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pemohon terkait layanan dan informasi lelang	Pejabat Fungsional Pelelang	Q2-Q4

Rekomendasi Kendati target kinerja triwulan IV telah terpenuhi, frekuensi lelang TAP masih lebih dari 50% yang menjadikan level kemungkinan risiko ini hampir pasti terjadi. Oleh karena itu, Penanggung Jawab Risiko diimbau untuk terus melakukan upaya sosialisasi kepada pemohon maupun masyarakat calon peserta lelang.

2

Sasaran	Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal
Risiko 3.3	Tahapan pengurusan piutang negara tidak dapat terlaksana secara optimal
IRU	Persentase piutang tak tertagih (PSBDT)

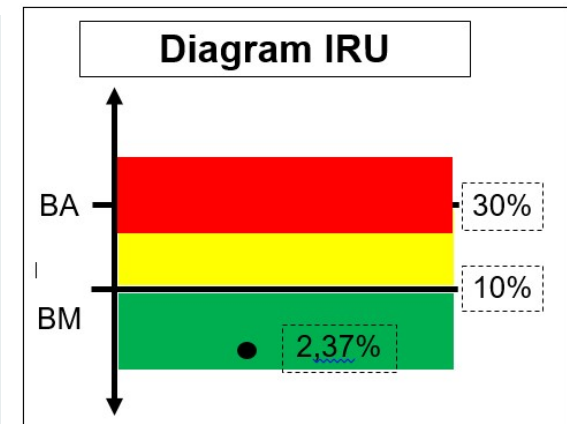
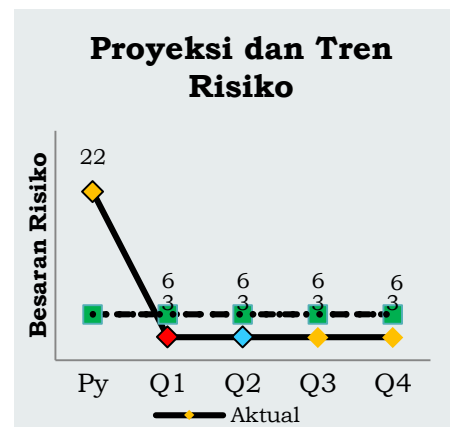
Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada awal tahun, risiko ini memiliki level kemungkinan 5 (hampir pasti terjadi) dan level dampak 4 (signifikan) sehingga besaran risikonya sebesar 22 (tinggi).

Secara aktual pada Triwulan IV, terdapat 10 BKPN sementara tidak dapat tertagih (PSBDT) dan 47 BKPN Crash Program dan 7 Pelunasan dari total 321 BKPN 2024, tetapi berhubung terdapat BKPN aktif yang masih ada dalam masa penagihan berjumlah 257 BKPN, hal ini membuat level kemungkinan adanya piutang tidak terlaksana secara optimal tetap 3 (kadang terjadi). Capaian kinerja penurunan outstanding piutang negara telah mencapai 138,95% dari target Triwulan IV sebesar 100%. Ketercapaian target kinerja membuat level dampak turun menjadi 1 (tidak signifikan). Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menjadi 3.

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap atau turun pada triwulan berikutnya dengan seiring makin banyaknya potensi pelunasan piutang dan penyelesaian BKPN.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Profiling BKPN

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

- (seluruh rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan)

Penanggung Jawab

Seksi Piutang Negara

Waktu Pelaksanaan

-

Rekomendasi

Meskipun tren risiko turun menjadi sangat rendah, tetap harus dilakukan upaya pengawasan oleh Penanggung Jawab Risiko secara berkala sehingga risiko operasional ini dapat diantisipasi dan tidak akan mengalami kenaikan besaran kembali.



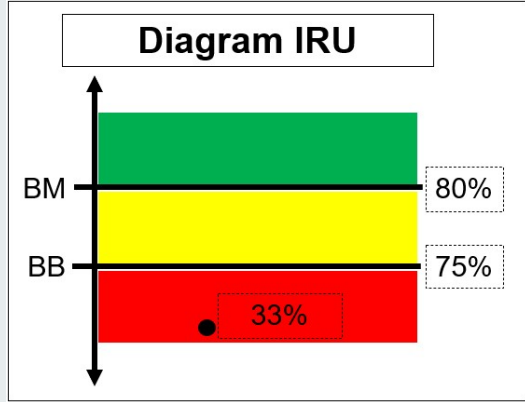
Sasaran	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah
Risiko #11.2	Tidak terpenuhinya penilaian keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM dengan memadai
IRU	Kelengkapan dokumen menurut pemantauan internal KPKNL, TPE-1, atau TPK

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada awal tahun, risiko ini memiliki besaran risiko 18 dengan level kemungkinan 3 (kadang terjadi) dan level dampak 4 (signifikan). Sesuai ND Sekretaris DJKN Nomor : ND-4317/KN.1/2024 tanggal 22 November 2024 hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI-WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan DJKN Tahun 2024, disebutkan bahwa KPKNL Bandar Lampung berhasil mempertahankan keberlanjutan predikat ZI WBK sehingga diproyeksikan seluruh rencana telah terimplementasi. Oleh karena itu, level kemungkinan menurun menjadi 2 (jarang terjadi). Sementara itu, dikarenakan Hasil Monev WBK/WBBM mencapai 120 dari target sebesar 100, level dampak turun menjadi 2 (Minor). Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menurun menjadi 6 dengan level risiko 2 (rendah).

Proyeksi Risiko:

Tren risiko diproyeksikan tetap pada tahun berikutnya dengan terpenuhinya rencana kerja dan didapatnya hasil monev LKE dari evaluator yang menunjukkan level dampak aktual.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Tim Pembangunan ZI-WBK tiap bulan
- Melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

- Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja Tim Pembangunan ZI-WBK tiap bulan.
- Melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi

Penanggung Jawab

Sekretariat Tim Pembangunan ZI-WBK

Waktu Pelaksanaan

Q2 - Q4

Rekomendasi

Untuk memenuhi syarat penilaian ZI-WBK, tiap bidang dalam Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK harus melaksanakan rencana kerjanya sesuai dengan *timeline* yang telah disusun di awal tahun. Selain itu, proses pengunggahan dokumen sebaiknya segera dilakukan sehingga KPKNL dapat menerima hasil evaluasi dari Kanwil lebih cepat.

4

Sasaran	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
Risiko 1.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungi), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum
IRU	Frekuensi pengaduan terkait pengenaan biaya di luar ketentuan yang diterima KPKNI

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

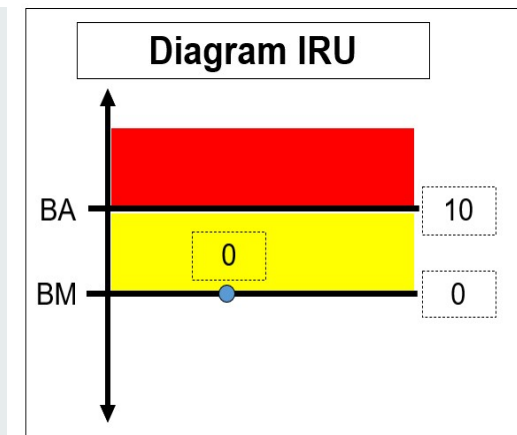
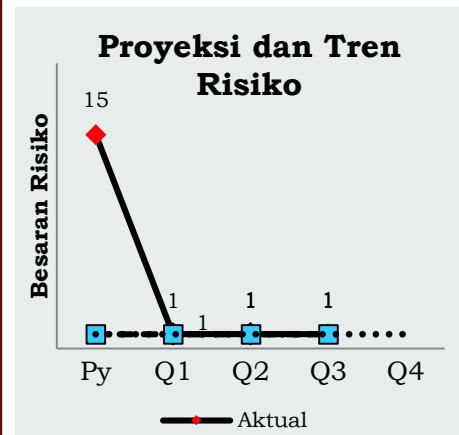
Pada awal tahun, risiko ini memiliki level kemungkinan 1 (hampir tidak terjadi) dan level dampak 4 (signifikan) sehingga besaran risikonya sebesar 15 (sedang).

Secara aktual pada Triwulan IV, tidak terdapat pegawai yang dikenai hukuman disiplin/dilaporkan karena melakukan pelanggaran yang bersifat *fraud*. Selain itu, tidak ada pemberitaan negatif atas unit kerja baik di media massa lokal maupun nasional. Oleh karena itu, dampak aktual dari risiko ini adalah 1 (tidak signifikan).

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV adalah 1 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap pada tahun berikutnya dengan tidak adanya pengenaan biaya di luar ketentuan oleh oknum pegawai sehingga tidak ada dampak yang dirasakan unit kerja atas kejadian ini.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Pelaksanaan sosialisasi terkait kode etik melalui morning call HELAU
- Pemasangan X-Banner biaya pelayanan/PNBP di Area Pelayanan Terpadu (APT)

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

(seluruh rencana mitigasi risiko telah terlaksana)

Penanggung Jawab

Subbagian Umum

Waktu Pelaksanaan

Rekomendasi

Penanggung jawab risiko diimbau untuk tetap melakukan upaya pencegahan pengenaan biaya di luar ketentuan baik dengan sosialisasi langsung atau tertulis.

5

Sasaran	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal
Risiko 3.1	Adanya pembatalan lelang
IRU	Persentase lelang batal

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

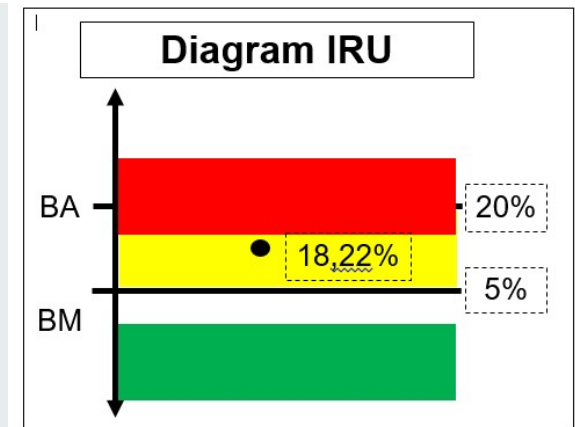
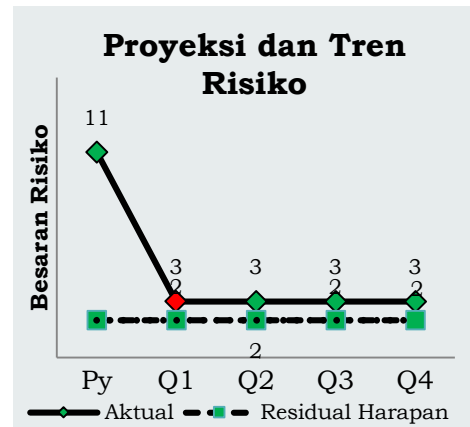
Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki level kemungkinan 2 (jarang terjadi) dan level dampak 3 (moderat) sehingga besaran risikonya sebesar 11 (rendah).

Hingga Triwulan IV 2024 persentase permohonan lelang yang dibatalkan adalah sebesar 18,93% sehingga level kemungkinan ditentukan tetap 3 (kadang terjadi). Dari sisi dampak, persentase capaian pokok adalah 131,05% dari target Q4 yang sebesar 100% sehingga, level dampak aktual Triwulan IV diputuskan 1 (tidak signifikan).

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menjadi 3 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan menurun pada triwulan IV seiring dengan bertambahnya frekuensi lelang yang diharapkan bisa menurunkan dampak pembatalan lelang dan meningkatkan nilai capaian pokok lelang.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Melaksanakan edukasi kepada pemohon lelang.
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

- Melaksanakan edukasi kepada pemohon lelang.
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Penanggung Jawab

Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang

Waktu Pelaksanaan

Q1-Q2

Rekomendasi

Penanggung Jawab Risiko diharapkan menjalankan rencana mitigasi risiko yang direncanakan pelaksanaannya pada Q3-Q4 2023 yaitu melaksanakan edukasi kepada pemohon lelang dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

6

Sasaran	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif
Risiko 9.1	Unit Kepatuhan Internal (UKI) melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern dengan tidak sesuai dengan KMK 477 dan arahan lainnya yang telah ditetapkan
IRU	Jumlah laporan pemantauan UKI yang tidak sesuai

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

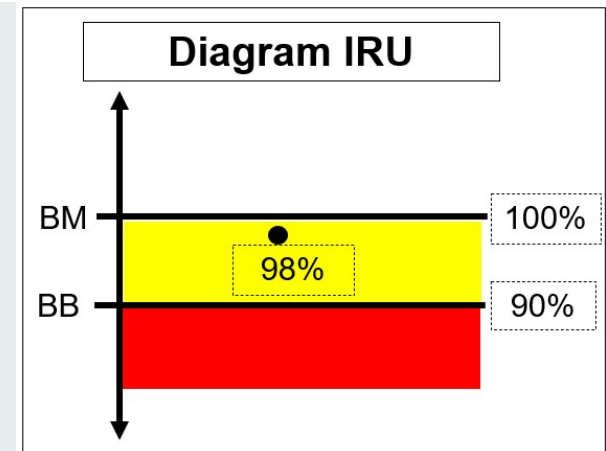
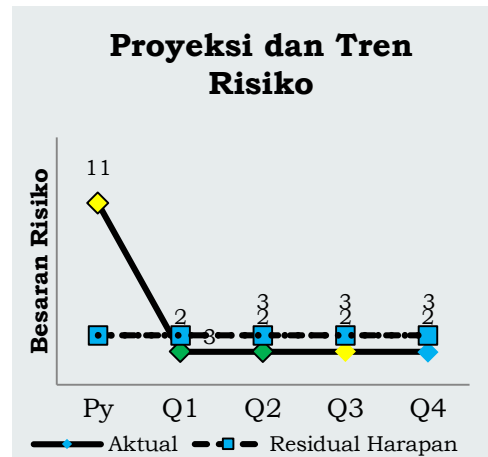
Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki level kemungkinan 2 (jarang terjadi) dan level dampak 3 (moderat) sehingga besaran risikonya sebesar 11 (sedang).

Pada Triwulan IV 2024 pelayanan yang menyalahi SOP berdasarkan LHPPU seksi KI sebesar 2 layanan sehingga level kemungkinan risiko ini diputuskan menjadi 2 (jarang terjadi). Level dampak aktual Triwulan IV diputuskan 1 (tidak signifikan) karena pada survei kepuasan pengguna layanan terakhir didapati bahwa indeks Survei Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar 3,86 atau IKM 96,44 (Sangat Baik)

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menjadi 2 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap atau menurun pada Triwulan IV seiring dengan dengan upaya pengawasan yang telah didukung perangkat pemantauan terbaru 2024.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Melakukan pemantauan secara bulanan
- Melakukan sosialisasi RPT

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

- Melakukan pemantauan secara bulanan

Penanggung Jawab

Seksi Kepatuhan Internal

Waktu Pelaksanaan

Q2- Q4

Rekomendasi

Penanggung Jawab Risiko diharapkan melakukan pemantauan secara berkala sebagaimana disepakati pada awal tahun dan sesuai dengan RPT DJKN 2024.

7

Sasaran	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal
Risiko 3.2	Terdapat lelang laku atas objek lelang dengan nilai limit diatas 5 Milyar
IRU	Persentase lelang laku di atas 5 Milyar

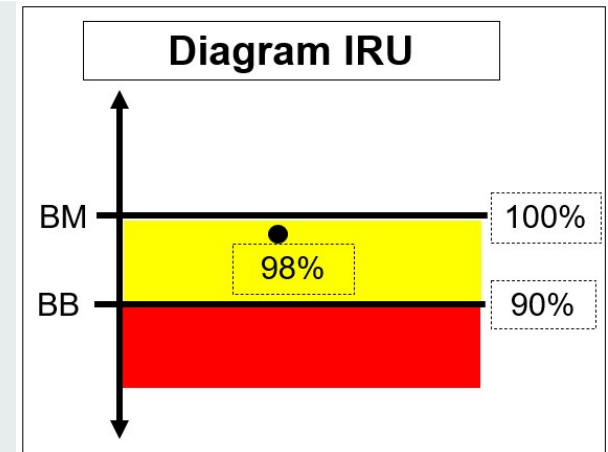
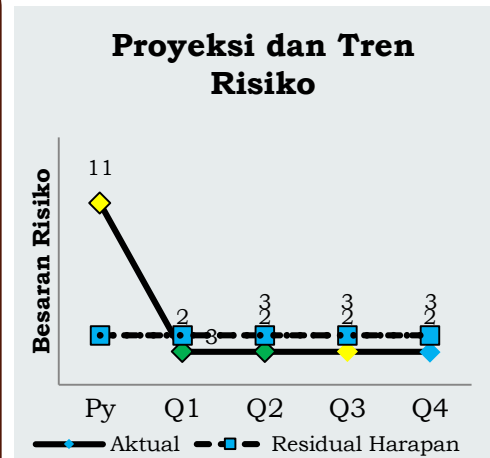
Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki level kemungkinan 2 (jarang terjadi) dan level dampak 3 (moderat) sehingga besaran risikonya sebesar 11 (sedang).

Hingga Triwulan IV 2024 persentase permohonan lelang dengan nilai limit di atas 5 miliar adalah sebanyak 79 sehingga level kemungkinan ditentukan tetap 2 (jarang terjadi). Dari sisi dampak, pokok Lelang dengan Nilai Limit di bawah 5 Milyar telah berkontribusi sebesar 67,14% pada capaian pokok lelang triwulan IV sehingga, level dampak aktual Triwulan IV diputuskan 1 (tidak signifikan). Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menjadi 2 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap atau menurun pada triwulan IV seiring dengan dengan upaya pengawasan yang telah didukung perangkat pemantauan terbaru 2024.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Melaksanakan edukasi kepada pemohon lelang.
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

- Melaksanakan edukasi kepada pemohon lelang.
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Penanggung Jawab

Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang

Waktu Pelaksanaan

Q3-Q4

Rekomendasi

Penanggung Jawab Risiko diharapkan melakukan pemantauan secara berkala sebagaimana disepakati pada awal tahun dan sesuai dengan RPT DJKN 2024.

8

Sasaran	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan
Risiko 1.3	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi
IRU	Persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

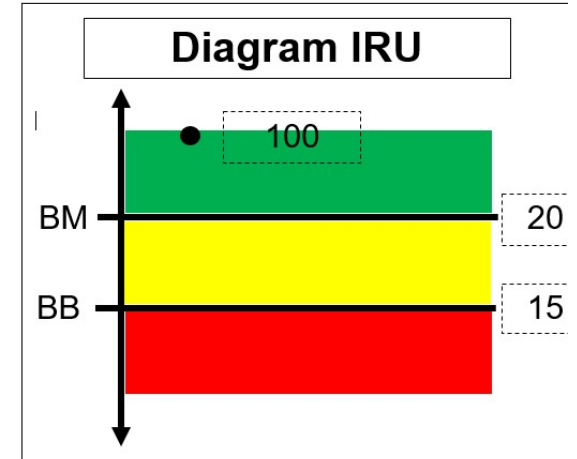
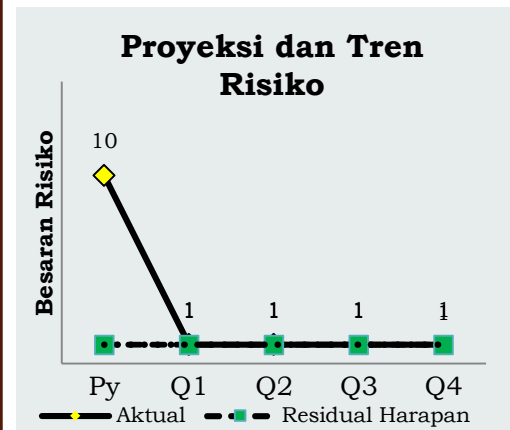
Pada awal tahun, risiko ini memiliki level kemungkinan 1 (hampir tidak terjadi) dan level dampak 3 (moderat) sehingga besaran risikonya sebesar 10 (rendah).

Pada Triwulan IV 2024, persentase pegawai yang dikenakan hukuman disiplin dan/atau pelanggaran kode etik dan perilaku adalah 0% sehingga level kemungkinan aktual ditetapkan 1 (hampir tidak terjadi). Dari sisi dampak, persentase jumlah pelanggaran Hukdis serta jumlah keluhan/pengaduan layanan terkait *fraud* adalah 0% yang membuat level dampak aktual Triwulan IV 2024 menjadi 1 (tidak signifikan).

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV adalah 1 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan turun pada triwulan berikutnya seiring dengan meningkatnya progress pengembangan kompetensi pegawai yang dapat menurunkan level dampak.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Melakukan pemantauan Kode Etik dan Perilaku
- Melakukan pemantauan pengaduan masyarakat

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

- Monitoring setia pelanggaran kode etik dan perilaku

Penanggung Jawab

Seksi KI

Waktu Pelaksanaan

Q2- Q4

Rekomendasi

Risiko telah dimitigasi dengan optimal pada Triwulan IV. Namun, guna menjaga level risiko, diperlukan langkah mitigasi dari sisi dampak. Oleh karena itu, Penanggung Jawab Risiko perlu memperhatikan laporan pemantauan kode etik dan perilaku

9

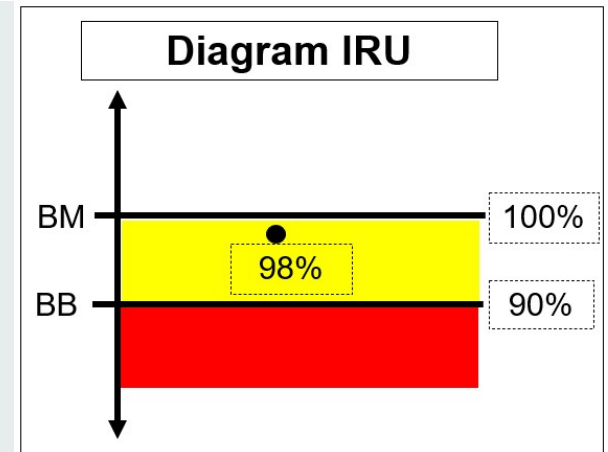
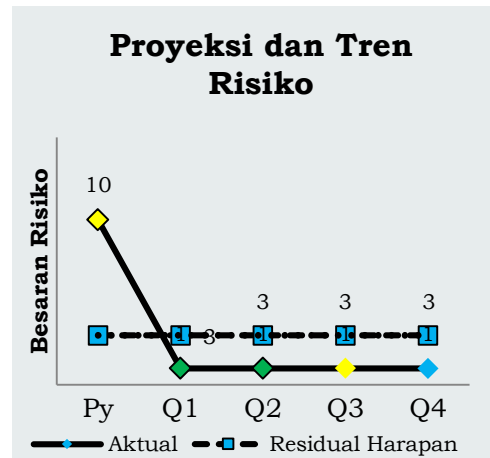
Sasaran	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
Risiko 9.2	Adanya kesalahan pencatatan pada aplikasi oleh Bendahara Penerimaan
IRU	Persentase deviasi PNBP

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki level kemungkinan 1 (hampir tidak terjadi) dan level dampak 3 (moderat) sehingga besaran risikonya sebesar 10 (rendah). Pada Triwulan IV 2024 tidak terdapat kesalahan pencatatan PNBP oleh bendahara penerimaan selama Triwulan IV 2024 sehingga level kemungkinan risiko ini diputuskan menjadi 1 (hampir tidak terjadi). Level dampak aktual Triwulan IV diputuskan 1 (tidak signifikan) karena IKU Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Triwulan IV adalah 0%. Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menjadi 1 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap pada triwulan IV seiring dengan dengan upaya pengawasan yang telah didukung perangkat pemantauan terbaru 2024.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Melakukan pemantauan secara bulanan
- Melakukan sosialisasi RPT

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

- Melakukan pemantauan secara bulanan

Penanggung Jawab

Seksi Hukum dan Informasi

Waktu Pelaksanaan

Q2- Q4

Rekomendasi

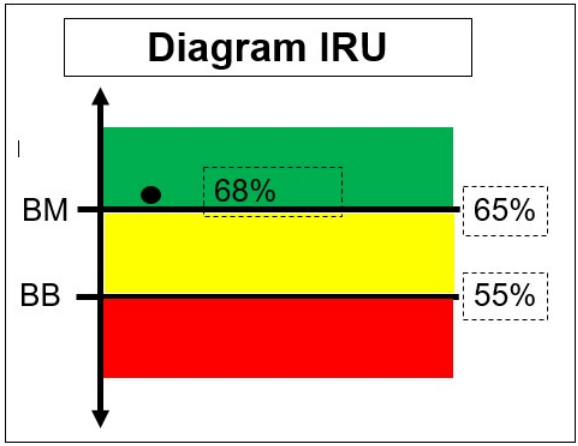
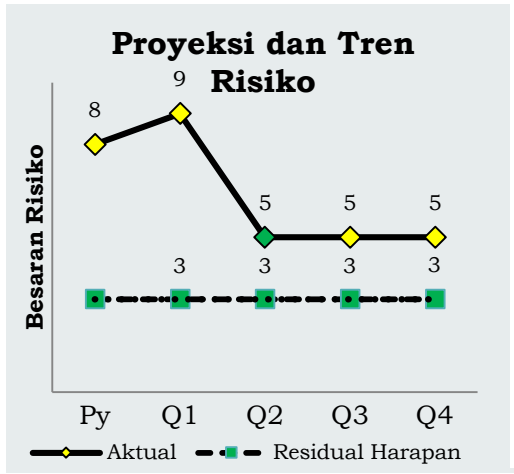
Penanggung Jawab Risiko diharapkan melakukan pemantauan secara berkala sebagaimana disepakati pada awal tahun dan sesuai dengan RPT DJKN 2024.

Sasaran	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal
Risiko 2.1	Data capaian tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tidak akurat
IRU	Persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang rendah

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada awal tahun, risiko ini memiliki level kemungkinan 3 (kadang terjadi) dan level dampak 3 (minor) sehingga besaran risikonya sebesar 8 (rendah). Pada Triwulan IV 2024, terdapat BMN hasil pendataan SBSK yang tingkat kesesuaian 82,84 % (di atas target tahunan 71,50%), sehingga level kemungkinan ditentukan 1 (hampir tidak terjadi). Selanjutnya, tidak adanya temuan aparat Pemeriksa (Itjen/BPK) level dampak ditetapkan menjadi 2 (minor). Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV adalah 5 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:
Level risiko diproyeksikan tetap atau turun pada triwulan berikutnya dengan dilakukannya reviu atas kesalahan pengisian form SBSK sehingga didapatkan data aktual atas kesesuaian BMN dengan SBSK.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Melakukan edukasi upaya optimalisasi kesesuaian SBSK untuk objek NUP di bawah 71,50%.
- Monitoring dan Evaluasi implementasi optimalisasi kesesuaian SBSK.

Mitigasi yang akan Dilaksanakan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan edukasi upaya optimalisasi kesesuaian SBSK untuk objek NUP di bawah 71,50. - Monitoring dan Evaluasi implementasi optimalisasi kesesuaian SBSK. 	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Q2 s.d. Q4

Rekomendasi
Penanggung Jawab Risiko diharapkan menjalankan rencana mitigasi risiko yang direncanakan pelaksanaannya pada Q2-Q4 2024 yaitu melakukan edukasi upaya optimalisasi kesesuaian SBSK untuk objek NUP di bawah 68 dan monitoring dan evaluasi implementasi optimalisasi kesesuaian SBSK. Dengan demikian, besaran risiko diharapkan bisa berada pada level yang diharapkan.

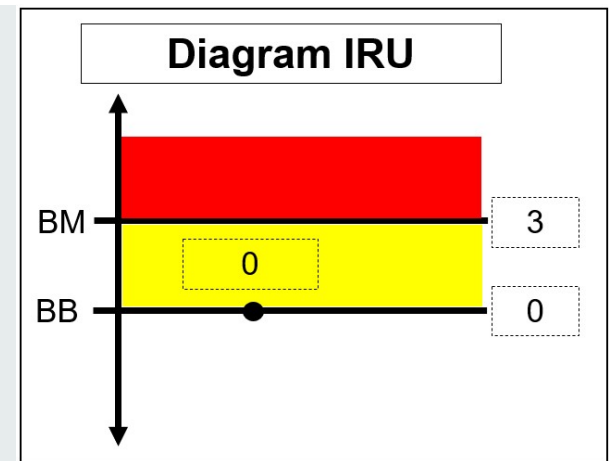
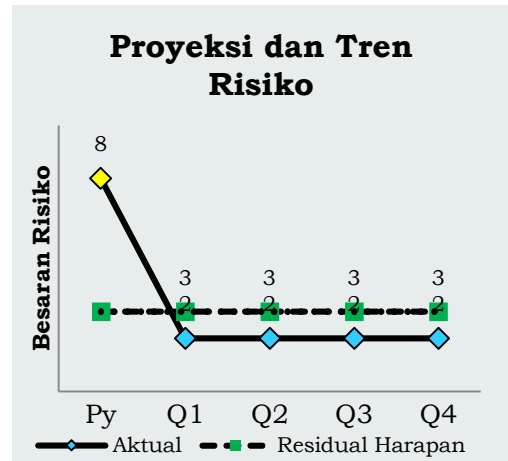
Sasaran	Birokrasi dan Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
Risiko 4.1	Jeda waktu yang panjang antara verifikasi dokumen dengan pelaksanaan survei lapangan
IRU	Frekuensi pelaksanaan survey yang lebih dari 4 minggu dari penetapan verifikasi

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada awal tahun, risiko ini memiliki level kemungkinan 3 (kadang terjadi) dan level dampak 2 (minor) sehingga besaran risikonya sebesar 8 (rendah). Hingga Triwulan IV 2024, 1 kali terdapat pelaksanaan survey lebih dari 4 minggu dari penetapan verifikasi sehingga level kemungkinan aktual ditetapkan 2 (jarang terjadi). Dari sisi dampak, tidak terdapat keluhan dari pengguna layanan terkait penilaian yang membuat level dampak aktual Triwulan IV 2024 menjadi 1 (tidak signifikan). Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV adalah 2 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap pada triwulan berikutnya dengan didukung pengawasan dan pemantauan yang baik.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Optimalisasi penunjukan penilai individu
2. Surat pemberitahuan jadwal survey lapangan kepada pemohon sebagai upaya kontrol

Mitigasi yang akan Dilaksanakan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan penilaian individu. - Penyampaian rencana survei lapangan kepada pemohon. 	Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	Semester 2

Rekomendasi Secara umum risiko telah menunjukkan tren penurunan, tetapi Penanggung Jawab Risiko diharapkan tetap memperhatikan kemungkinann terjadinya risiko ini untuk menjaga level risiko tetap rendah.

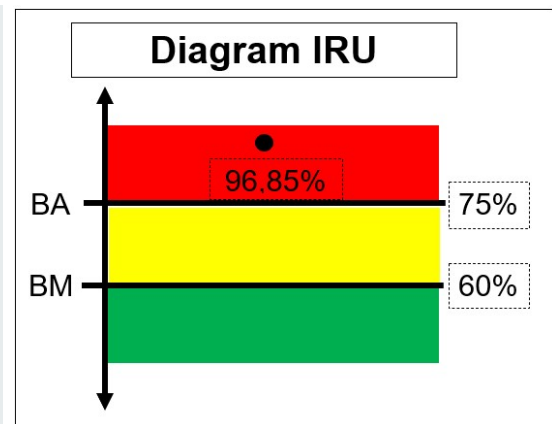
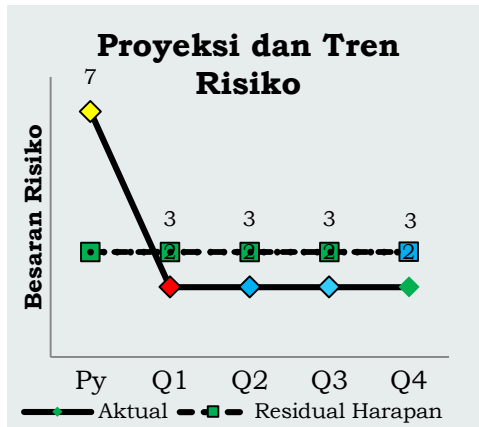
Sasaran	Penerapan tata kelola Piutang dan Lelang yang produktif
Risiko #6.1	Banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih
IRU	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki level kemungkinan 5 (hampir pasti terjadi) dan level dampak 1 (tidak signifikan) sehingga besaran risikonya sebesar 7 (rendah). Pada Triwulan IV 2024 dari 321 BKPN Aktif tahun 2024, terdapat 24 outstanding BKPN dari target Triwulan IV sebesar 14, level kemungkinan risiko ini diputuskan menjadi 2 (jarang terjadi). Level dampak aktual Triwulan IV ditetapkan tetap 1 (tidak signifikan) karena capaian PNDS Triwulan IV sebesar 380,05% dari target Triwulan IV yang sebesar 1000%. Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV turun dari proyeksi awal tahun menjadi 2 dengan level risiko sangat rendah.

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan menurun pada triwulan berikutnya seiring dengan proses penagihan yang memasuki tahap lebih lanjut dan meningkatnya PNDS.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Profiling BKPN

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

Mitigasi yang akan Dilaksanakan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
- Pemutakhiran profil BKPN	Seksi Piutang Negara	Q4

Rekomendasi Mengingat risiko ini mencapai besaran risiko tertinggi pada triwulan ini, akan diberikan perhatian khusus untuk risiko ini pada triwulan selanjutnya. Selain itu, Penanggung Jawab Risiko juga diharapkan dapat melakukan upaya optimal untuk memitigasi risiko.

Sasaran	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa
Risiko#2.2	Satuan kerja tidak tindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

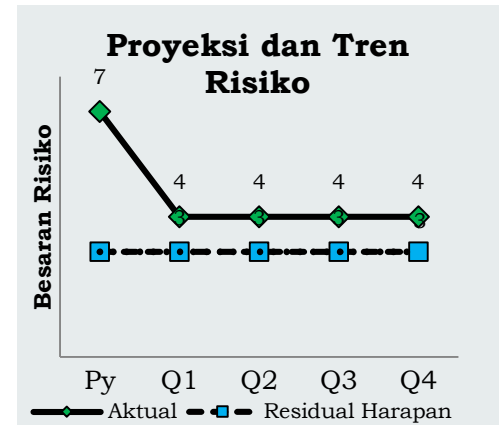
Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki besaran risiko 7 (rendah) dengan level kemungkinan 5 (hampir pasti terjadi) dan level dampak 1 (tidak signifikan).

Berdasarkan konfirmasi dengan Penanggung Jawab Risiko, terdapat dalam jumlah kecil persetujuan pengelolaan BMN yang belum tindaklanjuti dan sudah melewati waktu persetujuan sehingga level kemungkinan risiko ini diputuskan tetap 4 (sering terjadi). Dari sisi dampak, capaian nilai penerimaan PNBPN dari pengelolaan BMN mencapai 120,92%, tercapai dari target yang sebesar 100% pada Triwulan IV 2024. Akibatnya, level dampak aktual Triwulan IV diputuskan tetap menjadi 1 (tidak signifikan)

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menjadi 4 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan menurun pada triwulan IV berikutnya seiring dengan pengawasan dari Penanggung Jawab Risiko.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

-

Rekomendasi

Meskipun tren risiko menurun, tetap harus dilakukan upaya pengawasan oleh Penanggung Jawab Risiko secara berkala sehingga risiko operasional dapat diantisipasi.

Sasaran	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan
Risiko#1.1	Adanya BMN yang telah dilakukan perjanjian Pemanfaatan BMN tetapi belum mendapat persetujuan pengelola barang

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

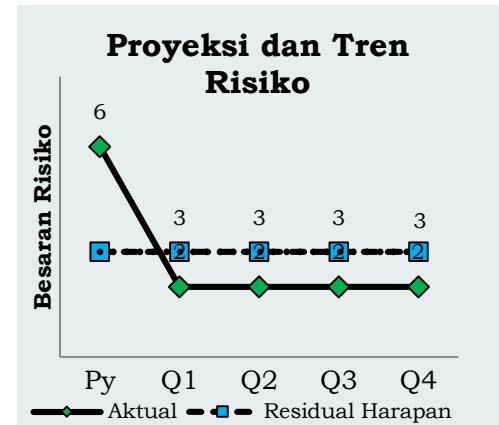
Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki besaran risiko 6 (rendah) dengan level kemungkinan 2 (jarang terjadi) dan level dampak 2 (minor).

Berdasarkan konfirmasi dengan Penanggung Jawab Risiko, terdapat beberapa satker yang melakukan pemanfaatan BMN tanpa persetujuan sehingga level kemungkinan risiko ini diputuskan tetap 2 (jarang terjadi). Dari sisi dampak, Persentase penerimaan atas BMN yang dilakukan pemanfaatan tanpa persetujuan pengelola barang tidak teridentifikasi dengan jelas dari nilai total penerimaan BMN. Akibatnya, level dampak aktual Triwulan II diputuskan tetap menjadi 1 (tidak signifikan)

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menjadi 2 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan menurun pada triwulan berikutnya seiring dengan pengawasan dari Penanggung Jawab Risiko.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

-

Rekomendasi

Meskipun tren risiko menurun, tetap harus dilakukan upaya pengawasan oleh Penanggung Jawab Risiko secara berkala sehingga risiko operasional dapat diantisipasi.

Sasaran	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif
Risiko #5.1	BMN berupa tanah tidak dilengkapi dokumen perolehan

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

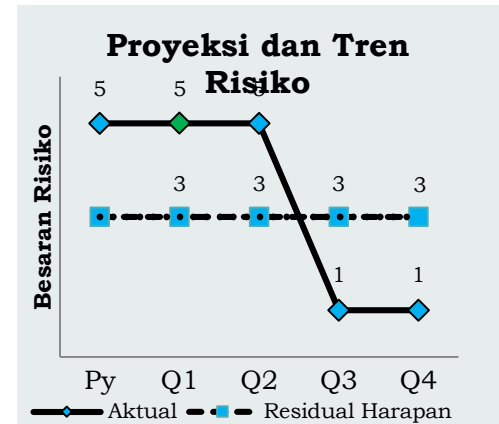
Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki besaran risiko 5 (sangat rendah) dengan level kemungkinan 1 (hampir tidak terjadi) dan level dampak 2 (minor).

Berdasarkan konfirmasi dengan Penanggung Jawab Risiko, tidak terdapat usulan bidang tanah yang akan disertifikatkan tapi tidak memenuhi syarat sehingga level kemungkinan risiko ini diputuskan tetap 1 (hampir tidak terjadi). Dari sisi dampak, capaian target sertifikasi bidang tanah adalah 103,10% pada Triwulan IV 2024. Akibatnya, level dampak aktual Triwulan IV diputuskan turun menjadi 1 (tidak signifikan).

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV turun dari proyeksi awal tahun yaitu 5 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap pada triwulan berikutnya seiring dengan pengawasan dan tindak lanjut dari Penanggung Jawab Risiko.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Koordinasi dengan pihak terkait

Rekomendasi

Risiko ini perlu diberi perhatian lebih oleh Penanggung Jawab Risiko demi menjaga tingkat risiko tetap rendah, terlebih capaian IKU sertifikasi masih belum maksimal.

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

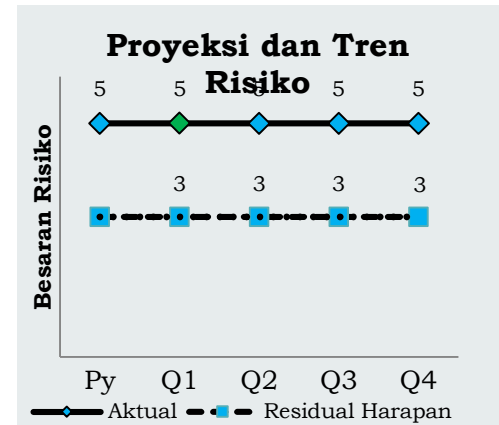
Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki besaran risiko 5 (sangat rendah) dengan level kemungkinan 1 (hampir tidak terjadi) dan level dampak 2 (minor).

Berdasarkan konfirmasi dengan Penanggung Jawab Risiko, tidak terdapat aset yang tercatat di SIMAN tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga level kemungkinan risiko ini diputuskan tetap 1 (hampir tidak terjadi). Dari sisi dampak, KPKNL aktif memberikan sosialisasi atas *entry* data di portopolio aset. Akibatnya, level dampak aktual Triwulan IV diputuskan tetap menjadi 2 (minor).

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV tetap dari proyeksi awal tahun yaitu 5 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap pada triwulan berikutnya seiring dengan pengawasan dan tindak lanjut dari Penanggung Jawab Risiko.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Koordinasi dengan pihak terkait

Rekomendasi

Risiko ini perlu diberi perhatian lebih oleh Penanggung Jawab Risiko demi menjaga tingkat risiko tetap rendah, terlebih capaian IKU sertifikasi masih belum maksimal.

Sasaran	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
Risiko 7.1	Nilai wajar hasil penilaian BMN tidak akurat
IRU	Jumlah temuan melalui kaji ulang laporan penilaian

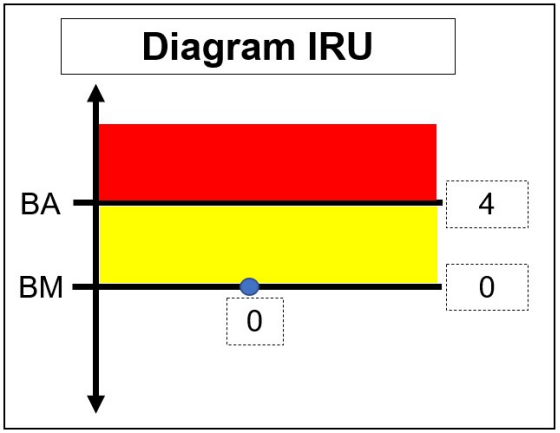
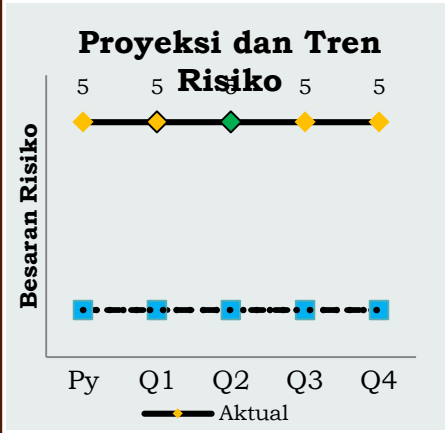
Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada awal tahun, risiko ini memiliki level kemungkinan 1 (hampir tidak terjadi) dan level dampak 2 (minor) sehingga besaran risikonya sebesar 5 (sangat rendah).

Pada Triwulan IV 2024 telah diterima hasil kaji ulang laporan penilaian untuk periode Triwulan IV 2024 yang menunjukkan bahwa rata-rata kualitas laporan penilaian KPKNL Bandar Lampung adalah 96,27% sehingga level kemungkinan nilai wajar hasil penilaian BMN tidak akurat menjadi 1 (hampir tidak terjadi). Dari segi dampak, tidak terdapat keputusan pemanfaatan BMN yang tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, level dampak risiko ini ditetapkan 2 (minor).

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV adalah 5.

Proyeksi Risiko:
Level risiko diproyeksikan menurun pada triwulan berikutnya seiring dengan upaya peningkatan kualitas laporan penilaian dari sisi administratif maupun prosedur dan penerapan metode penilaian.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Secara berkala mengirimkan laporan penilaian untuk dikaji ulang oleh Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu
2. Pelaksanaan *peer review* yang *fair* dan kondusif
3. Peningkatan kompetensi penilai melalui diklat dan webinar

Mitigasi yang akan Dilaksanakan	Penanggung Jawab	Waktu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemutakhiran data di SIP 2. Secara berkala mengirimkan laporan penilaian untuk dikaji ulang oleh Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu 3. Pelaksanaan <i>peer review</i> yang <i>fair</i> dan kondusif 	Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	Semester 2

Rekomendasi Terus melakukan pemantauan terhadap laporan penilaian guna mengantisipasi adanya kenaikan level kemungkinan dan dampak di triwulan berikutnya sehingga level risiko dapat dijaga tetap rendah.

Sasaran	Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif
Risiko #5.3	Adanya aset yang berpotensi idle pada satker K/L

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

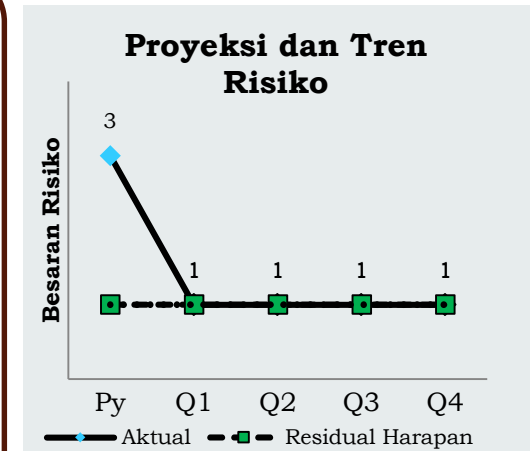
Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki besaran risiko 3 (sangat rendah) dengan level kemungkinan 3 (kadang terjadi) dan level dampak 1 (tidak signifikan).

Berdasarkan hasil pelaksanaan inventarisasi BMN Idle tercapai 100 di Triwulan IV dari target indeks 100 sehingga level kemungkinan risiko ini diputuskan turun menjadi 1 (hampir tidak terjadi). Dari sisi dampak, capaian hasil penerimaan PNPB Pengelolaan BMN mencapai 120,93% dari target triwulan IV 100 %, Akibatnya, level dampak aktual Triwulan IV diputuskan turun menjadi 1 (hampir tidak terjadi).

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV turun dari proyeksi awal tahun menjadi 1 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap atau menurun pada triwulan berikutnya seiring dengan pengawasan dari Penanggung Jawab Risiko.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

1. Komunikasi kepada satker dan pengawasan secara berkala

Rekomendasi

Meskipun tren risiko menurun, tetap harus dilakukan upaya identifikasi asset idle sehingga risiko operasional dapat diantisipasi.

Sasaran	Organisasi yang <i>Fit-For-Purpose</i>
Risiko #8.1	Kinerja individu pegawai tidak mendukung tercapainya kinerja unit/organisasi

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

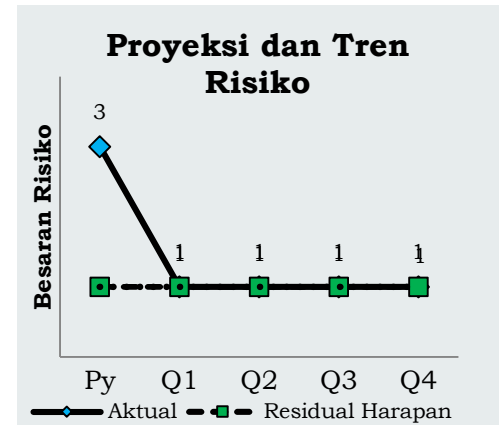
Pada awal tahun, risiko ini diproyeksikan memiliki besaran risiko 3 (sangat rendah) dengan level kemungkinan 3 (kadang terjadi) dan level dampak 1 (tidak signifikan).

Berdasarkan konfirmasi pelaporan capaian kinerja, tidak terdapat keterlambatan pelaporan dikarenakan system pelaporan dengan aplikasi KinPro Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dikoordinasi oleh Kanwil DJKN Lampung Bengkulu. Karenanya, level kemungkinan risiko ini diputuskan menjadi 1 (hampir tidak terjadi). Dari sisi dampak, persentase NKO sampai dengan Triwulan IV adalah 115,94%. Akibatnya, level dampak aktual Triwulan IV diputuskan tetap menjadi 1 (tidak signifikan).

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV turun dari proyeksi awal tahun menjadi 1 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap pada triwulan berikutnya seiring dengan pengawasan dari Penanggung Jawab Risiko.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- DKI per triwulan

Rekomendasi

Meskipun tren risiko menurun, tetap harus dilakukan upaya pengawasan oleh Penanggung Jawab Risiko secara berkala sehingga risiko operasional dapat diantisipasi.

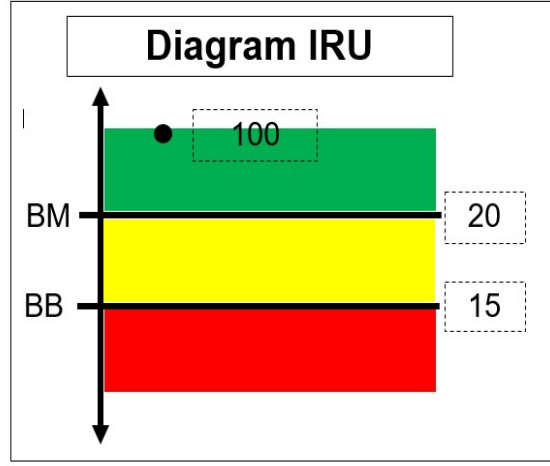
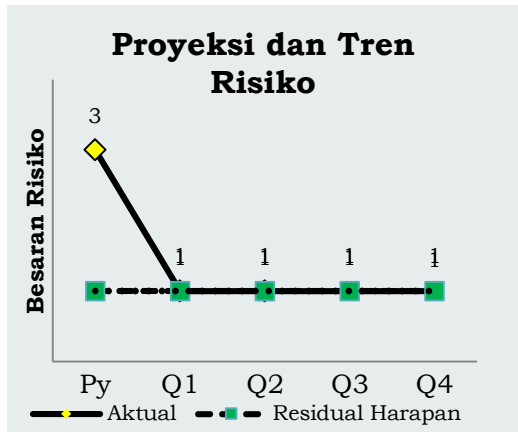
Sasaran	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif
Risiko#8.2	Tidak sesuainya <i>hard competency</i> pegawai dengan bidang tugas
IRU	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada awal tahun, risiko ini memiliki level kemungkinan 3 (kadang terjadi) dan level dampak 1 (tidak signifikan) sehingga besaran risikonya sebesar 3 (sangat rendah). Pada Triwulan IV 2024, persentase pegawai yang tidak sesuai *hard competency* adalah 0% sehingga level kemungkinan aktual ditetapkan 1 (hampir tidak terjadi). Dari sisi dampak, persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah 119.% dari target sebesar 90% yang membuat level dampak aktual Triwulan IV 2024 menjadi 1 (tidak signifikan). Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV adalah 1 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan turun pada triwulan berikutnya seiring dengan meningkatnya progress pengembangan kompetensi pegawai yang dapat menurunkan level dampak.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- Melakukan pengusulan diklat
- Melakukan monitoring pengusulan dan hasil diklat pegawai

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong dan mengusulkan setiap pegawai untuk mengikuti diklat sesuai bidang dan tusinya. - Memonitoring pengusulan dan hasil diklat pegawai. 	Penanggung Jawab Subbagian Umum	Waktu Pelaksanaan Q2- Q4
---	---	------------------------------------

Rekomendasi Risiko telah dimitigasi dengan optimal pada Triwulan IV. Namun, guna menjaga level risiko, diperlukan langkah mitigasi dari sisi dampak. Oleh karena itu, Penanggung Jawab Risiko perlu memperhatikan persentase pengembangan kompetensi pegawai.

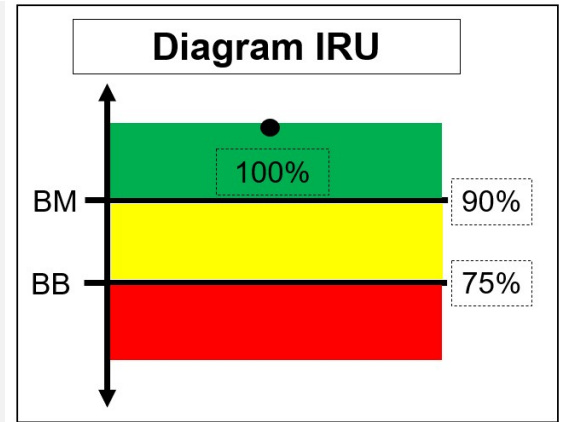
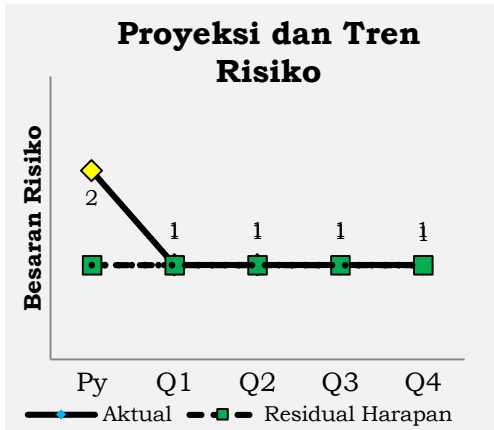
Sasaran	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal
Risiko#9.1	Penarikan dana tidak sesuai dengan rencana
IRU	Persentase serapan anggaran

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

Pada awal tahun, risiko ini memiliki level kemungkinan 2 (jarang terjadi) dan level dampak 1 (tidak signifikan) sehingga besaran risikonya sebesar 2 (sangat rendah). Pada Triwulan IV 2024, persentase penyimpangan Rencana Penarikan Dana (RPD) adalah sebesar 0% sehingga level kemungkinan aktual ditetapkan 1 (hampir tidak terjadi). Akibatnya, dari sisi dampak, persentase revisi anggaran juga menunjukkan angka 0% yang membuat level dampak aktual Triwulan IV 2024 menjadi 1 (tidak signifikan). Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menjadi 1 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap pada triwulan berikutnya seiring dengan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yang diharapkan bisa menjaga penarikan dana sesuai dengan rencana.



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- ND kepada Masing-masing Seksi terkait rencana kegiatan Seksi

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

- (seluruh rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan)

Penanggung Jawab

Subbagian Umum

Waktu Pelaksanaan

-

Rekomendasi

Risiko telah dimitigasi dengan optimal pada Triwulan IV. Namun, guna menjaga level risiko, Penanggung Jawab Risiko diimbau untuk tetap melakukan pengendalian risiko.

Sasaran	Komunikasi publik yang efektif
Risiko #10.1	Ketidaktepatan waktu tindak lanjut permintaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN
IRU	Persentase serapan anggaran

Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko

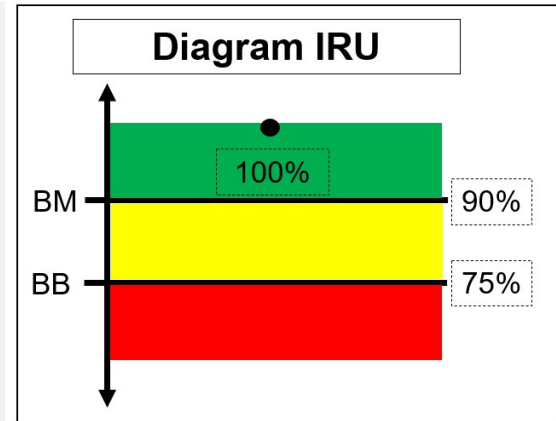
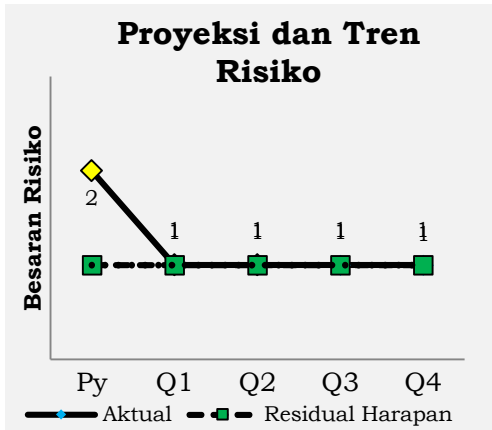
Pada awal tahun, risiko ini memiliki level kemungkinan 2 (jarang terjadi) dan level dampak 1 (tidak signifikan) sehingga besaran risikonya sebesar 2 (sangat rendah).

Pada Triwulan IV 2024, indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) adalah sebesar 100 dari target Triwulan IV sebesar 80 sehingga level kemungkinan aktual ditetapkan 1 (hampir tidak terjadi). Akibatnya, dari sisi dampak, tidak terdapat keluhan mengenai pengelolaan layanan informasi publik yang membuat level dampak aktual Triwulan IV 2024 menjadi 1 (tidak signifikan).

Dengan demikian besaran risiko pada Triwulan IV menjadi 1 dengan level risiko 1 (sangat rendah).

Proyeksi Risiko:

Level risiko diproyeksikan tetap pada triwulan berikutnya seiring dengan upaya peningkatan kualitas peneglolaan informasi oublek .



Mitigasi yang Telah Dilaksanakan

- ND kepada Masing-masing Seksi terkait rencana kegiatan Seksi

Mitigasi yang akan Dilaksanakan

- (seluruh rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan)

Penanggung Jawab

Seksi HI

Waktu Pelaksanaan

-

Rekomendasi

Risiko telah dimitigasi dengan optimal pada Triwulan I. Namun, guna menjaga level risiko, Penanggung Jawab Risiko diimbau untuk tetap melakukan pengendalian risiko.



TERIMA KASIH



KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA PIMPINAN RAPAT

Kerangka Acuan Dialog Kinerja Pimpinan Rapat KPKNL Bandar Lampung Periode Triwulan IV Tahun 2024						
Fokus Tema: Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Waktu dan Tempat Pelaksanaan 1. Hari/Tanggal : Jumat, 3 Januari 2025 2. Waktu : 13.30 WIB s/d selesai 3. Tempat : Ruang Rapat Lt.2					
Isu Strategis: 1. Monev ZI WBK Tahun 2024	Partisipan: 1. Pimpinan : Titik Wijayanti selaku Kepala KPKNL Bandar Lampung 2. Peserta : daftar hadir terlampir					
Output: 1. Langkah strategis penunjang hasil evaluasi capaian kinerja secara berkala. 2. Solusi atas permasalahan kinerja aktual. 3. Adanya rencana aksi yang lebih detail dan terukur untuk mencapai target kinerja.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Agenda</th> <th style="width: 50%;">Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 1. Reviu kinerja tematik highlight kinerja sesuai fokus tema yang ditentukan </td> <td style="vertical-align: top;"> 13.00 s.d. 15.30 WIB </td> </tr> </tbody> </table>	Agenda	Waktu	1. Reviu kinerja tematik highlight kinerja sesuai fokus tema yang ditentukan	13.00 s.d. 15.30 WIB	
Agenda	Waktu					
1. Reviu kinerja tematik highlight kinerja sesuai fokus tema yang ditentukan	13.00 s.d. 15.30 WIB					

KERANGKA ACUAN DIALOG KINERJA PESERTA RAPAT

Kerangka Acuan Dialog Kinerja Peserta Rapat KPKNL Bandar Lampung Periode Triwulan IV Tahun 2024						
Fokus Tema: Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	Waktu dan Tempat Pelaksanaan 1. Hari/Tanggal : Jumat, 3 Januari 2025 2. Waktu : 13.30 WIB s/d selesai 3. Tempat : Ruang Rapat Lt.2					
Isu Strategis: 1. Monev ZI WBK Tahun 2024.	Partisipan: 1. Pimpinan : Titik Wijayanti selaku Kepala KPKNL Bandar Lampung 2. Peserta : daftar hadir terlampir					
Input (bahan yang harus disiapkan oleh peserta rapat) : 1. Capaian kinerja dan pengendalian risiko triwulan III Tahun 2024 masing-masing seksi dan data dukung terkait 2. Permasalahan seputar kinerja yang perlu diungkapkan 3. Sumber-sumber diskusi terkait penyusunan rencana aksi.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Agenda</th> <th style="width: 50%;">Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 1. Reviu kinerja tematik highlight kinerja sesuai fokus tema yang ditentukan </td> <td style="vertical-align: top;"> 13.30 s.d. 15.30 WIB </td> </tr> </tbody> </table>	Agenda	Waktu	1. Reviu kinerja tematik highlight kinerja sesuai fokus tema yang ditentukan	13.30 s.d. 15.30 WIB	
Agenda	Waktu					
1. Reviu kinerja tematik highlight kinerja sesuai fokus tema yang ditentukan	13.30 s.d. 15.30 WIB					
Output: 1. Langkah strategis penunjang hasil evaluasi capaian kinerja secara berkala. 2. Solusi atas permasalahan kinerja aktual. 3. Adanya rencana aksi yang lebih detail dan terukur untuk mencapai target kinerja.						



Formulir Lost Even Database (LED)

Unit Organisasi : KPKNL Bandar Lampung
Periode Penerapan : Triwulan IV Tahun 2024

Waktu	Lokasi	Kejadian	Penyebab	Dampak	Mitigasi	Kondisi Setelah Mitigasi
<diisi dengan tanggal dan waktu terjadinya Risiko>	<diisi dengan lokasi terjadinya Risiko>	<diisi dengan penjelasan singkat terjadinya risiko>	<diisi dengan uraian penyebab yang menimbulkan terjadinya risiko>	<diisi dengan uraian dari dampak yang ditimbulkan dari terjadinya Risiko>	<diisi dengan mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak Risiko>	<diisi dengan uraian kondisi setelah dilakukan mitigasi Risiko>
		N I H I L				

Bandar Lampung, 7 Januari 2025
Kepala KPKNL Bandar Lampung



ditandatangani secara elektronik
Titik Wijayanti



Formulir Mitigasi Risiko

Unit Organisasi
Periode Penerapan

: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung
: Tahun 2024

No	Prioritas Risiko	Rencana Penanganan								Implementasi Mitigasi Risiko
		Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target	Kendala	Sumber Daya Yang Dibutuhkan	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	
<diisi dengan nomor risiko pada lembar Formulir Profil dan Peta Risiko>	<diisi dengan prioritas risiko yang perlu ditangani/ risiko utama sesuai dengan formulir profil dan peta risiko>	<diisi dengan opsi penanganan risiko yang dipilih>	<diisi dengan nama kegiatan atau tahapan kegiatan penanganan risiko>	<diisi dengan target output yang diharapkan dari kegiatan tersebut>	<diisi dengan target output yang ditetapkan>	< Kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan mitigasi>	<diisi sumber daya yang dibutuhkan seperti biaya, SDM, regulasi, atau fasilitas lain, termasuk rencana kontinjensi apabila diperlukan >	<diisi dengan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan>	<diisi dengan unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung kegiatan>	
1.2	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	- mengurangi kemungkinan - mengurangi dampak - menghindari risiko	Internalisasi pesan-pesan Antikorupsi dan Antigratifikasi	a. Notulen pelaksanaan kegiatan internalisasi antikorupsi dan antigratifikasi b. Penyebaran pesan-pesan antikorupsi dan antigratifikasi via medsos kantor	2 (dua) notulen dan postingan medsos tiap bulan	Kehadiran semua pegawai dalam kegiatan internalisasi tidak dapat dipastikan karena adanya penugasan luar kantor, PJJ, cuti dsb	SDM, Fasilitas	Semester I : 1 notulen Semester II : 1 notulen Feb s/d Des : 1 postingan medsos setiap bulan	Seksi KI dan Seksi HI	a. Telah dilaksanakan sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi kepada para pegawai dengan narasumber Kepala KPKNL Bandar Lampung pada tgl 21 Mei 2024 dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) pada tanggal 13 September 2024 b. Telah dilakukan publikasi pesan-pesan antikorupsi dan antigratifikasi via medsos kantor
3.2	Terdapat lelang laku atas objek lelang dengan nilai limit di atas 5 Milyar	- mengurangi kemungkinan - mengurangi dampak - menghindari risiko	Koordinasi dengan Pemohon Lelang	LPT pelaksanaan koordinasi dengan Pemohon Lelang	4 (empat) LPT pelaksanaan koordinasi dengan Pemohon Lelang	Rendahnya minat masyarakat, objek lelang tidak <i>marketable</i> , adanya risiko terkait penguasaan objek lelang.	PMK 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	Triwulan I : 1 LPT Triwulan II : 1 LPT Triwulan III : 1 LPT Triwulan IV : 1 LPT	Jabatan Fungsional Pelelang	Telah dilakukan koordinasi dengan Pemohon Lelang setiap triwulannya untuk potensi lelang laku atas objek lelang dengan nilai limit di atas 5 Milyar
3.3	Tahapan pengurusan piutang negara tidak dapat terlaksana secara optimal	- mengurangi kemungkinan - mengurangi dampak - menghindari risiko	Membuat Profiling BKPN	Resume Profiling BKPN	2	Berkas BKPN sudah lama di PUPN	Berkas BKPN dan Aplikasi Focus PN	Semester I : 1 profiling Semester II : 1 profiling	Seksi PN	Telah disusun resume profiling BKPN pada semester I dan II oleh seksi PN
6.2	Pelaksanaan Lelang Tidak Ada Peminat	- mengurangi kemungkinan - menurunkan dampak - menerima risiko	Koordinasi dengan Pemohon Lelang	LPT pelaksanaan koordinasi dengan Pemohon Lelang	4 (empat) LPT pelaksanaan koordinasi dengan Pemohon Lelang	Rendahnya minat masyarakat, objek lelang tidak <i>marketable</i> , adanya risiko terkait penguasaan objek lelang.	PMK 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	Triwulan I : 1 LPT Triwulan II : 1 LPT Triwulan III : 1 LPT Triwulan IV : 1 LPT	Jabatan Fungsional Pelelang	Telah dilakukan koordinasi dengan Pemohon Lelang setiap triwulannya untuk meminimalisasi potensi lelang Tidak Ada Peminat (TAP)

11.2	Tidak terpenuhinya penilaian keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM dengan memadai	- mengurangi kemungkinan - mengurangi dampak - menghindari risiko	Melaksanakan dan memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dengan pedoman LKE	Laporan <i>progress</i> rencana kerja keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM tiap triwulan	4 (empat) laporan triwulan <i>progress</i> rencana kerja keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	<i>Load</i> pekerjaan rutin pegawai yang tinggi pada masing-masing tusi	SDM	Triwulan I s/d IV	Semua Seksi/Subbag/Jabfung	Telah disusun laporan progress rencana kerja keberlanjutan ZI WBK setiap triwulannya oleh para Koordinator Tim ZI WBK
------	---	---	--	---	--	---	-----	-------------------	----------------------------	---

Bandar Lampung, 7 Januari 2025
Kepala KPKNL Bandar Lampung



ditandatangani secara elektronik
Titik Wijayanti



**MATRIKS TINDAK LANJUT
DIALOG KINERJA ORGANISASI PADA KPKNL BANDAR LAMPUNG
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2024**

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Status	Keterangan
		Penanggung Jawab	Pendukung			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melakukan perhitungan NKO dan NKO K3 per 31 Desember 2024	Seksi KI	-	Januari 2025	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Seksi KI akan berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu untuk perhitungan NKO dan NKO K3 per 31 Desember 2024. Seksi KI akan menyampaikan Laporan Capaian Kinerja KPKNL Bandar Lampung per 31 Desember 2024

Keterangan pengisian tabel:

- (1) diisi nomorurut
- (2) diisi dengan rencana aksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan/ hasilrapat
- (3) diisi dengan unit yang bertanggung jawab (leader/koordinator) pelaksanaan rencanaaksi
- (4) diisi dengan unit yang mendukung pelaksanaan rencanaaksi
- (5) diisi dengan target penyelesaian rencanaaksi
- (6) diisi dengan status apakah masih tahap persiapan, dalam pelaksanaan, atau selesai
- (7) diisi dengan keterangan lain, jika diperlukan



**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
DIALOG KINERJA ORGANISASI PADA KPKNL BANDAR LAMPUNG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2024**

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Target Penyelesaian	Status	Keterangan
		Penanggung Jawab	Pendukung			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen kinerja organisasi, kinerja pegawai dan risiko	Seksi KI dan Subbag Umum	-	Triwulan IV Tahun 2024	Selesai	Sesuai ND Kakanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Nomor : ND-60/WKN.05/2025 tanggal 14 Januari 2025 hal Penyampaian Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2024, disebutkan bahwa realisasi untuk periode triwulan IV tahun 2024 : 1. Indeks Pengelolaan Kinerja Organisasi : 99,78 2. Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai : 95,84 3. Indeks Kualitas Manajemen Risiko : 99,25 Sehingga realisasi Capaian per 31 Desember adalah : $(99,78 \times 30\%) + (95,84 \times 30\%) + (99,25 \times 40) = \mathbf{98,39}$ (dari target 85)
2	Meningkatkan indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	Seksi KI	-	Triwulan IV Tahun 2024	Selesai	Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas UKI per 31 Desember 2024 adalah 98,13 dari target 82 sesuai ND-1077 (Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu) tanggal 15 Nov 2024 hal Penyampaian Penilaian Indeks Efektivitas UKI

Keterangan pengisian tabel:

- (1) diisi nomor urut
- (2) diisi dengan rencana aksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan/ hasil rapat
- (3) diisi dengan unit yang bertanggung jawab (leader/koordinator) pelaksanaan rencana aksi
- (4) diisi dengan unit yang mendukung pelaksanaan rencana aksi
- (5) diisi dengan target penyelesaian rencana aksi
- (6) diisi dengan status apakah masih tahap persiapan, dalam pelaksanaan, atau selesai
- (7) diisi dengan keterangan lain, jika diperlukan

